

MENGGALI AKAR KEMISKINAN



Melihat Dari Dekat Kemiskinan
di Provinsi Lampung

■ **TIM PENYUSUN**

Ridwan Saifuddin
Mohammad Syafrizal
Zainal Mutaqim
Shinta Fitriana
Junaidi

■ **EDITOR:**

Ridwan Saifuddin

BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
2018

MENGGALI AKAR KEMISKINAN

Melihat Dari Dekat Kemiskinan di Provinsi Lampung



BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG
Editor
Ridwan Saifuddin

BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
2018



**BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**

Menggali Akar Kemiskinan; Melihat Dari Dekat Kemiskinan di Provinsi Lampung

Cetakan 2018; 16 x 23 cm

ISBN :
Penerbit : BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG
Jl. Kantor Pos No.2 Telukbetung, Bandar Lampung
Telp/Fax. (0721) 5605759, www.balitbangda.lampungprov.go.id; balitbangdalampung@gmail.com
Tim Penyusun : Ridwan Saifuddin, Mohammad Syafrizal, Zainal Mutaqim, Shinta Fitriana, Junaidi
Editor : Ridwan Saifuddin

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Buku “Menggali Akar Kemiskinan; Melihat dari Dekat Kemiskinan di Provinsi Lampung” ini dapat diselesaikan pada waktunya. Terima kasih kepada Tim Penyusun buku dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, yang berkontribusi dalam memberikan wawasan dan wacana baru tentang potret kemiskinan riil di tengah-tengah masyarakat

daerah ini. Buku ini cukup baik memberikan gambaran tentang kondisi rumah tangga miskin, yang sekaligus bisa menjadi referensi berbagai pihak terkait upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Merupakan permasalahan daerah dan nasional, di mana tingkat kemiskinan belum terangkat secara signifikan, yang berarti masih banyak keluarga-keluarga dengan permasalahan ekonomi yang belum terpecahkan. Meski, harus diakui, upaya pemerintah untuk mengatasi problem kemiskinan ini sudah dilakukan sejak lama. Dalam setiap periode pemerintahan, program pengentasan penduduk miskin selalu ditempatkan dalam prioritas penting. Hanya saja, data statistik menunjukkan efektifitas program tersebut belum memberikan hasil optimal dengan menurunnya jumlah warga miskin secara berarti. Dari kajian ini secara umum terlihat bahwa masalah dalam rumah tangga miskin cukup kompleks. Mencakup faktor ekonomi dan juga faktor nonekonomi.

Menjadi tantangan bagi pemerintah daerah khususnya bagaimana merumuskan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, sehingga kesejahteraan warga di daerah bisa meningkat secara merata. Melalui buku ini, kita bisa lebih dekat melihat fakta kondisi rumah tangga miskin yang ada di kabupaten dan kota. Dari kajian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan perumusan program dan kegiatan yang lebih spesifik dan tepat,

sehingga solusi terhadap problem ekonomi masyarakat dapat teratasi secara lebih efektif. Semoga dari kajian yang dilakukan Balitbangda Provinsi Lampung ini dapat memancing dan melahirkan perspektif baru tentang permasalahan yang ada di daerah, khususnya dalam upaya kita mengatasi kemiskinan ini.

Sekali lagi, apresiasi bagi tim penyusun buku ini. Dan tentu dibutuhkan umpan balik berupa masukan dan saran untuk menyempurnakan hasil kajian, sekaligus menerjemahkan hasil kajian ini dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif; bukan sekadar pengulangan dari program-program sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi Kemajuan Provinsi Lampung.



GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO



**BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR



Tantangan utama lembaga kelitbang di daerah adalah memberikan kontribusi optimal terhadap pemecahan permasalahan-permasalahan di daerah, baik di internal pemerintahan maupun di masyarakat. Salah satu permasalahan sosial di daerah yang cukup laten dan belum ditemukan formula jitu untuk mengatasinya adalah problem kemiskinan. Ini tidak hanya terjadi di Provinsi Lampung, melainkan permasalahan secara nasional.

Mengingat kemiskinan sebagai problem sosial utama masyarakat, Balitbangda menjadikannya sebagai isu penting untuk dibahas dan dikaji, dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang yang berbeda dari kajian-kajian yang sudah ada. Memang pembahasan permasalahan kemiskinan sementara ini banyak menggunakan pendekatan deduktif, sehingga solusi terhadap permasalahan yang ditawarkan untuk mengentaskan rakyat miskin condong seragam. Padahal, karakteristik dan kondisi lingkungan warga miskin acap kali spesifik dan berbeda satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi kecil dari Balitbangda terhadap permasalahan besar, yaitu kemiskinan. Kekurangan pasti ada, dan kami mengapresiasi serta memperhatikan setiap masukan maupun saran untuk penyempurnaan kajian selanjutnya. Terimakasih kepada tim peneliti yang telah menyelesaikan kajian ini.

KEPALA BALITBANGDA

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

PRAKATA

Kemiskinan bukan cerita baru. Kemiskinan telah dicatat pada berbagai naskah dan buku sejak dahulu; mulai buku-buku sastra hingga statistik. Kemiskinan dianggap sebagai permasalahan, yang jawabannya belum terumuskan secara absolut. Potret kemiskinan hingga saat ini masih mudah kita jumpai, baik di perkotaan terlebih di perdesaan. Berbagai program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan, tetapi belum juga masalah terselesaikan.

Secara konsepsional, keluarga miskin sering diformulasikan sebagai kondisi kehidupan keluarga yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan dasar bagi anak-anaknya. Secara operasional, kriteria tersebut kemudian dikaitkan dengan tolok ukur yang disebut garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah kelompok masyarakat yang berdasarkan indikator operasional tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan target pembangunan khususnya program penanggulangan kemiskinan biasanya dirumuskan sebagai upaya mengentaskan kelompok masyarakat miskin tersebut agar mereka bisa meningkatkan taraf hidup sampai berada di atas garis kemiskinan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang dialami masyarakat belum seimbang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tergolong tinggi, hanya membuat jurang antara si kaya dengan si miskin semakin menjauh. Penyebab utama ketimpangan tersebut diantaranya adalah akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang masih sulit didapatkan kelas bawah, terutama yang tinggal di pelosok daerah.

Kajian ini lebih diarahkan untuk mengenali kehidupan keseharian rumah tangga miskin (RTM) di berbagai daerah di Provinsi Lampung, tanpa tendensi untuk memberikan solusi operasional tunggal bagaimana

mengentaskan mereka dari masalah hidupnya. Hasil observasi terhadap 20 RTM yang tersebar di kabupaten dan kota menunjukkan pola yang hampir serupa dalam kehidupan keluarga miskin tersebut.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Lampung, yang terdiri dari 14 kabupaten dan kota. Sedangkan objek penelitian atau sebagai informan penelitian adalah warga yang terkatagori Rumah Tangga Miskin di 14 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.



TIM PENELITIAN

**BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**

UCAPAN TERIMA KASIH

Tersusunnya buku ini merupakan hasil kerja kolektif yang dikoordinir Tim Penyusun dari Balitbangda Provinsi Lampung. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada para Pengajar Muda Lampung Mengajar yang telah memberikan kontribusi dalam pengumpulan data lapangan, sebagai berikut:

1. Ronaldo Fisda Costa, S.Pd
2. Anggun Mawar Sari, S.Pd
3. Doni Kurniawan, S.Pd
4. Fitria Widaswari, S.Pd
5. Desiana Dwi Sagita, S.Pd
6. Ahmad Fauzi, S. Pd
7. Erwin Hidayat, S.Si
8. Reki Fahlevi, S.Pd
9. Feri Andesfa, S.Pd
10. Tugiyah, S.Pd
11. Dwi Aprianto, S.Kom
12. Taufiq Kurohman, S.Pd
13. Ahmad Eko Purnomo, S.Pd
14. Arih Oerip Adhitya Nugraha
15. Adelaide, S.Pd
16. Sasmita Erzana, S.Pd, M.Pd
17. Hono Sungkono, S. Pd
18. Ranti Susilowati, S.Pd, M.Pd
19. Ummi Lathifa, S.Si
20. Lusi Astuti, S.Pd.

Para Pengajar Muda Lampung Mengajar tersebut terlibat dalam observasi langsung terhadap 20 keluarga yang menjadi objek kajian ini.

Semoga kajian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya pengentasan permasalahan kemiskinan di Provinsi Lampung khususnya.

KEPALA BALITBANGDA

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR GUBERNUR LAMPUNG	i
KATA PENGANTAR KEPALA BALITBANGDA	iii
PRAKATA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II POTRET PROVINSI LAMPUNG	5
Ekonomi dan Kemiskinan	10
BAB III PARADIGMA KAJIAN KEMISKINAN	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
Terisolasi	25
Transmigrasi	31
Keterbatasan Aset	35
Kelemahan Fisik	37
Kerentanan (<i>Vulnerable</i>)	39
Ketidakterdayaan (<i>Powerless</i>)	40
Potensi Alam	43
Pernikahan Dini	46
B. Pembahasan	49
Akses dan Mutu Pendidikan	49
Pemberdayaan Ekonomi	56
Pemberdayaan Masyarakat	59

BAB V CERITA BIASA YANG TAK SEMESTINYA	60
Problem Pendidikan	60
Tekad untuk Berubah	68
Secercah Harapan	70
Kekayaan Alam Bukan Jaminan	75
Nilai Baru Barang Bekas	79
Asa di Ujung Desa	86
Sebagai Pamong	89
 BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 94
Kesimpulan	94
Pola-Pola RTM	95
Rekomendasi	99
 SEKILAS TIM PENYUSUN	 105

BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG

BAB I

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadi permasalahan yang tak kunjung terpecahkan di negara kita. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan pemerintah melalui berbagai program yang secara langsung menyentuh kelompok miskin, maupun program-program antara seperti pembangunan infrastruktur publik yang tengah digalakan pemerintahan sekarang ini.

Sayogyo membedakan tipe orang miskin menurut besarnya penghasilan, yang disetarakan dengan beras, selama setahun, yaitu: miskin, sangat miskin, dan paling miskin (Suyanto, 1995). BPS menggunakan 14 kriteria untuk mengatagorikan Rumah Tangga Miskin (RTM), yaitu: luas lantai rumah, jenis lantai rumah, jenis dinding rumah, ketiadaan wc, ketiadaan listrik, asal sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, frekuensi konsumsi makanan bergizi, kemampuan membeli pakaian, frekuensi makan dalam sehari, besarnya penghasilan bulanan, pendidikan kepala keluarga, dan nilai kepemilikan barang yang mudah dijual.

Faktanya, di Indonesia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,1 persen pada 2017, dan diharapkan menjadi kisaran 5,4 persen pada 2018, belum juga terlihat signifikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28 juta, atau sekitar 10,7 persen dari penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, yang rentan atau berada di atas sedikit garis kemiskinan berjumlah 25 juta rumah tangga. Artinya,

banyak orang yang tidak miskin, tetapi hidupnya tidak jauh dari garis kemiskinan.

Manfaat pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata oleh semua kalangan. Menurut *Global Wealth Databook* (2017), 45 persen total kekayaan Indonesia dikuasai hanya 1 persen orang terkaya. Dan 75 persen total kekayaan bangsa ini dikuasai hanya oleh 10 persen orang kaya. Gini ratio kita ada pada posisi 0,39. Rendahnya tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk tersebut berbanding lurus dengan rendahnya tingkat pendidikan.

Data menunjukkan jumlah angkatan kerja kita (usia 17–55 tahun) adalah 130 juta, dimana separo (50 persen) hanya lulusan SD, 18 persen lulusan SMP, 25 persen lulusan SMA, dan 7 persen lulusan S-1. Artinya, 68 persen angkatan kerja kita masih pada level pendidikan rendah (SD–SMP). Kondisi ini mengonfirmasi tajamnya kesenjangan pendapatan penduduk. Angka pengangguran Indonesia per Februari 2017 tercatat mencapai 7,01 juta jiwa. Tingkat pengangguran terbuka 5,5 persen. Porsi paling besar dari pengangguran berada di perkotaan, dengan 6,5 persen, sedangkan di desa 4 persen. Penurunan angka pengangguran di desa lebih kelihatan yaitu dari 4,35 persen menjadi 4 persen. Angkatan kerja kita yang mayoritas masih *unskill labour*.

Satu mata rantai—rendahnya tingkat pendidikan—ini menjadi titik krusial untuk mengurai problem kemiskinan. Sekadar perbandingan, Malaysia angkatan kerja yang lulus sarjana sudah mencapai 20 persen dari total angkatan kerjanya. Sementara Indonesia masih 7 persen; minoritas. Dengan anggaran pendidikan kita sekitar Rp200 trilyun (2018), kualitas dan kuantitas pendidikan menengah dan sarjana harus ditingkatkan. Titik-titik krusial ini yang harus dijadikan dasar strategi dan program pengentasan kemiskinan. Bukan hanya mengatasi dampak, tetapi menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan.

Akar kemiskinan bukan hanya bersifat materi. Aspek budaya dan perilaku juga sering menjadi sebab. Masih dalam aspek pendidikan, misalnya, minat baca bangsa kita masih memprihatinkan. Berdasarkan studi “Most Littered Nation In the World” yang dilakukan Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki

peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca, atau persis dibawah Thailand (59) dan diatas Bostwana (61) (*edukasi.kompas.com*).

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang dialami masyarakat belum seimbang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tergolong tinggi, hanya membuat jurang antara si kaya dengan si miskin semakin menjauh. Penyebab utama ketimpangan tersebut diantaranya adalah akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang masih sulit didapatkan kelas bawah, terutama yang tinggal di pelosok daerah.

Pemerintah telah merancang kebijakan untuk pemerataan ekonomi, mulai dari reformasi agraria, redistribusi aset, serta kemudahan akses pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat bawah. Juga memperbaiki desain dan kualitas implementasi program perlindungan sosial. Visi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga menjadikan pembangunan wilayah pinggiran sebagai prioritas. Pemerintah daerah pun didorong proaktif dan inovatif dalam menghadirkan kebijakan dan program-program yang berpihak pada kelompok miskin (*pro poor*) dalam rangka memutus rantai kemiskinan.

Namun, kajian The SMERU Research Institute berjudul “*Card for the Poor and Funds for Villages; Jokowi’s Initiatives to Reduce Poverty and Inequality*” (Asep Suryahadi dan Ridho Al Izzati; Mei 2018), menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah meluncurkan beberapa inisiatif kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin. Termasuk memperluas cakupan beberapa program bantuan sosial serta mendorong efektivitasnya. Selain itu, menggelontorkan dan meningkatkan dana desa dalam bentuk hibah kepada desa, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang tentang Desa.

Kajian yang dimaksudkan untuk menilai apakah pertumbuhan ekonomi telah berpihak pada rakyat miskin selama pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla ini, menyimpulkan dari hasil analisis, antara lain, bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini kurang berpihak pada rakyat miskin, khususnya selama tiga tahun pertama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf

Kalla. Yang lebih diuntungkan dari kebijakan pembangunan ekonomi adalah kelas menengah. Artinya, selama tiga tahun pertama pemerintahan ini penduduk miskin kurang terkoneksi dengan pertumbuhan ekonomi dibanding kelas menengah dan kelompok kaya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan belum cukup efektif. Program yang dilaksanakan tidak mampu secara efektif mendorong orang miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kebijakan dan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan secara umum belum terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan. Kebijakan yang dari sisi konsep cukup ideal, dalam implementasinya menemui banyak kendala. Pemerintah Daerah ditantang untuk lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini melalui kebijakan dan program yang inovatif. Kebijakan yang berbasis serta berpihak pada karakter dan kondisi faktual masyarakat di daerah. Kebijakan yang efektif dan sinergi antar-satuan kerja, dalam memperkuat perekonomian kelas bawah. Buku ini akan mengupas bagaimana profil kemiskinan di Provinsi Lampung, dilihat dari berbagai dimensi kehidupan Rumah Tangga Miskin (RTM). Mengetahui pola kehidupan RTM yang bisa menunjukkan kepada kita akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Dari sana, dapat dirumuskan bagaimana alternatif kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah.

BAB II

POTRET PROVINSI LAMPUNG

Lampung merupakan provinsi paling Selatan di Pulau Sumatera. Dengan Ibu Kota Bandar Lampung, daerah ini pada bagian Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu. Bagian Timur berbatasan dengan Laut Jawa, bagian Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan bagian Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Provinsi Lampung lahir pada 18 Maret 1964, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Atas dasar aturan tersebut, Keresidenan Lampung kemudian menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Tanjungkarang-Telukbetung. Sebelum itu, Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983, diganti menjadi Kotamadya Bandar Lampung, tepatnya sejak 17 Juni 1983.

Lampung merupakan daerah agraris, dimana banyak terdapat potensi pertanian yang dimiliki dan telah menghasilkan sebagai sumber ekonomi daerah. Buah-buahan yang dihasilkan provinsi ini, antara lain, pisang, nanas, pepaya, mangga, durian, jeruk, dan lainnya. Di samping itu, Lampung juga



Lampung merupakan daerah agraris, dimana banyak terdapat potensi pertanian yang dimiliki dan telah menghasilkan sebagai sumber ekonomi daerah.

kaya dengan produksi perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, lada, cengkeh, ubi kayu, juga ada tembakau.

Populasi ternak yang ada di daerah ini juga cukup bisa diandalkan sebagai potensi perekonomian daerah. Ternak tersebut, seperti kambing, sapi, domba, kerbau, hingga kuda. Selain itu, potensi unggas juga ada di daerah ini, seperti ayam dan itik. Sektor perikanan laut dan perairan umum juga menjadi potensi yang ada di provinsi ini. Perikanan yang diproduksi dibudidayakan melalui pengembangan kolam, tambak, jaring apung, keramba, sawah, dan budidaya laut. Hasil produksi pertanian Lampung tercatat cukup banyak. Selain padi, jagung, dan kedele yang menjadi sektor pertanian andalan negara kita, Lampung juga menghasilkan ubi kayu, ubi jalar, kacang, petersai, kubis, bawang merah, dan juga kentang.

Menurut data BPS (2017), pertumbuhan ekonomi Lampung selama 2016 tercatat 5,15 persen. Kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung menurut lapangan usaha, secara berturut-turut, adalah dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, sektor

penyumbang PDRD lain adalah industri pengolahan (manufaktur), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, konstruksi, pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi.

Luas wilayah Lampung tercatat 35.288,35 km². Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya, Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Ketagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus, dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang yang masuk di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Keadaan alam Lampung, di sebelah Barat dan Selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah Timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke Utara, merupakan perairan yang luas. Ibu Kota Bandar Lampung merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan dan pariwisata.



Pada akhir 2013, wilayah administrasi Provinsi Lampung mengalami pemekaran menjadi 13 wilayah kabupaten dan dua kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dengan luas masing-masing kabupaten/kota ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Kecamatan
di Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Kabupaten Lampung Barat	2.142,78 km ²	15	131
2.	Kabupaten Tanggamus	3.020,64 km ²	17	256
3.	Kabupaten Lampung Selatan	700,32 km ²	28	301
4.	Kabupaten Lampung Timur	5.325,03 km ²	24	264
5.	Kabupaten Lampung Tengah	3.802,68 km ²	23	232
6.	Kabupaten Lampung Utara	2.725,87 km ²	7	105
7.	Kabupaten Way Kanan	3.921,63 km ²	11	144
8.	Kabupaten Tulang Bawang	3.466,32 km ²	11	116
9.	Kabupaten Pesawaran	2.243,51 km ²	9	126
10.	Kabupaten Pringsewu	624,00 km ²	20	299
11.	Kabupaten Mesuji	2.184,00 km ²	15	147
12.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1.201,00 km ²	8	93
13.	Kabupaten Pesisir Barat	2.907,23 km ²	14	221
14.	Kota Bandar Lampung	296,00 km ²	20	126
15.	Kota Metro	61,79 km ²	5	22

Sumber: BPS, 2017 (diolah).

Pembangunan infrastruktur yang baik menjadi prioritas pemerintah Provinsi Lampung, sejalan dengan prioritas nasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan memperlancar pergerakan barang dan jasa, serta meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketersediaan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara kabupaten/kota, dan antara provinsi dengan provinsi sekitar, merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Kecamatan di Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	Jumlah Kcmtn	Jumlah Desa/Kel
1.	Kabupaten Lampung Barat	2.142,78 km ²	15	131
2.	Kabupaten Tanggamus	3.020,64 km ²	17	256
3.	Kabupaten Lampung Selatan	700,32 km ²	28	301
4.	Kabupaten Lampung Timur	5.325,03 km ²	24	264
5.	Kabupaten Lampung Tengah	3.802,68 km ²	23	232
6.	Kabupaten Lampung Utara	2.725,87 km ²	7	105
7.	Kabupaten Way Kanan	3.921,63 km ²	11	144
8.	Kabupaten Tulang Bawang	3.466,32 km ²	11	116
9.	Kabupaten Pesawaran	2.243,51 km ²	9	126
10.	Kabupaten Pringsewu	624,00 km ²	20	299
11.	Kabupaten Mesuji	2.184,00 km ²	15	147
12.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1.201,00 km ²	8	93
13.	Kabupaten Pesisir Barat	2.907,23 km ²	14	221
14.	Kota Bandar Lampung	296,00 km ²	20	126
15.	Kota Metro	61,79 km ²	5	22

Sumber: BPS, 2017 (diolah).



Provinsi Lampung dilayani oleh jaringan jalan negara sepanjang 1.159,57 km dan jalan provinsi 1.702,81 km. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan

listrik yang memadai. Jarak antara ibu kota provinsi ke kabupaten dan kota adalah sebagai berikut:

Jarak Ibu Kota Provinsi ke Ibu Kota Kabupaten/Kota

No	Ibu Kota Provinsi ke Ibu Kota Kabupaten/Kota	Jarak Tempuh
1.	Bandar Lampung – Liwa	241,42 km
2.	Bandar Lampung – Kota Agung	80,78 km
3.	Bandar Lampung – Kalianda	59,22 km
4.	Bandar Lampung – Sukadana	80,24 km
5.	Bandar Lampung – Gunung Sugih	57,85 km
6.	Bandar Lampung – Kota Bumi	115,19 km
7.	Bandar Lampung – Blambangan Umpu	209,32 km
8.	Bandar Lampung – Menggala	119,36 km
9.	Bandar Lampung – Gedong Tataan	25,98 km
10.	Bandar Lampung – Pringsewu	41,40 km
11.	Bandar Lampung – Mesuji	204,34 km
12.	Bandar Lampung – Panaragan	139,60 km
13.	Bandar Lampung – Krui	231 km
14.	Bandar Lampung – Bandar Lampung	0 km
15.	Bandar Lampung – Metro	51,81 km

Sumber: BPS, 2017

Ekonomi dan Kemiskinan

Mata pencaharian masyarakat pesisir Lampung sebagian besar adalah nelayan dan bercocok tanam. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di wilayah tengah atau dataran kebanyakan berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis, dan tanaman hortikultura lainnya. Lampung merupakan daerah penting dalam pengembangan lahan bagi perkebunan besar, seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, dan tebu. Sedang di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang cukup menonjol. Produknya telah masuk pasar nasional dan internasional. Selain hasil bumi, Lampung juga merupakan kota pelabuhan, karena Lampung merupakan pintu gerbang penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dari hasil bumi yang melimpah, muncul banyak industri-industri yang tersebar di kabupaten dan kota.

Salah satu misi strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Lampung, adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan sesuai dengan kondisi, potensi, serta permasalahan.

Kemiskinan di Provinsi Lampung tersebar di kabupaten dan kota dengan persentase yang berbeda-beda. Pada 2017, persentase penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Lampung Utara (21,55%), disusul Pesawaran (16,48%), kemudian Lampung Timur (16,35%). Secara total, persentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada 2017 adalah sebesar 13,69%. Berikut tabel sebaran persentase penduduk miskin di kabupaten dan kota selama kurun waktu 2012 hingga 2017:

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota 2012 – 2017

Kab/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lampung Barat	15,13	13,96	13,7	14,18	15,06	14,32
Tanggamus	16,1	15,24	14,95	14,26	14,05	13,25
Lampung Selatan	18,19	17,09	16,77	16,27	16,16	15,16
Lampung Timur	18,59	17,38	17,05	16,91	16,98	16,35
Lampung Tengah	14,96	13,37	13,13	13,3	13,28	12,9
Lampung Utara	25,16	23,67	23,32	23,2	22,92	21,55
Way Kanan	16,54	15,36	15,03	14,61	14,58	14,06
Tulangbawang	9,43	8,04	8,66	10,25	10,2	10,09
Pesawaran	18,01	17,86	17,51	17,61	17,31	16,48
Pringsewu	11,01	9,81	9,83	11,8	11,73	11,3
Mesuji	7,69	5,81	6,57	8,2	8	7,66
Tulang Bawang Barat	6,73	6,31	7,12	8,23	8,4	8,11
Pesisir Barat	-	-	-	15,81	15,91	15,61
Bandarlampung	12,65	10,85	10,6	10,33	10,15	9,94
Metro	12,09	11,08	10,82	10,29	10,15	9,89
Lampung	15,65	14,39	14,21	14,35	14,29	13,69

Sumber: BPS, 2017

Sementara, angka kemiskinan Lampung dari penghitungan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2016 mencapai 14,29 persen. Dibandingkan kondisi semester sebelumnya (September 2015)

angka kemiskinan Lampung mengalami kenaikan 0,76 poin atau dari 13,53 persen. Sejalan dengan kenaikan persentase, jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2016 juga bertambah 68,9 ribu jiwa, menjadi 1,101 juta jiwa, dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 sebesar 1,170 juta jiwa.

Perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan, dimana 15,69 persen penduduknya berkategori miskin. Angka ini setara dengan 936,21 ribu jiwa. Sedangkan di perkotaan, penduduk miskinnya sebanyak 10,53 persen atau 233,39 ribu jiwa. Selama periode September 2015 hingga Maret 2016, baik perkotaan maupun perdesaan mengalami kenaikan persentase dan jumlah penduduk miskin. Di daerah perkotaan bertambah sekitar 35,4 ribu jiwa (13,77%), sementara di daerah perdesaan bertambah 33,5 ribu jiwa (4,28%).

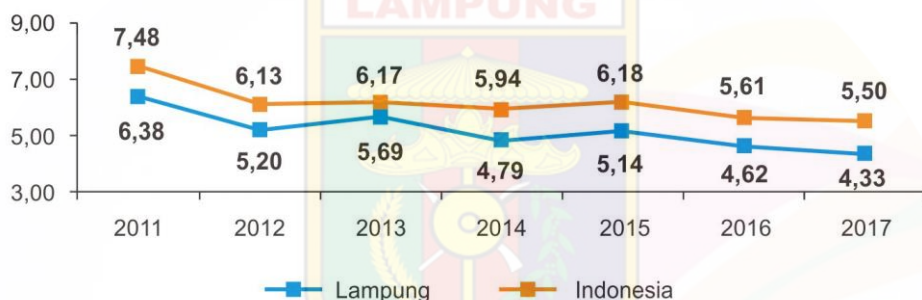
Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong miskin jika tidak terjadi peningkatan pendapatan. Garis kemiskinan Provinsi Lampung Maret 2016 sebesar Rp364.922 per kapita per bulan, atau naik 2,28 persen dibandingkan September 2015. Garis Kemiskinan 75,20 persen disumbangkan komoditi makanan, dimana *share* terbesar adalah dari konsumsi beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Sedangkan komoditi nonmakanan yang menyumbang 24,80 persen, utamanya dipengaruhi konsumsi perumahan, listrik, dan bensin.

Garis Kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan, yaitu Rp392.488 berbanding Rp364.922. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin, khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan, tidak mampu mengimbangi kenaikan harga, meskipun kenaikan Garis Kemiskinan tidak terlalu tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung juga mengalami fluktuasi dengan trend menurun sejak 2015 hingga 2017. Namun, tingkat pengangguran terbuka ini tidak otomatis menindikasikan tingkat kemiskinan, mengingat definisi bekerja yang dibuat BPS sangat longgar. Bekerja, menurut BPS, adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu—termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Dengan pengertian bekerja tersebut, turunnya angka pengangguran tidak serta menunjukkan naiknya tingkat kesejahteraan.

Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung Agustus 2011 - 2017



Sumber: BPS, 2018

Latar belakang angkatan kerja di Provinsi Lampung terdiri dari SMA (31,63%), SMK (19,80%), SMP (21,02%), dan SD atau dibawahnya (18,11%). Komposisi angkatan kerja secara lengkap di Provinsi Lampung menurut latar belakang pendidikan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Komposisi Angkatan Kerja di Provinsi Lampung

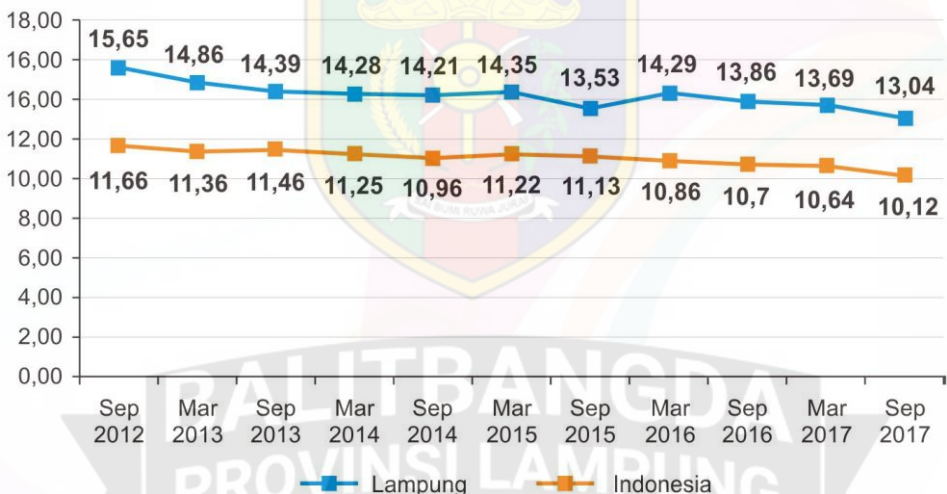
Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan	Bekerja			Pengangguran		
	Agt 2016	Feb 2017	Agt 2017	Agt 2016	Feb 2017	Agt 2017
<= SD	45,99	46,37	44,57	24,89	29,20	18,11
SMP	22,85	20,87	23,13	21,90	21,71	21,02
SMA Umum	15,35	14,30	15,31	30,73	19,54	31,63
SMA Kejuruan	7,87	8,96	8,64	14,23	17,90	19,80
Diploma I/II/III	1,90	2,72	2,25	3,48	3,40	4,08
Universitas	6,04	6,76	6,11	4,78	8,25	5,36
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2018

Pengangguran yang mengenyam pendidikan rendah (SMP ke bawah) turun dari 46,79 persen menjadi 39,13 persen. Sementara pada penduduk yang bekerja terlihat adanya sedikit penurunan pada pekerja yang berpendidikan rendah.

Data BPS menunjukkan angka kemiskinan Provinsi Lampung pada September 2017 menurun jika dibandingkan pada Maret 2017, yaitu dari 13,69% menjadi 13,04%, sehingga jarak dengan angka kemiskinan nasional (10,12%) menyempit. Perkembangan presentase kemiskinan di Provinsi Lampung dan secara nasional ditunjukkan pada gambar berikut ini:

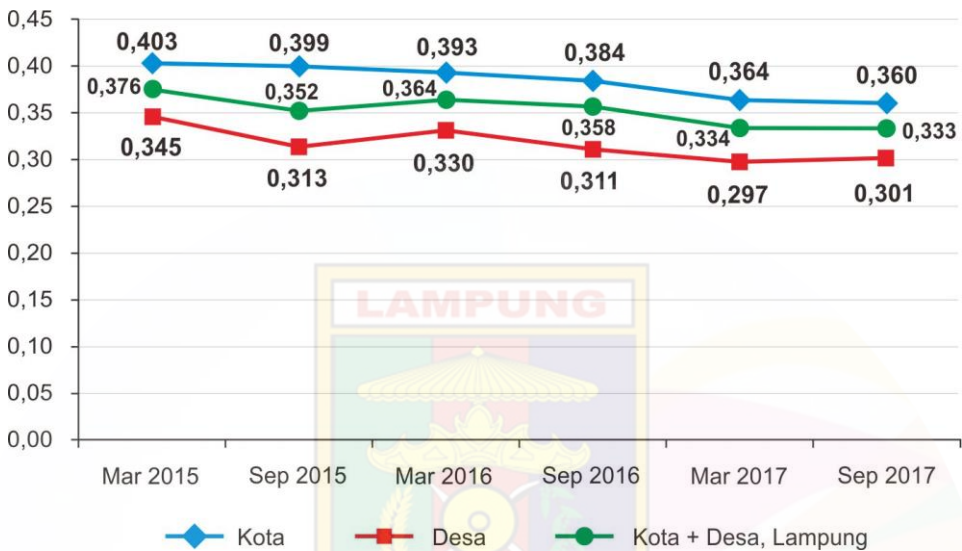
Perkembangan Persentase Kemiskinan Provinsi Lampung dan Nasional 2012 – 2017



Sumber: BPS, 2018

Studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu linier dengan angka kemiskinan. Ini dapat dijelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada indikator makro ekonomi, sedangkan angka kemiskinan menyorot pada individu dan keluarga warga. Artinya, pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi makro ekonomi, yang di dalamnya terdapat kesenjangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin yang ditunjukkan dengan gini rasio.

Tren *Gini Ratio* Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Lampung 2015-2017



Sumber: BPS, 2018

Nilai gini rasio berada di antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini rasio, berarti semakin tinggi tingkat kesenjangan. Kondisi di Lampung pada September 2017, ketika ketimpangan di kota dan provinsi menurun, justru di desa kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin justru meningkat dari 0,297 menjadi 0,301. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di perdesaan tidak dinikmati oleh penduduk miskin secara merata, yang mengakibatkan kesenjangan yang semakin besar antara penduduk kaya dan penduduk miskin.

Kemiskinan akan (cenderung) melahirkan kemiskinan baru. Maka, Provinsi Lampung akan sulit bergeser dari peringkat sepuluh provinsi termiskin di Indonesia, jika tidak ada strategi, program, serta kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya beli, dan memenuhi hak-hak dasar semua warganya (pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik) secara nyata. Data lain menunjukkan anomali hubungan antara investasi dan tingkat pengangguran. Kenaikan jumlah investasi ke daerah ini ternyata tidak otomatis menurunkan angka pengangguran. Anomali ini disebabkan

investasi yang masuk di daerah, tidak signifikan menyerap tenaga kerja dari daerah tersebut, melainkan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.

Karena itu, kebijakan investasi di daerah perlu lebih memperhatikan faktor pemanfaatan tenaga kerja lokal dan sumber daya lokal lainnya, yang diimbangi dengan program-program peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan investasi tersebut. Investasi juga akan lebih optimal dampaknya bagi pembangunan daerah, jika pemanfaatan bahan baku lokalnya juga optimal. Maka perlu ada kebijakan (insentif) bagi investasi yang ramah terhadap bahan baku dan tenaga kerja lokal.

Mayoritas (sekitar 70 persen) tenaga kerja di Lampung masih bekerja pada sektor informal. Ini perlu penanganan melalui program khusus dari pemerintah, untuk memperkuat sektor informal dengan meningkatkan kapasitasnya sehingga dapat diarahkan masuk ke sektor formal. Meski, *trend* generasi muda sekarang semakin banyak yang memilih bekerja secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi.

Kebijakan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak akan efektif tanpa sinergi dan integrasi dengan program pemerintah kabupaten dan kota. Mengatasi masalah kemiskinan harus menjadi gerakan bersama yang sinergis antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, serta pelibatan masyarakat secara langsung. Perlu program dan langkah kongkret untuk itu.



BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG

BAB III

PARADIGMA KAJIAN KEMISKINAN

Robert Chambers adalah seorang peneliti dan konsultan pembangunan perdesaan dari *Institute of Development Studies Universitas Sussex*, Inggris, untuk sejumlah negara di Asia dan Afrika, khususnya mengenai pembangunan perdesaan dan pertanian, kemiskinan, kesehatan, dan pengairan di perdesaan, serta dimensi lain yang berkaitan dengan kemiskinan dan pembangunan desa, yang digelutinya sejak 1969.

Dalam salah satu bukunya, *“Rural Development; Putting the Last First”* (1983) yang diterjemahkan dan diterbitkan LP3ES menjadi “Pembangunan Desa; Mulai dari Belakang,” secara mendasar Chambers mengkritik pendekatan pembangunan perdesaan yang bersifat *top down*. Menurutnya, pembangunan perdesaan melalui jalur resmi birokrasi lebih banyak bersifat seremonial. Alokasi anggaran pembangunan desa sebagian besar dinikmati para pelaksananya yang menginap dari hotel ke hotel. Kunjungan para pejabat—yang disebut oleh Chambers sebagai “wisatawan pembangunan desa”—tidak akan bisa menggali permasalahan desa dan kemiskinan yang sesungguhnya. Temu wicara dengan para petani acap kali menghasilkan kesimpulan yang salah. Petani yang mampu berbicara pada forum-forum seperti itu terbatas pada petani mandiri, ketua kelompok, elite desa, atau bahkan para penyuluh pertanian.

Secara konsisten ide-ide Robert Chambers selalu menekankan pada pendekatan dari bawah; belajar dari orang miskin dan membangun dari belakang, serta metode partisipatif untuk memahami dunia perdesaan

sampai ke akarnya. Orang miskin, pada dasarnya menjadi objek utama dari pembangunan perdesaan, yang justru sering luput dari perhatian dan jangkauan. Bantuan pembangunan desa tak jarang jatuh pada kelompok yang bukan sasaran sesungguhnya, seperti elite desa atau perangkat desa yang biasanya merupakan keluarga dekat Kepala Desa. Chambers pun mencatat bahwa rombongan penyambutan kunjungan pejabat terpanjang di dunia terjadi di Indonesia.

Paradigma pembangunan desa yang dikembangkan Chambers melalui *Participatory Rural Appraisal* (Memahami Desa Secara Partisipatif; Kanisius, 1996) tidak sekadar paradigma “memahami” (*understanding*) rakyat perdesaan yang miskin, melainkan sampai pada sikap “ingin melakukan perbaikan bersama mereka,” sehingga mereka akan dapat memperbaiki diri sendiri dan masyarakat yang senasib dengan mereka.

Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006, dalam pidato penerimaan hadiah Nobel, di Oslo, 10 Desember 2006, mengatakan: ”Sebagai dosen yang mengajarkan teori-teori ekonomi di universitas dengan latar bencana kelaparan yang mengenaskan di Bangladesh, saya merasakan kosongnya teori-teori ini dihadapan kelaparan dan kemiskinan. Saya ingin berbuat sesuatu yang langsung untuk menolong orang di sekitar saya, sekalipun satu manusia saja, untuk bisa melewati satu hari lagi dengan sedikit lebih lega.”

Menurut Yunus, kita akan dapatkan apa yang kita mau, atau apa yang tidak kita tolak. Kita mengamini fakta bahwa akan selalu ada orang miskin di sekitar kita, dan bahwa kemiskinan adalah takdir manusia. Inilah sebabnya mengapa orang miskin terus ada di sekitar kita. Bila kita meyakini sungguh-sungguh bahwa kemiskinan itu sama sekali tidak bisa kita terima, dan bahwa kemiskinan tidak boleh ada dalam masyarakat beradab, kita pun akan membangun lembaga-lembaga yang sesuai serta kebijakan-kebijakan yang menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan. Kita ciptakan apa yang kita mau.

Buku ini merupakan hasil penelitian deskriptif (noninfrnesia) dengan pendekatan partisipatif. Dalam penelitian ini digunakan standar kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992). Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan secara interaktif dan intensif oleh enumerator, disamping data-data sekunder yang terkait dengan tema penelitian.

Observasi lapangan dilakukan oleh petugas lapangan (enumerator) yang ditunjuk berjumlah 20 enumerator, dimana setiap enumerator berinteraksi dengan satu rumah tangga miskin di daerah masing-masing yang telah ditetapkan. Sebelum melakukan observasi terhadap rumah tangga miskin tersebut, enumerator terlebih dahulu dibekali dengan pemahaman latar belakang dan tujuan penelitian, serta seperangkat pedoman penelitian untuk dikembangkan di lapangan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Lampung, yang terdiri dari 14 kabupaten dan kota. Sedangkan objek penelitian atau sebagai informan penelitian adalah warga yang terkatagori rumah tangga miskin di 14 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Observasi lapangan yang dilakukan enumerator dilaksanakan pada April – Mei 2018 dengan berinteraksi langsung dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga yang menjadi tujuan observasi.



BALITBANGDA

PROVINSI LAMPUNG

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyoar rumah tangga miskin (RTM) yang berada di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sebagai tujuan observasi. Penetapan RTM dilakukan secara purposif dengan pertimbangan geografis dan administratif. Secara geografis pemilihan sasaran observasi mewakili kawasan pesisir, pegunungan, serta daerah-daerah terpencil di Provinsi Lampung. Sedangkan pertimbangan administratif objek observasi mewakili semua kabupaten dan satu ibu kota provinsi, Bandar Lampung. Pemilihan rumah tangga yang diobservasi, selain mempertimbangkan tingkat kemiskinan keluarga, juga diutamakan keluarga yang memiliki anggota inti lengkap, yaitu terdapat bapak, ibu, dan anak. Selain itu, keluarga yang dipilih juga merupakan warga tetap daerah setempat atau bukan warga yang tinggal sementara di daerah tersebut.

Secara kasat mata, untuk mengenali keluarga miskin bukan hal yang sulit. Perdesaan dan daerah-daerah terpencil di Provinsi Lampung—begitu juga di provinsi lain—adalah etalase kemiskinan dengan intensitas dan tingkat keparahan relatif. Desa serta daerah-daerah terpencil dan terisolir merupakan kantong-kantong kemiskinan yang belum merasakan manfaat pembangunan secara optimal. Pemerintah juga telah merilis data Rumah Tangga Miskin secara nasional yang selalu dimutakhirkan yang dipergunakan sebagai dasar untuk menyalurkan berbagai bantuan dari program-program pengentasan kemiskinan.

Secara konseptual, keluarga miskin sering diformulasikan sebagai kondisi kehidupan keluarga yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, serta pendidikan dasar bagi anak-anaknya. Secara operasional, kriteria tersebut kemudian dikaitkan dengan tolok ukur yang disebut garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah kelompok masyarakat yang berdasarkan indikator operasional tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan target pembangunan khususnya program penanggulangan kemiskinan biasanya dirumuskan sebagai upaya mengentaskan kelompok masyarakat miskin tersebut agar mereka bisa meningkatkan taraf hidup sampai berada di atas garis kemiskinan.

Rumah tangga miskin umumnya dapat dikenali pertama dari kondisi fisik rumah tinggalnya. Seperti keluarga Agus Salim (43), di Dusun Bandar Setia, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat. Rumah tempat tinggalnya berdinding anyaman bambu (geribik) dan sebagian papan. Ruang bagian depan berlantai semen, sedangkan dapur masih berlantai tanah. Atap rumahnya asbes, dan sinar matahari pun tampak



Dinding Rumah Agus Salim, di Suoh.

menerobos di beberapa bagian. Pada saat hujan, atap itu tak mampu menahan semua air yang turun, sebagiannya menetes masuk ke dalam rumah.

Ada dua kamar di rumah tersebut. Anak pertama dan ketiga (perempuan) tidur dalam satu kamar. Sedangkan anak laki-laki kedua tidur di kamar belakang. Sementara, orang tuanya tidur di ruang tamu bersama dengan anak keempat. Jika musim hujan, lingkungan sekitar rumah tersebut kumuh. Sampah kulit padi bercampur sisa air hujan, membuat halaman depan rumah sangat becek dan bau.



Suasana Dusun Bandar Setia, Suoh, Lampung Barat

Di ruang depan terdapat satu meja kecil tempat meletakkan televisi 21 inch. Tikar anyaman menjadi alas duduk. Tak ada kursi tamu, apalagi sofa. Sementara, di ruang yang difungsikan sebagai dapur, alat memasak seperti tungku dari tanah, bersanding dengan perabot-perabot dapur yang diletakkan begitu saja. Tak seperti hunian pada umumnya, rumah ini tak berjendela. Sirkulasi udara mengandalkan pintu serta celah-celah dinding anyaman bambu dan papan. Jika pintu tertutup, udara di dalam rumah ini terasa pengap. Pada siang hari, pencahayaan terbatas. Pada malam hari,

keluarga ini hanya mengandalkan lampu listrik tenaga turbin yang menumpang milik tetangganya.

Untuk memasak, Sumini (37), istri Agus, menggunakan kayu bakar. Keluarga ini sebenarnya punya kompor gas tiga kilo, tetapi tidak dipakai karena tak sanggup membeli gas yang di sana harganya sekitar Rp30 ribu. Sanitasi di rumah keluarga Agus Salim cukup memadai. Ada kamar mandi dan wc, yang dibangun dari bantuan pemerintah. Status rumah yang ditempati Agus Salim dan keluarganya itu sudah milik sendiri. Agus Salim dan istri berjuang keras untuk mendapatkan hak tanah dan membangun rumah sangat sederhana itu dari hasil buruh tani. Tanah yang tidak seberapa luasnya itu dibayar secara cicilan.

Di Kota Bandar Lampung, keluarga miskin sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak dan menetap. Terkadang harus berpindah-pindah, karena tidak punya lahan sendiri. Seperti keluarga Roni (57) yang mendiami lahan milik warga di salah satu gang di Jalan Ridwan Rais, Kelurahan Bumi Kedamaian, Bandar Lampung.

Roni lahir di Sungkai Utara, Lampung Utara pada 1961. Sampai SMP yang tidak diselesaikannya, Roni masih tinggal di Kotabumi. Kemudian ia pindah ke Bandar Lampung, dan pada 1993 Roni menikahi Erlawati (45) di Bandar Lampung. Sampai memiliki lima orang anak, keluarga ini tinggal berpindah-pindah di seputar Bandar Lampung.

Rumah keluarga Roni merupakan bangunan tidak permanen, atau lebih tepatnya bongkar-pasang. Bahan-bahan bangunan rumah merupakan bahan bekas dari rumah sebelumnya, yang sudah beberapa kali mengalami bongkar-pasang. Ada juga sebagian pemberian warga sekitar seperti kayu, triplek, seng, asbes yang merupakan barang-barang bekas pakai. Dinding bagian depan rumah terdiri beberapa lapisan triplek berwarna kuning, pemberian tetangga. Dinding bagian samping dan sekeliling rumah terdiri dari bahan geribik bambu warna putih. Lantai ruang bagian depan rumah terbuat dari semen, sedangkan tiga kamar yang ada masih berlantai tanah. Atap rumah campuran dari asbes dan seng bekas bongkar-pasang rumah lama, tambal sulam dengan seng pemberian warga di tempat yang baru. Tidak ada plafon atap rumah tersebut.



Bagian Samping Rumah Roni, Kedamaian.

Kondisi ruangan tidak tertata dengan rapih. Tampak perabot seadanya dan banyak pakaian yang berserakan dan di gantung tanpa lemari. Di kamar depan, terdapat dipan kayu dan alas tidur kasur tipis dan kelambu. Kamar kedua dan ketiga menyatu, hanya dipisahkan kain horden seadanya. Di dapur, terdapat mejikom untuk memasak nasi dan kulkas. Dua perabot elektronik itu juga pemberian kerabat. Di atas meja dapur tersebut, terlihat tudung saji yang hari itu sedang tidak ada makanan apa pun di dalamnya.

Secara umum, kondisi fisik rumah menunjukkan taraf kesejahteraan keluarga. Minimnya sarana atau perkakas rumah serta kelayakan ruangan sebagai menunjang aktivitas keluarga sehari-hari, menunjukkan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga untuk menyediakannya secara layak, baik secara kesehatan maupun estetika. Aspek kerapihan dan kebersihan umumnya juga kurang, karena budaya hidup bersih dan sehat masih menjadi satu kemewahan. Kerapihan dan kebersihan tidak menjadi hal penting dan prioritas dalam kehidupan keluarga miskin, yang hampir setiap hari terhimpit beban kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Rumah layak huni,

bagi keluarga miskin, bukanlah rumah permanen dengan ruangan dan perabot yang lengkap, bersih, dan tertata, melainkan sekadar tempat berteduh dan melangsungkan kehidupan sebagaimana manusia secara apa adanya.

Terisolasi

Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Lampung. Terletak di wilayah Pantai Barat Pulau Sumatera. Dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru. Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Pada bagian Utara kabupaten ini berbatasan dengan Bengkulu dan Lampung Barat. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas wilayahnya 2.953,48 ha, terdiri dari 11 kecamatan dan 118 pekon/desa. Dua pekon sudah berstatus kelurahan, dan 116 pekon masih berstatus desa. Di bawah pekon terdapat 998 pemangku atau lingkungan.

Kecamatan Bengkunt Belimbing awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Bengkunt, yang dimekarkan menjadi perwakilan Kecamatan Bengkunt Belimbing, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bengkunt Belimbing. Ibu kota kecamatannya adalah Kota Jawa. Secara geografis Kecamatan Bengkunt Belimbing merupakan daerah perbukitan yang dikelilingi Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang membentang dari Samudera Hindia. Lokasinya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat. Luas kecamatan ini 94.370 ha. Di bagian Timur mengalir sungai besar dan kecil yang bermuara di Samudera Hindia.

Pekon Way Haru merupakan salah satu dari 14 pekon di Bengkunt Belimbing. Lokasi Pekon Way Haru jauh dari pusat pemerintahan. Dikelilingi TNBBS dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pekon ini adalah salah satu daerah terisolir dan terpencil di Kabupaten



Kondisi Jalan dan Alat Transportasi di Way Haru

Pesisir Barat. Masyarakat Way Haru mayoritas beragama Islam, selain ada juga Hindu. Mayoritas bersuku Lampung, Jawa, dan Bali. Warga di sana hidup berdampingan secara damai dalam keragaman agama dan suku.

Alat transportasi utama warga di sana adalah sepeda motor yang dimodifikasi, agar bisa melewati jalan tanah yang licin, serta kendaraan tradisional gerobak sapi. Akses jalan ke Way Haru cukup sulit. Letaknya terpencil masuk ke pedalaman sejauh sekitar 20 km dari jalan Lintas Barat. Kondisi jalan belum beraspal, masih berupa jalan batu kasar dan tanah merah. Akses ke sana sangat sulit, harus menyeberangi 7 sungai, dan baru 3 sungai yang memiliki jembatan gantung, sedangkan 4 sungai lainnya masih harus diseberangi dengan rakit atau menyusuri muara pantai, baru bisa sampai ke Way Haru. Kondisi akan menjadi lebih sulit pada saat musim

hujan. Jalan menjadi becek, berlumpur, dan licin untuk dilewati kendaraan. Sungai-sungai akan meluap, sehingga jalan tidak bisa dilewati.

Jaringan listrik PLN belum sampai di Pekon Way Haru. Listrik di sana masih menggunakan PLTS yang hanya hidup dari pukul 18.00 sampai 23.00 WIB. Untuk jaringan komunikasi, sudah ada jaringan Telkomsel, tetapi itu pun hanya di titik-titik lokasi tertentu, atau menggunakan alat tambahan berupa antena.

Mat Muzni (43) adalah salah satu warga Pekon Way Haru. Bersama istri dan empat anaknya, ia tinggal di Dusun Way Kandis. Anak pertamanya berkebutuhan khusus sejak lahir, tetapi tidak mendapatkan pemeriksaan dan penanganan khusus secara medis. Anak kedua dan ketiga sudah berkeluarga; mereka menikah pada usia dini. Anak kedua menikah saat masih tahun pertama di bangku SMA, yang membuatnya harus putus sekolah. Anak ketiga, menikah saat masih SMP, juga akhirnya putus sekolah dan tinggal di rumah keluarga sang suami. Anak keempatnya masih menempuh pendidikan di Sekolah Dasar.

Seperti Muzni, sang istri, Marziah (41 tahun), juga tidak menyelesaikan pendidikan SD. Pendidikan rendah mereka karena kondisi perekonomian keluarga sebelumnya yang juga kekurangan. Mat Muzni adalah petani. Namun bukan petani di lahan sendiri, melainkan menggarap lahan milik warga dan mendapat bagi hasil. Tidak ada pekerjaan yang pasti, sehingga penghasilan setiap bulan tidak menentu. Begitu pula istrinya. Tergantung ada atau tidaknya warga yang memberikan pekerjaan kepadanya. Untuk pekerjaan harian lepas, biasanya Muzni diupah Rp50 ribu per hari. Rata-rata penghasilan suami-istri dari menjadi buruh tani ini setiap bulan sekitar Rp1 juta; tidak menentu.

Hasil buruh sawah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini. Perlu waktu empat bulan menunggu panen. Hasilnya pun kadang tidak memuaskan. Karena itu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, Muzni dan istri harus mencari pekerjaan sambilan, membersihkan kebun warga atau menjadi buruh bangunan. Saat menjadi buruh bangunan, sekitar tahun 2016, Muzni sempat terjatuh ketika memanggul dua sak semen. Sejak kejadian itu, ia menderita hernia dan harus menjalani operasi. Kini, kondisi

fisiknya tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat.

Rumah sederhana yang ditempati Muzni dan keluarga berdinding papan dan bambu. Di beberapa sudut terlihat sudah mulai lapuk, terutama di bagian belakang rumah. Karena dinding terbuat dari papan dan bambu, terdapat celah-celah antara papan menyebabkan angin masuk ke rumah saat malam hari. Status tanah yang ditempati adalah milik sendiri, dengan ukuran sekitar 12 x 13 m². Sedangkan rumah dibangun secara gotong-royong oleh masyarakat, dan bahan bangunan seperti kayu dan seng di dapat dari bantuan keluarga dan warga.

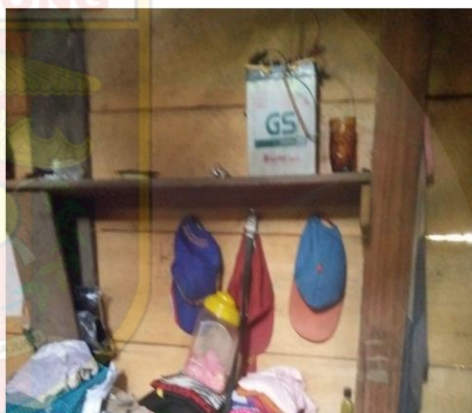
Lantai rumah masih berupa tanah. Di kamar dan ruang tengah, lantai diberi papan sebagai alas tempat tidur. Atap rumah dari seng, sehingga suhu di dalam rumah tersebut pada siang hari cukup panas dan pada malam hari menjadi dingin. Ruangan di rumah itu terdiri dari bagian depan yang dijadikan tempat berkumpul keluarga, juga sebagai tempat menerima tamu, sekaligus digunakan juga untuk tempat tidur. Ruangan tengah dijadikan satu



Keadaan Rumah Keluarga Mat Muzni

kamar dan ruangan belakang dijadikan dapur. Kondisinya secara umum tentu tidak bisa disebut layak. Tempat tidur tanpa dipan hanya beralaskan tikar dan bantal usang. Tidak ada ventilasi udara atau jendela, hanya terdapat pintu depan dan pintu belakang.

Karena tidak terdapat ventilasi, pencahayaan didalam rumah sangat minim, cahaya matahari hanya masuk melalui celah-celah di dinding. Malam hari, sumber penerangan dari PLTS yang terpusat, atau melalui modul tenaga surya dan accu 12 volt.



PLTS Terpusat dan Aki 12 Volt Sumber Energi di Way Haru

Belum ada jaringan listrik PLN di Pekon Way Haru. Sumber energi listrik didapat dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), bantuan dari pemerintah melalui kementrian ESDM pada 2016. PLTS ini hanya mampu berfungsi selama beberapa jam saja setiap harinya, sekitar pukul 17.00 sampai 23.00 dan pukul 04.00 sampai pukul 06.00. Setiap rumah dibatasi penggunaan listrik 300 watt. Belum ada bantuan kompor gas dari pemerintahan. Harga gas pun mahal, sekitar Rp50 ribu per 3 kilo. Maka, untuk memasak, keluarga ini menggunakan kayu bakar dari hutan di sekitaran Pekon Way Haru.

Keluarga ini tidak memiliki sumber air bersih sendiri. Untuk keperluan memasak dan MCK, masih menumpang di sumur galian milik tetangga. Tidak ada toilet atau kakus di rumah itu, sehingga untuk keperluan buang air masih menggunakan jamban galian tanah atau di parit belakang rumah.



Tempat Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga

Belum terdapatnya tempat khusus untuk pembuangan air limbah rumah tangga, sehingga limbah masih dibuang secara sembarangan di belakang rumah.

Fasilitas umum dan fasilitas sosial penunjang kehidupan warga di sana juga masih sangat terbatas. Di Pekon Way Haru sudah ada PAUD, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang jaraknya sekitar 1 kilo meter dari rumah Mat Muzni. Sedangkan SMP, terdapat di pekon sebelah, sekitar 2 kilo meter. Untuk akses kesehatan, baru ada Posyandu, sekitar 1 kilo meter dari rumah Muzni. Namun, di Posyandu tersebut belum ada tenaga dan alat medis yang cukup, baru ada satu bidan desa. Sedangkan Puskesmas terdekat, sekitar 30 kilo meter dari kediaman keluarga Muzni.

Pelayanan kependudukan di Pekon Way Haru dipusatkan di Balai Pekon, yang sekaligus sebagai Kantor Peratin. Jaraknya dari rumah Muzni sekitar 1 kilo meter. Belum ada pasar di Wah Haru untuk menunjang aktivitas perekonomian dan keperluan jual-beli warga. Pasar terdekat jaraknya sekitar 20 kilo meter dari desa. Untuk mencapainya harus ditempuh

dengan jalan kaki sekitar 4 jam, atau menggunakan gerobak sapi, atau ketika jalan memungkinkan untuk dilalui bisa menggunakan motor yang ditempuh selama sekitar 1 jam, dengan kondisi jalan yang buruk.

Keluarga ini mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk beras (*raskin*), selain menerima Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat (BPJS kesehatan). Program bantuan pemerintah tersebut dirasakan sedikit meringankan beban kehidupan Muzni dan keluarga. Setidaknya untuk menyokong kebutuhan makanan pokok dan sekolah anaknya.

Transmigrasi

Wagimin (37) ikut keluarganya transmigrasi dari Purworejo (Jawa Tengah) ke Lampung. Kini ia dan keluarganya tinggal di Way Rantang, Desa Suka Mulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Istrinya, Pujiati (27), juga lahir di Jawa Tengah. Kini mereka telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Andre Saputra (9), dan Fitri Lestari (3).

Wagimin maupun Pujiati hanya lulusan SD. Pekerjaan mereka bertani atau berkebun. Sebagai pekerja sambilan, Wagimin juga menjadi kuli bangunan atau buruh muat barang. Anak pertamanya saat ini masih duduk di kelas 5 SD, sedangkan anak kedua belum sekolah. Keluarga ini sudah menetap di Suka Mulya hampir delapan tahun, dan telah tercatat sebagai warga Pesisir Barat dengan dimilikinya KK dan KTP setempat.

Desa Suka Mulya merupakan salah satu desa dengan karakteristik wilayah pegunungan, yang terdiri atas daerah berbukit dan lembah. Letaknya yang berada di daerah pegunungan membuat daerah ini kaya dengan hasil-hasil perkebunan, seperti kopi, lada, cengkeh, coklat, karet, duku, dan durian. Meskipun kaya akan hasil alam, tidak otomatis menjadikan warga desa setempat lepas dari masalah kemiskinan.

Keluarga ini meninggalkan sebuah rumah sangat sederhana, yang dipinjami oleh seorang pemilik kebun, sekaligus untuk merawat kebun tersebut atau dikenal sebagai penggarap kebun. Rumah tersebut dipinjamkan selama Wagimin menggarap kebun tersebut. Rumah yang ditinggali Wagimin beserta istri dan anaknya itu berdinding papan yang mulai rapuh, salah satu sudutnya telah ditambal dengan terpal. Bagian atap

ditutup seng yang sudah berkarat. Rumah ini hanya memiliki satu kamar dengan dapur menyatu dekat ruang tamu. Tempat MCK terbuat seadanya, dengan bak air terbuat dari lembaran plastik yang direntangkan. Kamar mandinya tidak tertutup sepenuhnya. Jambannya masih menggunakan wc cemplung di tengah kebun.

Saat malam hari, penerangan rumah menggunakan listrik dari swadaya masyarakat yaitu dipasok dari turbin atau generator. Tidak ada media elektronik sebagai sumber informasi baik televisi, radio, apalagi *smartphone*. Jika ingin menonton TV, mereka harus ke rumah tetangga.

Sebagai pekebun, penghasilan Wagimin tidak banyak. Berkisar antara Rp2,5 juta sampai Rp4 juta: setahun. Tergantung hasil kebun yang memang tidak ajeg. Penghasilan tersebut diperoleh dari hasil kebun yang dibagi dua dengan pemilik kebun, dipotong biaya pupuk, obat rumput, dan lainnya. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wagimin harus bekerja serabutan menjadi kuli bangunan dengan bayaran Rp40-70 ribu sehari, tergantung kesepakatan dengan pemilik kerja dan terkadang juga sebagai buruh panggul dengan upah Rp70-100 ribu.

Banyak kebutuhan yang tak bisa tercukupi. Terkadang sang istri harus meminjam ke warung untuk memenuhi kebutuhan wajib sehari-hari. Keluarga ini pola makannya dua atau tiga kali sehari, tergantung ketersediaan makanan. Jika persediaan pangan habis, sementara uang tak ada, pilihannya adalah berutang ke warung yang sudah dikenal. Dalam satu tahun, utang diwarung bisa mencapai jutaan dan akan dicicil ketika kebun sudah panen.

Tingkat pendidikan yang rendah, hanya sampai Sekolah Dasar, mempengaruhi produktivitasnya keluarga ini. Penghasilan diperoleh hanya dengan mengandalkan tenaga fisik tanpa keterampilan yang memadai. Produktivitas yang terbatas tersebut, menyebabkan rendahnya pendapatan dan ketidakberdayaan untuk mengembangkan diri dan keluarganya.

Keluarga ini tidak memiliki aset ekonomi, seperti kebun, lahan pekarangan, maupun rumah. Aset nyata (*tangible assets*) tersebut merupakan faktor produksi penting untuk menghasilkan pendapatan keluarga, sehingga semakin kecil aset yang dimiliki, semakin kecil pula peluang menghasilkan.

Sementara, aset tidak berwujud (*intangible assets*) seperti pendidikan dan keterampilan pun mereka sangat terbatas. Partisipasi keluarga mengikuti kegiatan sosial seperti kelompok tani, kelompok pengajian, atau pun kegiatan sosial lainnya di desa relatif rendah.

Kegiatan gotong royong atau kelompok pengajian dusun jarang diikuti. Hal tersebut menjadi faktor kurang tersampainya dengan baik program pengentasan kemiskinan dari pemerintah kepada keluarga miskin ini. Sosialisasi hanya dilakukan dengan tetangga sekitar yang cenderung kurang produktif, misalnya untuk menonton tv atau mengobrol.

Daerah dengan topografi berbukit-bukit dengan kondisi jalan yang buruk membuat akses ke fasilitas umum menjadi relatif susah. Misalnya saja akses ke pasar terdekat, kantor kecamatan, atau Puskesmas yang butuh waktu sekitar setengah jam perjalanan. Akses jalan yang masih sulit tersebut menjadikan hasil perkebunan di sana dijual dengan harga lebih murah dibandingkan di kampung atau pasar terdekat, sehingga pendapatan hasil kebun tidak terlalu banyak, belum lagi hasilnya harus dibagi dengan pemilik kebun.

Hidup berpindah-pindah juga dilakoni keluarga Jahri (80 tahun), yang kini tinggal di Desa Tanjung Mas Makmur, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Ia memiliki tiga orang anak, hasil perkawinannya dengan Siti Aminah (54 tahun). Kehidupan keluarga petani kebun ini memang sangat sederhana. Jahri dan Aminah hanya mengenyam pendidikan dasar (SD). Produktivitas lahan yang dikelolanya tidak mampu dikembangkan secara optimal. Ketidakberdayaan keluarga ini berpengaruh terhadap anak-anaknya.

Pendidikan mempengaruhi pola pikir. Dilihat dari pendidikan formal keluarga ini sangat rendah. Anak pertama, Sholihin (26 tahun) pendidikannya juga hanya sampai SD. Anak kedua, Marfua (21 tahun) sedikit lebih baik bisa mengenyam pendidikan hingga SMP. Anak ketiga Siti (15 tahun) adalah satu-satunya yang masih diharapkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Apalagi ada program sekolah gratis yang menambah harapan bagi keluarga ini. Penghasilan Jahri sebagai buruh tani

sangat kecil. Apalagi sekarang usianya semakin renta. Tenaga semakin lemah. Penghasilannya semakin tak bisa diandalkan.

Lahan perkebunan milik Jahri yang produktif sekarang tinggal seperempat hektar, yang ditanami karet. Setiap bulan, dari lahan itu hanya menghasilkan sekitar Rp150 ribu. Hasil itulah yang dipakai untuk keperluan membeli kebutuhan pokok dan mendukung biaya pendidikan anaknya.

Jahri lahir di Magelang pada 1938. Sedangkan sang istri, Siti Aminah, lahir di Banyuwangi 1964. Jahri meninggalkan tanah Jawa mengikuti keluarganya ke Lampung. Ia dan keluarga sempat tinggal berpindah-pindah. Sebelum sampai di Mesuji, keluarga Jahri tinggal di Rawajitu. Karena di sana sering banjir, sekitar 2001 keluarga ini memutuskan pindah ke Mesuji. Pada usia 63 itu, Jahri memulai kehidupan baru bersama keluarganya di Desa Tanjung Mas Makmur. Dengan modal yang ada, ia membeli dua hektar tanah. Satu hektar ditanami padi, satu hektar lagi belum tergarap.

Tahun pertama cocok tanam padi keluarga Jahri cukup berhasil. Panen cukup memuaskan. Namun, memasuki tahun kedua di Mesuji, keluarga ini mendapatkan ujian. Anak pertamanya, Khoiru Sholihin, sakit dan lumpuh. Meski sudah dibawa berobat kesana-kemari, penyakitnya tidak juga kunjung membaik. Pengobatan anaknya menghabiskan sebagian besar hasil panen setahun. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama tujuh tahun lebih. “Jadi selama tujuh tahun ini sebagian besar penghasilan kami habis untuk mencari pengobatan Khoiru,” tutur Jahri.

Bahkan, Jahri mengaku pernah tertipu oleh seseorang yang mengaku bisa mengobati penyakit Khoiru. Orang itu minta uang muka Rp5 juta, yang katanya untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan. Namun, setelah uang itu diserahkan, orang itu kabur tanpa kabar berita. Saat ini, penyakit Khoiru mulai membaik, meski kondisi fisiknya belum pulih. Ia sudah bisa beraktivitas dan ikut mengurus pondok pesantren tak jauh dari rumah tinggalnya. Saat ini, Jahri yang sudah 80 tahun, tak kuat lagi bekerja mencari nafkah bagi keluarga. Sang istri yang masih sanggup menyadap karet di sisa lahan mereka, mengambil alih peran mencari nafkah keluarga. Sebagian lahan disewakan. Terkait status kepemilikan lahan, atau sertifikat tanahnya, mereka tidak punya. Hanya kwitansi jual beli.

Kecamatan Mesuji Timur merupakan salah satu kecamatan yang berbatasan dengan Sumatra Selatan. Termasuk daerah terpencil. Jauh dari pusat kota dengan akses jalan yang buruk. Harga barang dan bahan makanan di sana relatif mahal, khususnya di Desa Tanjung Mas Makmur. Kondisi tersebut semakin memberatkan beban hidup warga setempat.

Keluarga ini tidak terlalu menjadikan pendidikan sebagai prioritas penting, sehingga berakibat terhadap pendidikan anak-anaknya. Anak-anaknya tak cukup mendapatkan dukungan atau motivasi dari kedua orang tua dalam hal pendidikan. Akibatnya, anak pertama hanya lulus SD, anak kedua lulus SMP, dan anak ketiga baru lulus SMP, yang berharap bisa melanjutkan hingga lulus SMA.

Kurangnya pendidikan memengaruhi wawasan, baik dalam hal ide kreatif dan kemampuan berinovasi. Meski keluarga ini memiliki lahan dua hektar, tetapi tidak mampu mengelolanya secara produktif. Lahan itu hanya disewakan dengan murah, atau digadaikan. Hasilnya habis untuk kebutuhan konsumsi. Meski pemerintah memberi bantuan berupa beras (Rastra), sekolah gratis, pelayanan pengobatan gratis, itu semua tidak mampu membuat keluarga ini bertambah sejahtera, kecuali sedikit mengurangi beban hidup mereka. Dan, sampai sekarang, keluarga itu masih sama seperti sebelum-sebelumnya: serba kekurangan.

Keterbatasan Aset

Sidi, lahir di Jawa Tengah pada 1959. Tidak menyelesaikan pendidikan formal, SD sekali pun. Pekerjaannya saat ini buruh atau kuli bangunan. Sang istri, Maptuha, lahir di Kotabumi pada April 1972, hanya tamatan SD. Maptuha ikut mencari nafkah keluarga dengan menjadi asisten rumah tangga. Mereka adalah warga Kelurahan Sribasuki, Kotabumi, Lampung Utara.

Sidi dan Maptuha telah dikaruniai empat orang anak. Jefri, anak tertuanya, juga tidak menyelesaikan pendidikan SD, dan sekarang bekerja sebagai kuli bangunan. Anak kedua, Parliana, menamatkan pendidikan SD, tetapi tidak melanjutkan ke SMP, dan sekarang tidak bekerja. Anak ketiganya, Mardiana sudah lulus SMA, sekarang bekerja membantu jualan es

grobak di kelurahan tersebut. Sedangkan anak keempat, Liana saat ini masih duduk di bangku SMP.

Kehidupan keluarga ini seperti roda yang sulit berputar. Tak ada perbaikan kesejahteraan dalam 25 tahun, semenjak mereka menikah sampai punya empat anak yang kini sudah remaja dan dewasa. Pendidikan orang tua yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, menyebabkan mereka tidak memiliki pekerjaan yang pasti sebagai sumber pendapatan dan nafkah keluarga. Pendapatan yang rendah itu menjadi alasan kenapa orang tua tidak menyekolahkan anaknya. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan pola pikir orang tua kurang kuat dalam memotivasi maupun mendidik anak-anaknya. Pola pikir anak pun terbentuk seperti apa orang tuanya mencontohkan dan mengarahkan, sehingga keluarga ini seperti kehilangan mimpi akan kehidupan yang lebih sejahtera. Anak ketiga yang lulus SMA pun seperti kurang termotivasi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Keluarga miskin condong akan melahirkan keluarga miskin baru. Kemiskinan yang diwariskan.

Rumah keluarga ini berdiri di atas tanah milik orang lain. Pada awalnya tanah itu memang milik keluarga Sidi. Namun, karena keperluan mendesak, tanah tersebut digadaikan kepada tetangga dengan nilai Rp4 juta. Waktu sudah lama berlalu, dan Sidi tidak juga mampu menebus tanah tersebut sampai jatuh tempo gadai habis. Akhirnya status kepemilikan tanah pun berpindah kepada orang lain.

Belum lama ini, sebenarnya Sidi memiliki uang dan bermaksud menebus kembali tanahnya tersebut. Namun, pemilik baru itu tidak mau menjualnya dengan harga awal gadaian sebesar Rp4 juta. Menurutnya, jika hendak menebus kembali tanah tersebut, maka Sidi harus membayar Rp20 juta; lima kali lipat dari nilai gadai. Kini, Sidi dan keluarga pun sudah diberi tenggat waktu untuk segera memindahkan rumahnya dari tanah tersebut. Ia pun tak bisa berbuat banyak.

Saat observasi dilakukan, Sidi sedang mengumpulkan sisa-sisa kayu dari bekerja di rumah orang lain, untuk persiapan mendirikan rumah barunya. Tetangga Sidi yang lain merasa kasihan, sehingga mengizinkan Sidi mendirikan rumah di tanah miliknya, yang berada di belakang rumah Sidi

saat ini. Pendapatan yang rendah, dan tidak dimilikinya tanah untuk tempat tinggal membuat beban hidup keluarga ini terasa berat. Beberapa kali aparat desa setempat telah mendata dan memfoto kediamannya, yang akan diajukan untuk mendapat program bedah rumah. Namun, tidak berhasil, karena tanah itu bukan lagi milik Sidi.

Kelemahan Fisik

Keluarga Muksin (51 tahun) tinggal di Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Ia memiliki istri, Yulaekah (50 tahun), dan tiga orang anak. Muksin bekerja sebagai buruh tani, sedangkan istrinya berjualan keripik tempe dan singkong.

Pendidikan terakhir Muksin hanya sampai SMP. Saat ini, ia diserang penyakit lumpuh, sehingga tidak bisa bekerja dan beraktivitas normal. Istrinya yang tidak tamat SD itu pun harus menggantikan peran kepala keluarga untuk mencari nafkah. Ia acap kebingungan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Beras sesekali mendapat bantuan dari sanak kerabat. Untuk makanan pokok seperti sayuran, lauk-pauk, bumbu dapur, sehari mereka butuh uang sekitar Rp20 ribu. Pendapatan keluarga hanya dari menjajakkan kripik ke pasar.

Di keluarga ini pola makan tidak teratur. Menurut Yulaekah, mereka kadang makan dua kali sehari, kadang sekali. Bahkan kadang terpaksa tidak ada makanan di rumah itu, karena beras habis dan uang sudah terpakai untuk keperluan lainnya. Keluarga ini mendapat bantuan beras dari desa sejak awal tahun 2018 lalu.

Muksin sebenarnya sudah berhenti merokok. Namun, setelah dia terkena penyakit dan lumpuh, kebiasaan merokok kambuh lagi. Untuk mengusir kejenuhan, katanya. Muksin merokok dengan rokok tembakau atau rokok lintingan sendiri. Pengeluaran rokok ini sekitar Rp15 ribu untuk kurang lebih sebulan, sampai habis tembakau. Pengeluaran listrik per bulan sekitar Rp60 ribu, yang kadang telat pembayaran dan akhirnya kena denda. Karena anak terakhir sudah lulus SMA, maka tidak ada pengeluaran pendidikan.

Kelemahan fisik yang menghambat produktifitas juga dirasakan Mad Jeni (66). Ia dan keluarganya tinggal di Dusun Lancar Jaya, Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Mad Jeni mengenyam pendidikan formal hanya sampai kelas 3 SD. Sang istri, Hasimah (61 tahun), tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Mereka memiliki enam orang anak. Dua diantaranya meninggal sewaktu masih anak-anak. Tiga anak yang lain sudah berkeluarga dan tidak tinggal dengan orang tuanya. Mat Jeni kini tinggal dengan istri dan seorang anak, Maryanto (32), yang putus sekolah saat kelas 2 SD.

Kehidupan keluarga ini tidak cukup harmonis. Mad Jeni lebih sering tinggal di kebun daripada di rumah. Ia hanya pulang jika ada urusan penting. Mad Jeni merasa hanya menjadi beban keluarga, karena kondisi kakinya yang sakit. Sebagai kepala keluarga, Mad Jeni merasa sudah tidak bisa berperan maksimal sebagai kepala rumah tangga, lantaran tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia juga merasa keluarganya enggan untuk merawatnya. Sebaliknya, istri dan anaknya merasa Mad Jeni sudah tidak mau menafkahi keluarga.

Mad Jeni memang menderita sakit pada kakinya, yang membuat ia kesulitan berjalan sehingga harus bertumpu pada sebuah tongkat. Usia yang sudah tua dan kondisi badan yang telah renta membuat Mad Jeni tidak lagi mampu bekerja maksimal. Ia hanya berpenghasilan kurang dari Rp50 ribu per minggu. Istrinya, Hasimah, juga sudah tidak bekerja karena kondisi badan yang renta dan sakit-sakitan, sehingga lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Sedangkan sang anak, Mariyanto, hanya bekerja sebagai buruh serabutan yang tidak tentu penghasilannya. Mariyanto enggan mengolah lahan atau bertani, ia memilih menjadi buruh.

Kehidupan keluarga ini jauh dari religius. Tidak ada aktivitas ibadah keagamaan. Begitu juga dengan kesadaran hidup sehat. Hal ini dibuktikan dengan keadaan tempat tinggal yang kumuh serta tidak memiliki MCK. Kebutuhan MCK biasanya dipenuhi di sungai ataupun kebun-kebun terdekat. Anggota keluarga (Bapak dan Anak) tetap merokok walaupun berpenghasilan tidak menentu. Kondisi kemasyarakatan di daerah tempat tinggal mereka juga kurang religius. Tidak ada kegiatan keagamaan yang

dilakukan warga sekitar. Rumah ibadah juga sepi. Tidak ada kegiatan pengajian rutin ataupun semacamnya.

Akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya juga cukup jauh. Kampung Simpang Tiga, berada jauh dari pusat kota. Bahkan lokasi kampung ini pun berada di area hutan produksi terbatas. Selain jaraknya yang jauh, kondisi medan dan akses keluar-masuk kampung tersebut pun cukup sulit, harus melalui perbukitan, sungai, dan lembah. Akses keluar masuk yang sulit tersebut menyebabkan aktivitas perekonomian di daerah itu tidak tumbuh, bahkan stagnan. Untuk mengangkut dan menjual hasil bumi dari daerah itu cukup sulit. Satu-satunya sumber penghasilannya Mad Jeni adalah dari menjual getah karet.

Kerentanan (*Vulnerable*)

Sutikno (36) dan Winarsih (33) tinggal di Dusun Indraloka Mukti, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mereka dikaruniai dua orang anak. Awalnya keluarga ini memiliki pekarangan sendiri. Namun pekarangan tersebut dijual, karena mereka pindah ke Palembang. Namun, ternyata tanah yang dibeli dan ditinggali mereka saat di Palembang itu adalah tanah sengketa, sehingga setelah satu tahun tinggal di Palembang, keluarga ini akhirnya pulang kembali ke Dusun Indraloka Mukti.

Dengan sisa uang yang ada, Sutikno pun membangun rumah seadanya di tanah milik kerabat, alias menumpang. Motor satu-satunya yang dimiliki Sutikno juga telah dijual untuk mengobati anak keduanya yang mengidap epilepsi dan terjangkit polio.

Sutikno dan Winarsih hanya berpendidikan SD. Bahkan Sutikno tak sempat lulus SD. Tidak punya keterampilan khusus, aset tanah sudah terjual, ditambah anak keduanya yang sakit-sakitan, membuat kehidupan keluarga ini terasa berat. Keharmonisan keluarga juga acap terganggu lantaran permasalahan ekonomi. Terkadang dipicu Sutikno sebagai kepala rumah tangga yang masih gemar minum-minuman keras bersama teman-temannya, sehingga sering terjadi cekcok dengan sang istri. Pendidikan yang rendah, ditambah fondasi serta pengamalan ajaran agama yang sangat kurang,

membuat pola hidup keluarga ini tidak tertata sejak awal ketika membina rumah tangga.

Lokasi tempat tinggal mereka juga jauh dari fasilitas umum, baik pasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan kependudukan. Meski segala upaya dilakukan Sutikno untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mencari biaya berobat putri keduanya, penghasilan yang sangat minim tak menentu, membuat Sutikno pasrah. Harapan satu-satunya adalah anak pertama, untuk bisa menyelesaikan sekolah dan nantinya bisa membangun kehidupan yang lebih baik.

Ketidakterdayaan (*Powerless*)

Kepala keluarga berikut ini bernama Solehan (53), dan istri bernama Suparmi (41). Anak semata wayangnya, Ikbal Firmansah (10) kini duduk di kelas 3 SD setempat. Keluarga ini tinggal di desa Bina Karya Utama, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

Solehan hanya lulusan SD, sedangkan sang istri tidak pernah sekolah. Sebagai kepala keluarga, sumber pendapatannya adalah dari buruh dengan upah Rp25-50 ribu per hari. Di lokasi tempat tinggalnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penunjang kehidupan keluarga sebenarnya cukup tersedia, seperti sekolah, Puskesmas, kantor desa dan kecamatan, pasar, juga kantor polisi. Keluarga ini juga sudah merasakan program bantuan pemerintah, antara lain, pendidikan gratis, Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS kesehatan, raskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Suparmi memang lahir dan besar di desa tersebut. Terlahir dari keluarga tidak mampu dengan delapan saudara kandung. Ayahnya meninggal sejak Suparmi masih kecil. Sebelum menikahi Solehan, Suparmi sudah pernah menikah pada tahun 2004 dan mempunyai anak bernama Ikbal. Namun, suami pertamanya itu pergi meninggalkan mereka sejak Ikbal berumur tiga tahun. Kemudian Suparmi menikah lagi dengan Solehan pada 2014. Solehan merupakan warga Tanjung Iman, Lampung Tengah. Ia dari keluarga pas-pasan dengan delapan bersaudara. Setelah menikah, Solehan tinggal dan menetap di Bina Karya Utama, ikut keluarga Suparmi karena keluarganya juga tidak mampu.

Pekerjaan Solehan sebagai buruh harian lepas mencabut singkong dengan upah Rp50 ribu per hari. Terkadang ada yang menyuruh membuat batu bata dengan upah Rp25 ribu sehari. Namun, tidak setiap hari ada pekerjaan tersebut. Keluarga ini tak memiliki lahan sendiri yang bisa digarap. Solehan memelihara kambing milik orang lain dengan bagi hasil atau dikenal dengan sistem gadu. Kambing-kambing milik orang lain itu diurusnya, dan akan dilakukan pembagian pada saat kambing beranak. Maka, jika sedang tidak ada pekerjaan, Solehan hanya mengurus kambing-kambing tersebut mencari rumput untuk makanannya.

Rumah keluarga ini dibangun di atas tanah milik orang tua Suparmi. Rumah tersebut terdiri dari tiga ruangan, yaitu ruang tamu sekaligus ruang makan, kamar, dan dapur. Dengan kondisi rumah yang berdinding geribik, lantai semen, dan atap genteng. Tidak ada ruang makan khusus, ruang makan dan ruang tamu menyatu. Pada malam hari, rumah tersebut diterangi oleh listrik yang menumpang dari tetangga. Hanya terdapat satu titik lampu di rumah itu yang berfungsi menerangi seluruh bagian ruangan.



Rumah Keluarga Solehan



Ikbal, Anak Solehan

Solehan memiliki penyakit keterbatasan dalam pendengaran. Demikian pula anaknya, Ikbal, menderita sakit bawaan sejak lahir. Menurut sang ibu, anaknya dulu pernah dibawa ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa ada masalah pada jantungnya. Kondisi Ikbal saat ini tidak seperti anak pada umumnya. Ukuran kepalanya tidak proporsional (lebih besar) dibanding badannya dengan tangan dan kaki yang kecil. Pada bagian punggung juga tampak ada tonjolan daging.

Sebagaimana umumnya keluarga, ada saja kebutuhan pengeluaran setiap hari. Sementara pengasilan mereka tak menentu. Suparmi mengatakan, untuk membeli minyak dan bumbu dapur biasanya perlu Rp50 ribu untuk satu minggu. Belum termasuk membeli beras, karena tidak punya ladang atau sawah sendiri. Konsumsi beras rata-rata 1 kilo sehari. Keluarga ini merasa terbantu dengan bantuan beras (raskin) setiap bulannya sebanyak 10 kilo gram dari pemerintah. Sedangkan sayuran, Suparmi mengaku memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk menanam sayuran, seperti singkong, pepaya, nangka muda, dan sayuran lainnya.

Alat transportasi sehari-hari keluarga adalah sepeda. Biasanya dipakai bekerja sang suami, mencari rumput, mengantar jemput anak ke sekolah, mengantar ngaji, atau keperluan lain. Menurut Suparmi, biaya untuk listrik setiap bulannya Rp25 ribu. Sekolah anaknya gratis, cukup dengan uang saku

sehari Rp3 ribu, dan di rumah biasanya Ikbal masih minta jajan. Uang jajan Ikbal setiap harinya berkisar Rp5 ribu. Keluarga ini menikmati fasilitas Kartu Indonesia Sehat, untuk berobat gratis. Pengeluaran untuk pulsa sebulan Rp10 ribu, agar kartu tidak terblokir karena handphone memang jarang digunakan.

Sebagai kepala keluarga, Solehan cukup bertanggung jawab. Pekerjaan apa saja siap dia lakoni. Saat musim panen, biasanya sang istri bekerja sebagai buruh memanen jagung, padi, atau lainnya di kebun orang yang membutuhkan tenaganya. Sang anak saat ini duduk di kelas 3 SD. Orang tua berharap anaknya bisa sekolah yang tinggi. Selain itu, orang tua juga berharap semoga pemerintah bisa membantu untuk pengobatan sang anak, agar sang anak bisa hidup normal layaknya anak seusianya.

Banyaknya kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan desa juga membuat kebutuhan pengeluaran semakin besar. Contohnya, jika musim hajatan, pengeluaran yang tak terduga meningkat. Terkadang biaya yang dikeluarkan untuk menyumbang hajatan lebih besar dari pada biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan sosial lain juga butuh mengeluarkan uang. Misalnya saat ada kelahiran bayi, peringatan keagamaan, menyambut bulan Suro, menyambut bulan Ramadhan, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya, yang mau tidak mau sebagai warga harus berpartisipasi. Kebutuhan tak terduga ini menyebabkan beban hidup menjadi lebih tinggi. Terkadang keluarga ini juga mengutang pada tetangga yang kemudian dibayar dengan tenaga atau kerja.

Potensi Alam

Kekayaan dan keindahan alam tidak otomatis menjadikan warganya kaya dan kehidupannya indah. Lampung yang dianugerahi keindahan alam berupa pantai, laut, pegunungan, dan potensi alam lainnya belum menjadi berkah yang dirasakan seluruh warganya. Keindahan alam tersebut masih menyimpan derita kemiskinan sebagian warganya yang tidak berdaya. Legundi merupakan salah satu pulau di wilayah kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran, yang menyimpan keindahan alam sekaligus himpitan kemiskinan sebagian warganya.



Kurung Kambing: Salah Satu Wisata Pulau Legundi

Pulau ini mungkin belum setenar Pulau Pahawang atau Pulau Kiluan. Namun pesona alam di Legundi sesungguhnya tidak kalah indah. Masih alami, belum banyak masyarakat tahu. Pantai bersih, alam bawah lautnya indah tak kalah dengan Pahawang dan Kiluan yang sudah lebih dulu terkenal. Di Pulau Legundi ini, Anda bisa melihat ikan Nemo yang lucu berenang di dalam laut. Terumbu karangnya sangat indah. Tak hanya alamnya yang memesona, masyarakat Pulau Legundi juga dikenal sangat ramah. Mayoritas bekerja sebagai nelayan, petani, dan berkebun.

Luas Desa Pulau Legundi berkisar 2.500 Ha. Terdiri tanah kering berupa tegalan, ladang, dan pemukiman; tanah basah berupa rawa dan pasang surut; serta perkebunan. Butuh waktu, memang, untuk sampai di Pulau Legundi dari ibu kota provinsi. Jarak antara desa di Pulau Legundi ke ibu kota kecamatan terdekat sekitar 11 km, dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten sekitar 70 km, dengan waktu tempuh sekitar 6 jam.

Dari Bandar Lampung ke Pulau Legundi, kita bisa melalui Dermaga Ketapang, yang dari Kota Bandar Lampung bisa ditempuh sekitar 1 jam perjalanan. Dari dermaga tersebut menuju ke Pulau Legundi bisa menggunakan jasa *speed boat* (setiap hari). Atau setiap Senin dan Kamis ada kapal khusus penumpang yang biasa dipakai warga Pulau Legundi bila hendak ke Bandar Lampung. Jika menggunakan kapal *speed* lama perjalanan sekitar 1 jam dengan biaya sekitar Rp500 ribu. Kalau kapal penumpang, waktu tempuhnya menjadi sekitar 3 jam dengan ongkos Rp30 ribu per orang sekali jalan.

Jauhnya jarak tempuh dari Desa Pulau Legundi ke daratan menjadi permasalahan warga setempat. Pasalnya, di desa tersebut pasar dan transportasi tidak setiap hari ada. Tidak semua keperluan dan kebutuhan hidup warga tersedia setiap saat di sana. Warga Pulau Legundi secara ekonomi rata-rata menengah ke bawah. Mayoritas masih miskin.

Seperti keluarga Wardimin (59) dan Bainah (51). Keduanya hanya sempat mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar. Itu pun tidak sampai tamat. Punya seorang anak, Iis Purwanti (18), yang sekarang duduk dibangku kelas XI IPS SMA di Pulau Legundi. Mereka tinggal di Dusun Selesung, Desa Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran. Wardimin bekerja sebagai buruh. Sedangkan Bainah membantu menambah penghasilan keluarga dengan mengumpulkan tangkil di kebun, mencari umang-umang, dan kayu bakar untuk dijual. Juga jasa urut.

Aktivitas perekonomian di desa tersebut sangat terbatas. Tak ada pasar, hanya warung-warung tradisional rumah tangga. Mayoritas penduduk Pulau Legundi bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun, karena tak punya perahu sendiri, Wardimin tidak bisa bekerja sebagai nelayan. Faktor usia juga tidak lagi memungkinkan baginya untuk ikut bekerja di keramba. Selama ini, Wardimin sudah berusaha keras, tetapi penghasilannya tak juga cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Wardimin sebenarnya menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Pekerjaan apa pun dilakukannya, yang penting halal dan bisa memperoleh penghasilan. Di sana, harga bahan kebutuhan sehari-hari dua kali lipat lebih mahal dibanding harga barang yang sama di kota. Bisa dimengerti, karena

untuk mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari, warga setempat harus menyeberang ke pasar di Teluk Betung dengan ongkos yang lumayan mahal. Pulang pergi ke pasar daratan para pedagang warung membutuhkan hampir sekitar Rp100 ribu hanya untuk ongkos perjalanan.

Mahalnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari tersebut membuat kehidupan keluarga miskin disana semakin terjepit. Tak jarang mereka terpaksa berutang. Jika dilihat faktor keluarga, kemiskinan yang mereka alami sekarang merupakan warisan dari keluarga sebelumnya. Wardimin terlahir dari keluarga miskin. Begitu juga istrinya. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan memengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak, seperti kurang memotivasi anak untuk sekolah. Waktu dan tenaga mereka habis untuk mencari kebutuhan sehari-hari. Bahkan Bainah mengaku pernah meminta anak semata wayangnya itu berhenti sekolah, lantaran tak sanggup membayar SPP. Untung saja, sekarang sekolah gratis.

Perekonomian keluarganya yang hanya menanggung satu orang anak ini pun sudah cukup sulit. Pengaturan keuangan mereka juga belum baik. Orang tua acap kebingungan ketika anaknya meminta dibelikan kebutuhan sekolah seperti tas, sepatu, dan baju seragam. Memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih harus berutang.

Faktor lingkungan, keluarga Wardimin tinggal di daerah terpencil dan terisolir. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena tinggal di daerah terpencil seperti mereka. Mereka sulit mengakses informasi. Fasilitas publik belum memadai untuk menunjang aktivitas sosial maupun perekonomian masyarakat.

Pernikahan Dini

Tri Wahyuni lahir pada September 2000. Pendidikannya hanya sampai SMP. Selain motivasi belajarnya kurang, orang tuanya juga kurang memberikan dukungan kepada Tri untuk melanjutkan sekolah. Tak banyak pilihan: ia pun berhenti sekolah. Pada usia yang baru 16, ia memutuskan menikah dengan pemuda warga setempat, yang usianya tak terpaut jauh dengannya. Pernikahan dini itu pun tak bertahan lama. Tak lama setelah Tri melahirkan bayi pertamanya, suaminya pergi. Pasangan muda ini pun

akhirnya memutuskan untuk bercerai pada 2017 lalu. Kini, bayi itu sudah memasuki usia 2 tahun.

Kehidupan yang serba kekurangan rentan merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Tri Wahyuni adalah satu dari sekian banyak potret kemiskinan yang diwariskan. Ia adalah anak pertama pasangan Ahim (49) dan Dwi Susanti (44). Mereka tinggal di Dusun Jatiringin, Klumbayan, Kabupaten Tanggamus. Tri memiliki tiga orang adik yang masih belia. Satu adiknya sekolah hanya sampai SD; putus dan tidak melanjutkan SMP. Satu masih TK, dan yang paling kecil masih balita. Ahim dan istrinya pun hanya lulus SD. Sosialisasi tentang program Keluarga Berencana tak sampai pada mereka.

Seberat apa pun, kehidupan harus terus dijalani. Tri Wahyuni yang hanya berpendidikan SMP, memilih tetap tinggal dengan orang tuanya. Bersama bayinya yang sehari-hari diasuh sang nenek. Sementara, Tri mencari tambahan penghasilan menunggu gerai hand phone milik warga setempat, tak jauh dari rumah orang tuanya.

Pekerjaan Ahim sebagai kepala rumah tangga pun tidak tetap. Kadang menjadi kuli panggul, buruh tani, bahkan sebelumnya pernah berdagang bakso keliling. Sang istri, sebagai ibu rumah tangga, lebih banyak mengurus rumah, anak-anak, memasak, atau kadang membantu pekerjaan sang suami jika bisa. Keseharian Ahim tidak menentu. Kadang ia harus mencari kerja ke daerah lain, atau terpaksa menganggur karena sedang tak ada pekerjaan yang bisa didapatkannya. Dengan pekerjaan yang tidak menentu itu, penghasilannya pun tidak menentu pula. Sering keluarga ini terpaksa berutang kepada kerabat atau tetangga, sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang tak bisa ditunda.

Ahim dan keluarga tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah yang dibelinya secara mencicil; belum lunas sampai sekarang. Rumahnya pun masih sangat sederhana. Berdinding papan sebagian, sebagian lain triplek yang sudah mulai lapuk dan belubang. Lantai dari semen, banyak bagian retak, sebagian lagi masih berlantai tanah seperti di ruangan dapur dan kamar mandi. Jauh dari bersih, becek saat musim hujan, dan berdebu pada musim panas. Atap rumahnya genteng, yang sebagian tampak bocor.

Rumah yang berukuran sekitar 9x6 meter ini hanya memiliki dua ruang kamar. Satu untuk Ahim dan Dwi serta anaknya yang paling kecil, satu kamar lagi untuk anak-anaknya yang lain. Kadang mereka tidur di ruang depan. Kondisi ruangnya kurang tertata. Pada malam hari, penerangan menggunakan listrik PLN yang masih disubsidi. Belum lama sambungan listrik PLN itu masuk ke rumah keluarga Ahim. Sebelumnya, ia menyambung listrik tetangga. Beberapa kali harus diputus, karena tak bisa membayar tagihan bulanan. Titik lampu dibuat seminimal mungkin, untuk menekan rekening tagihan. Hanya ada tiga titik lampu di rumah tersebut.

Kebersihan lingkungan rumah keluarga Ahim ini kurang baik, bahkan boleh dibilang kumuh. Tidak ada pengelolaan sampah yang baik. Jarak antar-rumah relatif dekat. Sampah terlihat berserak di sekitarnya. Posisi rumah yang dekat dengan tebing, membuat rumah keluarga ini rawan terkena longsor pada saat musim hujan.

Ahim kadang bekerja di ladang milik orang lain yang lokasinya jauh dari rumah, dan harus menyelesaikan pekerjaan segera, sehingga ia memilih tidak pulang dan menginap di rumah (gubuk) yang ada di ladang tersebut. Sang istri dan anaknya yang ditinggal di rumah pun harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ditinggal Ahim bekerja.

Keluarga yang anggotanya berpendidikan rendah tentu akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupannya. Pengetahuan dan keterampilannya sulit dikembangkan. Keterbukaan informasi tak cukup bisa dinikmati karena keterbatasan sarana untuk mengaksesnya. Informasi dan peluang menjadi sulit mereka dapatkan. Interaksi sosial juga sering menemui kendala. Keluarga Ahim jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan di lingkungannya. Aktivitas keagamaan di rumah keluarga itu pun tidak hidup. Sholat lima waktu yang menjadi kewajiban seorang muslim, misalnya, jarang ditunaikan. Pengajian-pengajian lingkungan pun tidak mereka ikuti. Dengan 4 anak dan 1 cucu yang tinggal bersama dalam satu rumah, Ahim dan istrinya cukup kerepotan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktor keamanan di dusun tersebut juga masih jadi masalah. Pencurian masih sering terjadi. Sementara kegiatan Siskamling atau ronda

tidak berjalan di sana. Kantor polisi pun cukup jauh. Pertanian yang dilakukan warga setempat sebagian besar adalah budidaya coklat. Hasil bumi di sana juga sering tidak maksimal karena diserang hama, dan sudah beberapa tahun ini panen coklat sedang tidak baik, karena pengaruh cuaca. Buahnya banyak membusuk.

Ahim sebenarnya memiliki keahlian membuat bakso. Dia pernah berdagang bakso keliling. Tetapi tidak bisa berkembang. Untuk memulai usaha lagi, modal tak ada. Tidak ada akses bagi keluarga ini untuk mendapatkan modal usaha. Lembaga keuangan atau perbankan sulit mereka tembus karena keluarga ini tidak memiliki aset untuk dijaminkan.

B. Pembahasan

Akses dan Mutu Pendidikan

Potret kemiskinan secara umum menampilkan kondisi kehidupan yang serba kekurangan, keterbatasan, ketidakberdayaan, dengan dinamika hidup yang kurang dinamis, cenderung stagnan. Namun, jika ditelisik lebih dekat, kemiskinan menyimpan dimensi permasalahan yang kompleks dan saling berkelindan membentuk rangkaian mata rantai yang saling terkait. Dalam banyak kasus, kemiskinan juga diwariskan. Keluarga miskin akan cenderung melahirkan keluarga miskin baru, dan menjadi seperti lingkaran setan kemiskinan (*poorness vicious circle*).

Lingkungan dan tantangan terus berkembang seiring kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun, kemiskinan dan bagaimana profil keluarga miskin bukan sesuatu yang baru. Kemiskinan mudah dikenali dan ditemui. Sejak dulu problem kemiskinan diperbincangkan dan ditelusuri penyebabnya. Berbagai disiplin ilmu dipakai untuk mengkajinya. Sudah banyak pendekatan dan program yang dilakukan untuk mengatasinya. Namun justru disini pula masalahnya. Sampai saat ini, masalah kemiskinan penduduk, khususnya yang tinggal di daerah perdesaan, ternyata semakin pelik. Data Badan Pusat Statistik terakhir (2018) menunjukkan, tren gini rasio yang mengindikasikan kesenjangan pendapatan penduduk di Provinsi Lampung justru semakin meningkat di kawasan perdesaan.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, baik dalam skala daerah maupun nasional, tidak berkorelasi signifikan dengan menurunnya angka kemiskinan. Modernisasi dan globalisasi—dengan kehadiran perangkat teknologi yang semakin canggih—yang berarti semakin meningkatnya iklim persaingan (*competition*), melahirkan dilema dan permasalahan baru dalam upaya mengatasi kemiskinan. Dibutuhkan paradigma dan pendekatan baru terhadap problem kemiskinan sekarang ini, untuk bisa menjawab tantangan dan memberikan jawaban yang lebih efektif dalam mengatasinya.

Berdasarkan observasi lapangan terhadap rumah tangga miskin di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, terkonfirmasi bahwa setidaknya terdapat lima dimensi yang berkelindan dalam suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) kemiskinan, sebagaimana diungkapkan Chambers (1987), yaitu: *Pertama*, keterbatasan kepemilikan aset (*poor*), yaitu kondisi ketidakmampuan, rendahnya pendapatan, dan minimnya aset untuk mencukupi kebutuhan pokok. Ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, tetapi juga pada kelompok yang sudah memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kedua, ketidakberdayaan (*powerless*). Pada umumnya, rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang, terutama dalam memperoleh keadilan atau persamaan hak untuk penghidupan yang layak. *Ketiga*, kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), dimana seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan menghadapi situasi yang tidak terduga, di mana situasi tersebut membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan, bencana, serta situasi-situasi darurat lainnya. Kondisi kemiskinan tidak mampu untuk menghadapi situasi-situasi tersebut.

Keempat, ketergantungan (*dependency*). Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial seseorang atau sekelompok orang yang miskin, menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan menghasilkan solusi atau

menyelesaikan masalah, terutama untuk menghasilkan atau meningkatkan pendapatannya. Mereka butuh bantuan pihak lain untuk mengatasi persoalan terutama berkaitan dengan sumber pendapatan.

Kelima, keterasingan (*isolation*), yaitu faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin, dan sulit mentas dari kemiskinannya. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini tinggal jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan seperti di perkotaan. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau relatif memiliki taraf hidup yang rendah, sehingga kondisi ini cenderung melestarikan kemiskinan.

Secara umum, semua rumah tangga miskin yang diobservasi—yang tersebar dari kabupaten dan kota—mengalami kondisi serba kekurangan dan ketidakberdayaan. Tidak banyak tersedianya pilihan dalam kehidupan mereka. Pendidikan mereka pada umumnya rendah, pekerjaan tidak menentu sehingga penghasilannya pun tidak mencukupi untuk menunjang kebutuhan pokok sehari-hari.

Seperti keluarga Suyadi (45) dan Sri Ngatin (39) yang tinggal di Desa Sidodadi, Way Kanan. Suyadi sekolah hanya sampai kelas 5 SD, dan istrinya Sri Ngatin tamatan SD. Mereka dikaruniai tiga orang anak. Sementara, mereka tak punya pekerjaan tetap. Mereka bekerja hanya saat tenaga mereka dibutuhkan orang lain. Tidak bekerja jika tak ada yang membutuhkan tenaga mereka. Biasanya Suyadi bekerja menyemprot rumput di kebun karet milik tetangganya. Sedangkan istrinya buruh petik kopi di kebun milik orang lain. Dari pekerjaannya tersebut, akumulasi penghasilan suami-istri itu rata-rata Rp80 ribu sehari; jika mereka berdua bekerja pada hari itu.

Di Desa Sidodadi itu mereka tinggal menumpang di rumah milik kerabatnya. Rumahnya sangat sederhana. Diding bagian depan batu bata merah, sedangkan bagian yang lainnya masih berdinding papan dan geribik. Lantai rumah sebagian dari semen dan sebagian masih tanah. Lantai semen mulai dari depan pintu masuk sampai ruang keluarga saja. Bagian kamar dan dapur berlantai tanah.

Keluarga ini biasanya menghabiskan rata-rata satu kilo beras sehari. Sayuran biasanya cukup mengandalkan hasil kebun sekitar, seperti kelapa untuk membuat santan, pepaya, atau sayuran yang ada, ditambah tempe atau tahu. Sri mengatakan mereka jarang sekali mengonsumsi ikan. Sebagian besar penghasilan keluarga ini habis untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Bantuan beras dari pemerintah sedikit meringankan beban pengeluaran mereka. Selebihnya, dipakai untuk biaya kedua anaknya yang masih sekolah di bangku SD dan SMA.

Sebagaimana orang tua pada umumnya, keluarga ini menaruh harapan besar kepada anak-anaknya agar terus sekolah, sehingga kelak diharapkan dapat mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Anak pertama hanya lulus SMP, dan memilih berhenti untuk bekerja menjadi buruh pabrik sepatu di kota lain. Suyadi dan istri berharap, anaknya kedua dan ketiga bisa sekolah yang tinggi dan bisa meraih cita-cita mereka, sehingga kehidupan mereka akan lebih baik dari orang tuanya sekarang.

Kondisi kemiskinan akan semakin buruk ketika keluarga miskin menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Kehidupan mereka rentan untuk semakin terpuruk dan menjadi sangat tergantung dengan bantuan orang lain. Kesulitan keluarga miskin untuk mentas dari kemiskinannya, selain karena faktor internal berupa rendahnya kapasitas dan ketidakberdayaan, juga banyak kasus kemiskinan karena disebabkan minimnya akses terhadap sumber-sumber perekonomian dan fasilitas publik yang tidak memadai. Daerah terpencil seperti beberapa kecamatan di Pesisir Barat, Mesuji, Tulangbawang, Pesawaran dan pulau-pulau di sekitar perairan Lampung merupakan kantong-kantong kemiskinan. Dua faktor internal dan eksternal ini melatarbelakangi potret kemiskinan secara umum.

Namun, kemiskinan juga masih kita saksikan di perkotaan, yang notabene sebagai pusat pertumbuhan dan aktivitas perekonomian, dimana fasilitas dan infrastruktur publik lengkap tersedia. Ini menunjukkan bahwa faktor internal seseorang berpengaruh besar terhadap kualitas kehidupannya, di samping faktor eksternal juga berpengaruh dalam banyak kasus kemiskinan yang lain.

Banyak warga miskin sebenarnya memiliki potensi untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya, tetapi terkendala minimnya infrastruktur yang dibutuhkan, seperti akses pendidikan berkualitas, infrastruktur jalan yang layak, pelayanan kesehatan, atau ketersediaan listrik. Dalam kasus seperti ini, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerataan akses dan mutu pendidikan menjadi prioritas. Menyediakan listrik untuk semua warga. Pembangunan jalan dan fasilitas publik yang lain, patut menjadi perhatian pemerintah khususnya untuk kawasan perdesaan. Namun, faktanya, kemiskinan di perkotaan pun masih menjadi masalah yang tak kalah serius. Artinya, dalam banyak kasus faktor internal memiliki andil yang juga kuat penyebab kemiskinan. Ada yang menyebut sebagai kultur atau mentalitas miskin, seperti sifat pesimistis, malas berusaha, kurang gigih, mudah menyerah, banyak mengeluh, dan sebagainya. Faktor internal inilah yang menunjukkan, mengapa dalam kondisi lingkungan yang sama (perkotaan atau perdesaan), nasib orang-orang berbeda-beda.

Menurut hasil observasi lapangan terhadap keluarga miskin, paling tidak ada tiga faktor internal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan yang ditemui dalam rumah tangga miskin, yaitu kultur atau budaya keluarga, pendidikan, dan pengamalan agama. Ketiganya ditemui dalam rumah tangga miskin, di mana satu faktor dengan faktor yang lain berkelindan. Kultur atau budaya keluarga ini pula yang turun-temurun dan diperkuat dengan kondisi sosial di lingkungannya. Rendahnya pendidikan membuat keluarga miskin sulit untuk mengoreksi dan memperbaiki budaya dalam keluarga tersebut; intinya adalah kultur atau budaya yang tidak cukup kondusif dan kuat untuk mendorong lahirnya etos kerja dan potensi kreatif mereka agar bisa keluar dari keterhimpitan. Hasil observasi juga menunjukkan sebagian besar rumah tangga miskin lemah dalam pengamalan ajaran agama, sehingga ini juga berpengaruh terhadap kualitas kehidupan mereka.

Karena itu, salah satu program pemerintah yang dirasakan secara merata dan memberikan asa bagi keluarga miskin untuk suatu saat bisa mentas dari kemiskinannya adalah pendidikan gratis. Semua rumah tangga miskin merasakan manfaat pendidikan gratis ini dan sekaligus memberikan harapan kepada mereka bahwa anak-anak mereka bisa mengenyam

pendidikan yang lebih baik dan kelak kehidupannya bisa lebih sejahtera dibanding orang tuanya sekarang. Kesempatan pendidikan memberikan pengaruh psikologis terhadap keluarga miskin. Oleh karena itu, program pendidikan gratis ini perlu dibarengi dengan pamarataan akses dan peningkatan relevansi (mutu) pendidikan, sehingga dari mata rantai pendidikan ini bisa terputus lingkaran kemiskinan melalui pendidikan anak-anaknya yang lebih baik.

Kemiskinan merupakan refleksi ketidakberdayaan (*powerless*) secara internal maupun eksternal keluarga. Karena itu, untuk memutus mata rantai kemiskinan juga bisa dilakukan mulai dari faktor internal dan eksternal tersebut. Setiap keluarga miskin memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan kemiskinan lebih disebabkan faktor internal, seperti sikap, budaya, atau karakter. Ada pula yang memandang kemiskinan adalah masalah struktur sosial, politik, dan ekonomi yang membuat orang menjadi miskin. Sementara, yang lain menyebut kemiskinan disebabkan karena ketidakadilan. Efektivitas upaya pengentasan kemiskinan sangat tergantung ketepatan mengenali permasalahan mendasar dari keluarga miskin bersangkutan.

Karena itu, intervensi untuk menanggulangi kemiskinan sebaiknya mengacu pada identifikasi yang tepat terhadap latar belakang dan permasalahan keluarga miskin. Membangkitkan partisipasi aktif kelompok warga miskin dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga menjadi keharusan. Sebab, mengatasi rumah tangga miskin membutuhkan energi khusus yang hanya ada di dalam keluarga bersangkutan. Demikian pula, mengentaskan kawasan perdesaan dari masalah kemiskinan juga memerlukan energi yang lahir dari warga perdesaan itu sendiri. Intervensi dari luar lebih sebagai stimulan untuk menggerakkan energi potensial yang ada dalam keluarga atau kelompok masyarakat tersebut.

Pendekatannya dapat dilakukan secara internal, eksternal, atau kombinasi keduanya. Dukungan eksternal berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur publik yang dibutuhkan oleh warga, akan memberikan manfaat bagi keluarga miskin dalam situasi tertentu. Dukungan eksternal lain, misalnya, berupa pemberian pelatihan keterampilan, akses informasi,

bantuan permodalan, serta dukungan manajemen usaha dapat membantu dimana keluarga miskin memang membutuhkan hal itu. Dukungan eksternal juga dibutuhkan agar keluarga miskin termotivasi secara intrinsik untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Namun, pemberian dukungan eksternal seperti diatas tidak serta-merta efektif untuk semua kondisi. Dalam beberapa kasus, orang miskin tidak cukup punya kemauan atau tekad yang kuat untuk berusaha keluar dari kemiskinannya. Orang yang sebelumnya tidak miskin, juga bisa menjadi miskin karena tidak memiliki keinginan internal yang kuat untuk membuat hidupnya tetap sejahtera. Kondisi eksternal justru kadang tidak begitu berpengaruh, ketika individu sudah memiliki motivasi internal yang kuat untuk menemukan jalan keluar dari kemiskinannya. Intervensi eksternal, seperti dalam bentuk program bantuan tunai, dalam banyak kasus tidak memberikan dampak yang cukup kuat untuk mengentaskan si miskin. Dari rumah tangga miskin yang diobservasi menunjukkan program bantuan langsung dalam bentuk natura atau tunai tidak cukup kuat mendorong mereka keluar dari kemiskinan.

Dari observasi lapangan, faktor internal paling dominan dalam rumah tangga miskin adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga pola pikir dan budaya hidup dalam rumah tangga tersebut mengalami stagnasi. Rendahnya pendidikan juga membuat mereka tidak memiliki pilihan pekerjaan, sehingga penghasilannya rendah dan tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan rendah membuat rumah tangga miskin kehilangan kreatifitas, karena waktu dan tenaga mereka habis untuk mencari nafkah kebutuhan pokok. Pola pendidikan dan pola asuh dalam keluarga tersebut pun tidak cukup mendukung kemajuan bagi anak-anaknya. Akhirnya, kemiskinan cenderung akan melahirkan kemiskinan yang baru.

Faktor eksternal kemiskinan di Provinsi Lampung bisa secara jelas ditemui terutama di kawasan perdesaan terpencil dan terisolir di beberapa kabupaten. Warga desa terpencil kurang mendapat dukungan fasilitas dan infrastruktur publik yang cukup memadai. Akses pendidikan, kesehatan, keamanan, masih jauh dari memadai apalagi berkualitas. Lapangan kerja terbatas. Mesin perekonomian di desa-desa terpencil tersebut seperti tidak

bergerak. Tidak ada lokomotif penggerak gerbong ekonomi di sana. Fasilitas umum dan fasilitas sosial juga belum cukup tersedia.

Oleh karena itu, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan pendekatan meningkatkan dan memperluas wilayah pertumbuhan ekonomi, sehingga memberikan ruang aktivitas produktif yang lebih besar bagi tenaga kerja yang melimpah pada kelompok masyarakat miskin. Perluasan wilayah pertumbuhan ini terutama diarahkan pada pemanfaatan potensi dan aset perdesaan, yang menjadi lokomotif baru bagi pertumbuhan ekonomi inklusif di kawasan tersebut.

Mengingat wilayah perdesaan sebagai kantong kemiskinan mayoritas masih bertumpu pada sektor pertanian, maka pertumbuhan ekonomi sebaiknya lebih diarahkan pada peningkatan pembangunan sektor agribisnis dan agroindustri. Di samping itu, perlunya pemerataan dan peningkatan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok miskin, khususnya di daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Pendidikan, kesehatan, keamanan merupakan kebutuhan sosial dasar yang masih perlu diprioritaskan baik kemerataannya maupun kualitasnya. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis paling dirasakan manfaatnya secara merata oleh rumah tangga miskin. Kebijakan pendidikan gratis ini akan semakin efektif jika dibarengi peningkatan kualitas, sehingga mampu membangun pola pikir yang lebih baik pada anak-anaknya, dan dapat ditularkan kepada anggota keluarga yang lain. Kebijakan pendidikan gratis yang berkualitas diharapkan bisa memutus mata rantai kemiskinan.

Pemberdayaan Ekonomi

Kemiskinan tidak hanya ada di perdesaan. Profil keluarga Roni (57) yang tinggal di Kedamaian, Bandar Lampung—sebagaimana dipaparkan pada bagian awal bab ini—adalah salah satu profil rumah tangga miskin di perkotaan. Kemiskinan juga bukan monopoli masyarakat petani. Banyak rumah tangga miskin dengan latar belakang keluarga bukan petani. Seperti keluarga Jepri (33) yang tinggal di Desa Mandala Sari, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan. Jepri memiliki dua orang anak hasil perkawinannya

dengan Wiwin (33). Anak pertama Riki (11) duduk di kelas 4 SD, dan anak kedua Yuli (5) belum sekolah.

Jepri hanya tamatan SMP. Istrinya hanya tamat SD. Pekerjaan Jepri sekarang jual beli rongsokan. Wiwin, ibu rumah tangga. Penghasilan per hari rata-rata sekitar Rp25 ribu. Pekerjaan sambilan Jepri adalah memperbaiki barang rongsok untuk dijual kembali, atau menjadi kuli di gudang pengumpul rongsokan. Pekerjaan sambilan istri adalah ikut kerja membuat batu bata.

Kondisi rumah mereka sangat sederhana. Dinding dari anyaman bambu (geribik) yang mulai lapuk. Banyak lubang di hampir semua bagian. Lantai rumah masih tanah yang dilapisi karpet lusuh dan robek di berbagai sisi. Di atas karpet itu, keluarga ini biasa istirahat, ngobrol, maupun menonton televisi. Kulkas, kipas angin, dan televisi yang ada di rumah itu adalah hasil rongsokan yang diperbaiki oleh Jepri. Rumah mereka hanya terdapat satu kamar. Didalamnya terpasang bambu yang dibuat sedemikian rupa membentuk dipan yang menyatu dengan dinding. Hanya ada kasur tipis dan beberapa bantal dan guling. Di bagian bawahnya hampir tidak pernah dibersihkan. Terlihat banyak sampah dan barang-barang di bawahnya.

Dengan kondisi rumah yang kecil dan penuh barang-barang, hanya ada satu jendela di bagian depan yang tertutup lemari, rumah terasa pengap. Listrik di rumah itu bersumber dari masjid dekat rumah. Sanitasi jauh dari layak. Keluarga ini tidak memiliki MCK, mereka menumpang di tempat tetangga atau masjid dekat rumah. Terkadang ada bau menyengat di sekitar rumah, karena tidak ada MCK sering anak-anak buang air kecil di samping rumah. Belum lagi bau sampah di belakang rumah. Rumah itu pun bukan hak milik mereka, melainkan milik kerabat untuk ditinggali keluarga Jepri sementara.

Penghasilan keluarga Jepri bukan dari sektor pertanian. Ekonomi keluarga ini merupakan salah satu contoh ekonomi untuk sekadar bertahan hidup. Seperti Mubyarto mendefinisikan ekonomi rakyat sebagai strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk atau rakyat miskin, baik di kota maupun di desa (Mubyarto, 1996: 4).

Mubyarto tidak menyebutkan definisi operasional yang tegas tentang ekonomi kerakyatan. Disebutkan bahwa usaha yang bersifat mandiri adalah ciri khas usaha ekonomi rakyat. Dalam usaha ekonomi rakyat tidak ada buruh, tidak ada majikan, tidak ada motivasi mengejar untung. Tidak cukup jelas apakah usaha ekonomi keluarga yang telah mampu menggaji pekerja, tidak termasuk sebagai kelompok ekonomi rakyat—karena adanya ciri tidak ada buruh dan tidak ada majikan. Menurut Bappenas, ekonomi rakyat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) hidupnya, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Terlepas dari diskursus definisi operasional ekonomi kerakyatan tersebut, karakter ekonomi rakyat mudah dikenali. Karakter umum ekonomi rakyat rentan pada tiga faktor, yaitu input yang dapat diakses, output yang dihasilkan, dan kompensasi yang diterima. Kemampuan ekonomi rakyat dalam mengakses input produksi, baik modal, keterampilan, atau teknologi sangat terbatas. Karena itu, output yang dihasilkan pun tidak bisa optimal, sehingga keuntungan atau kompensasi ekonomi yang diterima pun menjadi pas-pasan. Maka, ekonomi rakyat sering berwujud kegiatan usaha kecil yang marginal.

Usaha ekonomi rakyat umumnya belum tersentuh institusi perbankan. Seringkali ada berbagai hambatan struktural dan psikologis untuk pembiayaan usaha kecil, misalnya, adanya persepsi inferior tentang potensi usaha kecil, terlebih di perdesaan. Keterkaitan antara marginalitas ekonomi rakyat dengan kemiskinan menjadi sangat jelas. Sering kali, secara sederhana, problem ekonomi rakyat ini dimaknai sebagai kurangnya modal. Pemberian modal bagi kelompok miskin dianggap mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Ketahanan ekonomi rakyat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan permodalan. Akses permodalan memang menjadi satu persoalan yang acap dihadapi perekonomian rakyat, disamping juga minimnya keahlian dan keterampilan usaha, serta aspek pemasaran. Sedangkan kegigihan dan keuletan dalam berusaha atau semangat kewirausahaan di kalangan keluarga miskin sebenarnya cukup tinggi. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan

ekonomi rakyat harus diarahkan pada upaya menjawab sisi-sisi lemah yang ada tersebut.

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam proses pemberdayaan (*empowering*), masyarakat tidak hanya dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, melainkan menjadi subjek memberdayakan dirinya sendiri. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin hendaknya difokuskan pada peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonominya. Strategi dan pendekatan yang dilakukan hendaknya diarahkan pada proses pemberdayaan internal oleh kelompok warga setempat, baik melalui kerja sama ekonomi, pendampingan usaha, transfer pengetahuan dan keterampilan, atau fasilitasi pengelompokan sektor usaha rakyat. Pemberian bantuan modal atau peralatan usaha hendaknya lebih diarahkan sebagai stimulan guna memacu meningkatkan produktivitas ekonomi mereka. Proses peningkatan kapasitas usaha harus dilakukan oleh keluarga atau kelompok masyarakat miskin itu sendiri.

Pemberdayaan keluarga miskin ini juga merupakan tanggung jawab anggota masyarakat yang lain. Problem kemiskinan adalah tanggung jawab dan kewajiban masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasinya. Di samping, tentunya dukungan kebijakan dan keberpihakan pemerintah terhadap mereka. Dalam hubungan itu pendekatan kelembagaan dibutuhkan.

Pendekatan kelembagaan seyogianya lebih menekankan pada bagaimana membangun solidaritas sosial pada masyarakat yang lebih mampu, agar mereka mau membantu warga miskin. Keberpihakan menjadi penting, karena ekonomi rakyat tidak akan berdaya jika harus berhadapan secara langsung dengan pengusaha besar. Keberpihakan itu bisa dibuktikan dengan kebijakan dan program pembangunan yang menempatkan kelompok masyarakat miskin terbawah sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan perlu diprioritaskan pada kelompok masyarakat miskin terbawah tersebut.

BAB V

CERITA BIASA YANG TAK SEMESTINYA

Problem Pendidikan

Ahmad Sarifudin, hanya lulusan SD. Ia lahir di Talang Padang, Tanggamus, 45 tahun yang lalu. Kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan membuatnya tak bisa melanjutkan sekolah. Pada usia 17-an, Ahmad merantau ke Lampung Barat. Kerabatnya ada yang tinggal di sana. Di Suoh, Lampung Barat, Ahmad pun bertemu jodohnya.

Sukina adalah warga asli Bandar Setia, Pekon Bandar Agung, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat. Juga karena masalah ekonomi, ia hanya mengenyam pendidikan formal sampai tamat SMP. Pada usia 35 kini, ia telah memberikan empat buah hati hasil perkawinannya dengan Ahmad. Keempat anaknya: Almunizar (18 tahun), Armazan (11 tahun), Putri Kaila Maharani (5 tahun), dan Rahmat Heidayattullah (1 tahun).

Ahmad sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas. Ia bekerja pada orang lain; tatangga atau siapa saja yang membutuhkan tenaganya. Ia mengerjakan segala jenis pekerjaan. Tak ada keterampilan khusus, selain bekerja di kebun atau sawah yang mengandalkan tenaga. Kuli bangunan juga ia siap kerjakan. Sebagai kepala keluarga, ia tak memiliki penghasilan tetap. Dari hasil buruh tani dan buruh kerja serabutan, Ahmad mendapatkan upah rata-rata Rp50 ribu per hari. Kadang lebih, kadang juga kurang. Sesuai pekerjaan dan

kesepakatan dengan pemberi kerja. Kadang, ada hari dimana tak ada panggilan kerja.

Sukina, sang istri, pekerjaan utamanya mengurus rumah dan anak-anak. Apalagi dua anaknya masih terbilang balita. Di rumah yang sangat sederhana itulah keempat anaknya dibesarkan.



Rumah Keluarga Ahmad

Rumah itu merupakan aset satu-satunya keluarga ini. Sangat kecil, untuk ukuran ke-luarga dengan empat orang anak. Berdinding bambu, berlantai tanah merah yang belum disemen, hanya dilapisi tikar. Atap rumah asbes dan kerap bocor jika hujan. Ada tiga ruangan yang tak cukup luas. Ruang tamu, yang saat malam hari difungsikan sebagai tempat beristirahat. Satu kamar, yang menjadi tempat tidur untuk anak-anaknya. Dan, dapur. Kondisi dapur sangat sempit dengan perabot seadanya. Sirkulasi udara minim. Celah-celah dinding bambu dan sebuah pintu untuk keluar-masuk udara. Kebersihannya cukup memprihatinkan, tampak jarang dibersihkan. Tampak beberapa sampah di dalam ruangan dan pakaian yang diletakkan sembarangan.



Di kamar ini, sang ibu, Armazan, Kaila, dan Rahmat tidur. Sedangkan sang ayah dan anak sulung Almunizar tidur di ruang tamu. Tampak ketiga anak Ahmad, yaitu Armazan (laki-laki berbaju hijau), Kaila (tidur telentang di kasur), dan Rahmat yang masih balita (tidur di ayunan).

Anak pertama, Almunizar, saat ini usia 18 tahun. Almunizar hanya lulusan SMP. Sempat melanjutkan jenjang SMA, tetapi belum genap setahun ia berhenti sekolah. Padahal di Lampung Barat sekolah gratis. Almunizar mengaku merasa tidak percaya diri atau minder dengan teman-temannya di sekolah. Sebagai anak sulung, ia juga merasa kasihan dengan orang tuanya yang membanting tulang untuk keluarga, tetapi masih kekurangan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia memutuskan untuk berhenti sekolah, meski orang tuanya sebenarnya sangat ingin melihatnya bisa tamat SMA.

Anak kedua, Armazan, saat ini bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nahdhatul Tholabah, kelas IV. Orang tuanya sangat ingin Armazan menyelesaikan pendidikannya hingga SMA, sehingga bisa lebih baik kehidupannya. Anak ketiga, Putri Kaila Maharani, masih 5 tahun, belum sekolah. Anak keempat, Rahmat Heidayattulloh, baru berumur 1 tahun.

Anak keempat itu baru menjalani operasi bibir sumbing yang diderita sejak lahir. Biaya operasi dari bantuan masyarakat Pekon Bandar Agung yang tergerak membantu secara sukarela. Rahmat kini sudah selesai dioperasi. Keadaannya sudah membaik. Namun, ia masih harus melakukan operasi sekali lagi, yang rencananya dilakukan saat ia sudah bisa berjalan.

Sulung keluarga Ahmad itu kini bekerja sebagai buruh serabutan. Pekerjaannya tidak menentu. Kadang ia bekerja menggarap kebun milik tetangga. Atau pekerjaan apa saja yang mengandalkan tenaga, seperti menjadi kuli bangunan, tergantung permintaan pekerjaan yang ada. Upah ia peroleh secara harian, kadang borongan, tergantung kesepakatan dengan pemberi pekerjaan. Hasil yang diperoleh Almunizar sepenuhnya untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Mereka tak memiliki lahan garapan sendiri. Dulu, sebenarnya mereka punya sebidang tanah warisan keluarga. Namun, terpaksa dijual karena terdesak kebutuhan hidup. Aset itu terpaksa mereka lepas dengan harga murah demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketiadaan sumber penghasilan yang pasti dan kebutuhan hidup yang mendesak, membuat mereka tidak punya pilihan lain.



Ruang depan keluarga Ahmad. Ahmad baru pulang dari kebun.

Hari itu, akhir April 2018, suhu dalam rumah cukup panas. Namun, penghuninya sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Ahmad kebetulah sempat pulang siang untuk istirahat, sebelum kembali bekerja di ladang yang tak jauh dari rumahnya. Bekerja, menurutnya, adalah satu keharusan. Jangan sampai menganggur. Bekerja apa saja, selama benar dan tidak merugikan orang lain, adalah prinsip Ahmad dalam mencari nafkah.

Siang itu, Ahmad sempat istirahat sebentar di rumah, kemudian kembali bekerja menggarap ladang milik tetangganya. Biasanya, sekitar pukul lima sore Ahmad baru pulang kembali. Atau, jika pekerjaan hanya butuh waktu setengah hari, pada siang hari ia isi dengan membersihkan pekarangan sekitar rumah.

Malam hari, penerangan di rumah itu hanya menggunakan lampu minyak. Keluarga itu tak sanggup membeli modul dan aki tenaga surya untuk penerangan. Sambungan listrik PLN belum menjangkau tempat tinggal Ahmad. Malam hari menjadi waktu untuk keluarga ini berkumpul. Saling bertukar cerita, atau waktu bagi orang tua untuk menasehati anak-anaknya. Sesekali anggota keluarga ini pergi ke rumah kerabat yang tak jauh dari tempat tinggalnya, untuk bisa menonton TV. Anak-anaknya akan senang jika Ahmad atau ibunya mengajak berkunjung ke rumah kerabat itu. Di rumah kerabatnya itulah mereka bisa menikmati hiburan atau mendapat informasi dari TV.

Keluarga ini bangun waktu subuh. Sang ayah kadang salat berjemaah di masjid. Anak-anak juga bangun pagi, terutama anak kedua yang sekolah di Madrasah. Sang ibu memasak menyiapkan makanan untuk keluarganya. Selanjutnya, mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Ayah dan anak pertamanya, Almunizar, pergi bekerja menggarap kebun milik orang lain atau pekerjaan lain. Apapun dikerjakan untuk mendapat penghasilan, agar keluarganya dapat menyambung hidup. Menganggur adalah sesuatu yang dihindari. Tawaran pekerjaan apa pun diterima, selagi ia bisa.

Sukina cukup cekatan dalam memasak makanan keluarga. Dia selalu berusaha agar suami dan anak-anaknya bisa makan tiga kali sehari. Jangan tanya soal gizi, bagi keluarga ini menu adalah apa saja yang ada pada hari itu. Dengan penghasilan sebagai buruh serabutan, bersyukur bisa makan tiga

kali sehari. Apa pun makanannya, tidak terlalu mementingkan gizi dan selera. Bahkan, besok makan apa belum bisa dipastikan pada hari ini. Sukina terkadang mencari bahan makanan dari lingkungan sekitarnya, seperti sayur-sayuran yang bisa didapat secara cuma-cuma.

Sebagian besar penghasilan Ahmad sebagai kepala keluarga dipakai untuk menutupi kebutuhan pokok. Untuk makan yang pertama. Kemudian untuk rokok. Ya, rokok bagi Ahmad sudah seperti kebutuhan pokok. Setiap hari Ahmad harus merokok. Sulit baginya untuk menghindari atau menghentikan kebiasaan tersebut. Padahal, untuk merokok ini Ahmad harus menyisihkan penghasilannya dan mengorbankan kebutuhan yang lain. Meski demikian, Ahmad masih menjadikan pendidikan anaknya sebagai prioritas. Ia menyatakan siap berjuang agar anak keduanya bisa menyelesaikan SMA, dan berharap bisa mengangkat harkat hidup keluarga.

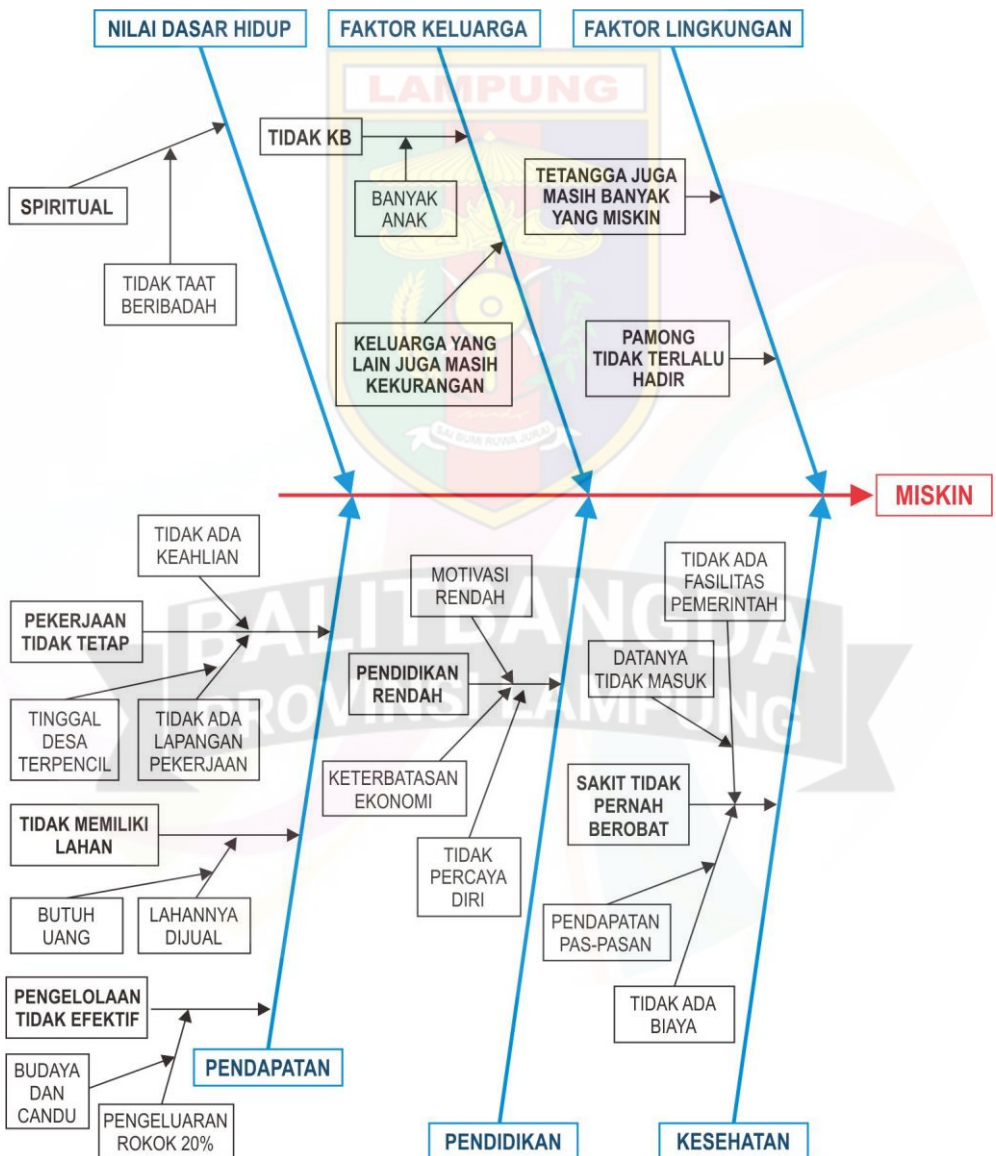
Ahmad menjadi perokok aktif sejak usia muda. Ia sehari menghabiskan sebungkus rokok, yang harganya Rp10 ribu. Sementara penghasilan rata-ratanya Rp50 ribu, bahkan sering lebih kecil dari itu. Rokok menjadi beban pengeluaran yang cukup signifikan dalam rumah tangga ini. Kebiasaan sang bapak sudah menurun ke anak sulung. Almunizar juga merokok. Mereka sudah tercandu rokok, sehingga sulit dikendalikan. Bekerja, merokok. Istirahat, merokok. Bahkan saat mengikuti pengajian pun diselingi merokok.

Keluarga ini tidak punya tabungan atau dana cadangan untuk kebutuhan lain, seperti untuk kesehatan, transportasi, penerangan (listrik), atau biaya pendidikan anaknya. Kemana-mana mereka jalan kaki. Atau meminjam motor kerabat atau tetangga saat mendesak dibutuhkan. Ahmad punya motor, tetapi sudah rusak dan tidak ada kemampuan biaya untuk memperbaikinya. Mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari saja pas-pasan malah lebih sering kekurangan.

Bila salah satu anggota keluarga sakit, mereka tidak berfikir untuk berobat ke Puskesmas atau rumah sakit. Sakit biasa, menurut mereka, akan sembuh sendiri. Kadang cukup di-*kerik* atau minum obat warung. Baru pergi berobat apabila penyakitnya serius. Seperti anak keempatnya, Rahmat, yang masih balita baru saja menjalani operasi, karena kepedulian warga

sekitar. Rahmat menjalani operasi bibir sumbing dengan biaya sumbangan dari kerabat dan tetangga. Rahmat masih harus menjalani operasi kedua, sementara orang tuanya belum terfikir dari mana biayanya. Keluarga Ahmad tidak mendapatkan fasilitas Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Fish Bone Diagram



Gotong royong masih ada di lingkungan keluarga ini. Seperti tampak dalam pembangunan masjid di Dusun Suka Agung. Warga di lingkungan Dusun Suka Agung mayoritas masih memiliki hubungan keluarga. Biasanya masyarakat Dusun Suka Agung menikah dengan sesama penduduk setempat dan tinggal di dusun yang sama. Keakraban antar tetangga juga masih baik, masyarakat masih sering berinteraksi.

Penduduk Dusun Suka Agung mayoritas beragama Islam. Pengajian juga rutin di dilaksanakan di Dusun Suka Agung dengan bergantian tiap minggunya. Pengajian bapak-bapak dilaksanakan setiap malam Jumat, sedangkan pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap malam Rabu dan juga Jumat siang. Lingkungan Dusun Suka Agung juga masih menjunjung tinggi adat, dimana mayoritas bersuku Semendo. Adat yang masih sangat menonjol ialah saat acara pernikahan dan juga muda-mudi. Masyarakat antusias dan turut berpartisipasi dalam acara-acara adat tersebut.

Keluarga Ahmad Sarifudin mendapatkan tiga program sosial pemerintah, yaitu PKH (Program Keluarga Harapan), sekolah gratis, dan Raskin (beras miskin). Selain itu, tidak ada program pemerintah yang dirasakan langsung oleh keluarga ini. Padahal, keluarga ini bisa dikatakan sebagai salah satu keluarga termiskin yang ada di Pekon Bandar Agung, khususnya Dusun Suka Agung.

Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan keluarga Ahmad ini sulit untuk maju. Aspek pertama, yaitu pendidikan. Pendidikan orang tua yang hanya lulusan SD dan SMP, sehingga terkadang pola pikir mereka tidak berkembang. Mereka sebelumnya memiliki beberapa bidang tanah, tetapi dijual karena pola pikir mereka untuk mendapatkan uang secara cepat.

Aspek kedua, ketiadaan aset dan modal untuk usaha. Mereka sebenarnya ingin mencoba berwirausaha dengan membuka warung, tetapi tak cukup modal untuk memulainya. Mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih sulit, apalagi untuk modal usaha. Aspek ketiga, tidak adanya keahlian. Anggota keluarga ini tidak memiliki keahlian khusus. Hal ini membuat mereka sulit maju dan hanya bekerja sebagai buruh serabut. Kemiskinan juga tidak terlepas dari factor keluarga. Keluarga Ahmad dan keluarganya



yang lain umumnya juga berkekurangan (miskin), sehingga tidak bisa saling menopang ataupun membantu keluarga yang lain.

Tekad untuk Berubah

Pendidikan Paizullah (53) tidak tamat Sekolah Dasar. Bukan karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya, tetapi karena kurang pengawasan kedua orang tuanya. Saat itu, sekitar tahun 1972, Paizullah masih SD. Letak sekolahnya jauh dari rumah, yaitu di Lampung Tengah (Kota Gajah). Karena kurang pengawasan, Paizullah kecil sering bolos sekolah. Ia lebih senang bermain dan menonton bersama teman-temannya. Butuh uang untuk pergaulannya itu, ia pun mencarinya dengan menjadi kenek mobil angkutan umum. Saat itu, Paizullah masih kelas 4 SD. Akibat kelakuannya tersebut, ia tak menamatkan sekolahnya.

Keluarga Paizullah sekarang tinggal di Pemangku Way Batu, Desa Way Haru, Pesisir Barat. Istrinya pun tak selesai SD. Anak pertama yang sekolah di Pringsewu pun putus sekolah sejak kelas 2 SMP. Anak kedua dan ketiga telah lulus SMA. Paizullah dan istri kini bertani. Menggarap kebun dan sawah di lahan milik mereka sendiri. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan, sulit bagi keluarga ini untuk maju. Hasil bertaninya setiap tahun jauh dari harapan. Tak cukup sekadar untuk kebutuhan sehari-hari.

Rata-rata penghasilan dari berkebun kurang dari Rp1 juta per bulan. Dari kelapa yang dibuat kopra, setiap bulannya mendapatkan sekitar 50 kg

yang harga per kilonya sekitar Rp3.000 sampai Rp3.500. Dari penghasilan itulah yang dipakai untuk mencukupi kebutuhan harian mereka, mulai dari makan sampai rokok. Lahan perkebunan yang terbatas, pengolahan kelapa yang kurang memberikan nilai tambah, membuat hasilnya kurang dari harapan. Sebagian besar penghasilan mereka untuk makanan pokok harian dan rokok.

Pendapatan tambahan Paizullah adalah dari jasa gerobak sapi. Warga setempat menyebutnya “manol.” Gerobak ini menjadi alat angkut hasil-hasil pertanian dari ladang. Biasanya gerobak sapi membawa hasil perkebunan warga setempat dari ladang ke rumah atau ke pasar yang jaraknya lumayan jauh; bahkan di tempuh hampir setengah hari. Ongkos manol ini dihitung per kilo, yang di hargai kisaran Rp1.000/Kg. Sekali angkut, bisa membawa hasil kebun yang beratnya sekitar 2 kwintal.

Rumah keluarga ini sangat sederhana. Rumah panggung itu berdinding papan, seperti kebanyakan rumah-rumah lain di dusun tersebut. Dusun Way Batu lokasinya jauh dari ibu kota. Hal ini disebabkan jalan yang masih menggunakan jalur pantai dan tanah yang ketika hujan sangat sulit dilalui, butuh ongkos yang tak sedikit untuk ukuran warga miskin di sana agar bisa sampai ke kota.



Wilayah Way Haru belum teraliri listrik. Sumber penerangan masyarakat adalah PLTS. Namun keluarga Panzullah tidak mampu mengakses PLTS karena lokasi rumahnya jauh dari jalan utama, sehingga jauh dari jaringan PLTS yang ada. Sumber penerangan di rumahnya hanya mengandalkan aki kecil pemberian tetangganya.

Aktivitas malam hari biasanya mereka menonton tv di rumah tetangga sampai sekitar pukul 22.00. Sang bapak biasanya bangun pukul 9 pagi. Istrinya biasa bangun lebih awal, sementara anak-anaknya jika tidak ada kerjaan bangunnya pukul 8. Ini sudah menjadi kebiasaan: bangun tidur, sarapan, dan berangkat ke ladang. Tidur siang menjadi hal wajib. Setiap hari keluarga ini tidur siang.

Fasilitas umum dan fasilitas sosial di Dusun Way Batu masih sangat minim. Sekolah masih terbatas. Bangunan Puskesmas sudah ada, tetapi belum beroperasi. Untuk pelayanan kesehatan baru ada Bidan Desa. Pasar jaraknya sekitar 20 km yang lokasinya di luar dusun.

Sekarang pola pikir mereka bagaimana hasil panen perkebunan bisa meningkat setiap tahunnya, mulai memanfaatkan hasil perkebunan dengan diolah. Kelapa yang biasanya di jual begitu saja, sekarang diolah dijadikan kopra yang nilainya lebih tinggi. Dari segi ibadah yang dulu ditinggalkan, sekarang rajin ditunaikan. Panzullah mengaku belum lama berubah, baru kurang lebih satu tahun ini, setelah beliau banyak konsultasi dengan kakaknya setiap ada masalah. Pola hidupnya mulai berubah.

Secercah Harapan

Suyadi (45), tinggal di Sidodadi, Air Ringkih, Kabupaten Way Kanan. Istrinya, Sri Ngatin (39). Mereka berprofesi buruh tani perkebunan. Punya tiga orang anak, Sri Ulandari (19) yang kini menjadi buruh pabrik di Jakarta, Sutaji (17) pelajar SMA, dan Sari (10) masih duduk di bangkutan Sekolah Dasar.

Suyadi hanya sempat mengenyam pendidikan sampai kelas 5 SD. Saat Suyadi kecil, orang tuanya sering pindah rumah. Alasannya karena merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitar. Sering berpindah rumah itu

membuat Suyadi malas melanjutkan sekolahnya kembali. SD pun tidak ia selesaikan.

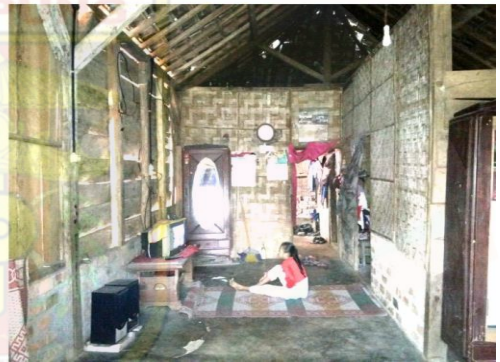
Sang istri juga hanya tamatan SD. Istrinya menyelesaikan SD di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Karena alasan tidak memiliki biaya pada saat itu, Sri terpaksa tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi.

Anak pertama pasangan, Sri Ulandari, ini sejak kecil diurus oleh neneknya. Hingga lulus SMP, Ulandari memilih tidak melanjutkan sekolah dan bekerja di Jakarta sebagai buruh pabrik sepatu, hingga sekarang. Anak kedua dan ketiganya masih sekolah masing-masing di SMA dan SD.

Suyadi dan Sri Ngatin tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka bekerja saat tenaga mereka dibutuhkan orang lain. Namun ketika tak ada yang membutuhkan tenaga mereka, mereka pun tidak bekerja. Biasanya Suyadi bekerja sebagai penyemprot rumput di kebun karet milik tetangganya. Sedangkan istrinya buruh petik kopi di kebun milik warga setempat. Lokasi kebun kopi tempat Sri bekerja jauh dari kebun karet tempat suaminya bekerja. Dari pekerjaannya tersebut, penghasilan suami-istri itu sekitar Rp80 ribu sehari.

Keluarga Suyadi memelihara 13 ekor kambing, tetapi tidak semua milik mereka. Sebanyak 7 kambing milik orang lain, dan 6 ekor milik sendiri. Setiap harinya mereka mencari rumput untuk makan kambing-kambing tersebut, yang biasanya dilakukan oleh anak kedua mereka setelah pulang sekolah. Namun, jika anaknya tidak bisa, maka Suyadi sendiri yang harus mencarikan makanan kambing tersebut. Kambing-kambing peliharaan mereka ini, selain mendatangkan bagi hasil dari 7 kambing milik orang lain yang dipeliharanya, juga sebagai aset untuk berjaga-jaga jika ada kepentingan atau kebutuhan mendesak yang bisa datang sewaktu-waktu.

Keluarga Suyadi tinggal di rumah yang bagian depan ber dinding bata merah. Sebagian lainnya papan dan geribik. Papan digunakan untuk bagian samping kanan dan kiri dinding dan bagian depan dapur. Geribik digunakan sebagai penutup kusen jendela yang tidak jadi dan untuk bagian kamar dan dapur. Terutama dapur yang dinding geribiknya sebagian besar sudah tidak layak digunakan.



Lantai rumah sebagian dari semen dan sebagian masih tanah. Lantai semen mulai dari depan pintu masuk sampai ruang keluarga saja. Namun, untuk bagian kamar dan dapur masih berlantaikan tanah.

Sang ibu biasa bangun pukul 04.00 subuh untuk membuat sarapan sekaligus makan siang dan berberes rumah sebelum berangkat kerja. Suyadi bangun kemudian. Anaknya, Sutaji bangunnya ketika setelah azan subuh. Dan untuk Sari bangunnya pukul 06.00 pagi. Tidak ada kebiasaan tidur siang di keluarga tersebut.

Keluarga ini biasanya menghabiskan rata-rata satu kilo beras dalam sehari. Lauk dan sayur, biasanya cukup mengandalkan hasil kebun sekitar, seperti kelapa untuk membuat santan, pepaya, atau sayuran lain, ditambah tempe atau tahu. Sri mengatakan mereka jarang sekali mengonsumsi ikan maupun daging.

Pengeluaran untuk makanan pokok sekitar 50%, karena untuk beras mereka sudah sedikit terbantu dari jatah beras sejahtera (rastra). Pengeluaran

transportasi sekitar 30%, karena motor yang mereka punya hanya digunakan untuk pergi ke sekolah dan untuk mencari makan kambing. Pengeluaran untuk rokok sekitar 40%, karena Suyadi setiap harinya menghabiskan satu bungkus rokok. Dan rokok yang dibeli per bungkus seharga Rp10 ribu. Untuk listrik mereka membutuhkan Rp25 ribu yang digunakan sekitar tiga minggu.

Pengeluaran untuk pendidikan paling besar digunakan untuk pembelian seragam sekolah, membayar iuran komite, peralatan sekolah, foto kopi dan tugas-tugas sekolah lainnya. Selain itu juga termasuk uang saku saat di sekolah. Pengeluaran untuk kesehatan tidak menentu, karena ketika mereka sedang sakit, mereka dapat menggunakan kartu sehat dari pemerintah. Pengeluaran lainnya adalah untuk pulsa telepon, karena keluarga Bapak Suyadi hanya menggunakan pulsa untuk berkomunikasi kerabat jauh saat penting saja. Seperti untuk berkomunikasi dengan anak pertamanya yang jarang sekali pulang ke rumah.



Di Kampung Air Ringkih ini masih sangat kental budaya kenduri. Istilah “tonjokan” atau “punjungan” adalah kiriman makanan dari warga yang berhajat, yang berarti harus dibalas oleh penerimanya dengan memenuhi undangan berikut sumbangan uang. Pengeluaran untuk kenduri ini pada saat-saat tertentu, khususnya musim hajatan, menuntut pos tersendiri. Pengeluaran menjadi bertambah. Selain itu, pengajian yang diadakan sebulan sekali, juga berarti menambah pengeluaran dalam bentuk kue-kue dan itu sudah tradisi di kampung ini. Keluarga ini tidak memiliki tabungan.

Selama observasi, sang ibu selalu tepat waktu mengingatkan anak-anaknya untuk menunaikan shalat lima waktu. Anak-anaknya pun tampak terbiasa dan cukup disiplin dalam beribadah: shalat dan mengaji. Sayangnya, Ibu Sri sendiri selama enumerator menginap di rumahnya tidak pernah shalat. Sekali waktu enumerator bertanya, kenapa ibu tidak shalat? “Saya lagi menggunakan susuk (KB) jadi tidak bisa shalat,” ujar Ibu Sri. Dan untuk sang bapak pun sama, enumerator tidak pernah melihatnya shalat.

Selama enumerator tinggal di rumah keluarga ini, tidak pernah melihat kedua anaknya belajar. Meski demikian, kedua orang tua itu merasa senang dengan sikap dan perilaku kedua anaknya, yang dinilai patuh kepada orang tua, rajin sekolah dan mengaji. Anak keduanya, Sutaji, juga sudah bisa diandalkan untuk membantu mencari rumput makanan kambing peliharaan mereka. Suyadi dan Sri agaknya memiliki harapan besar kepada kedua anaknya yang masih sekolah, pada suatu hari nanti, mereka dapat mengenyam pendidikan yang tinggi dan meraih cita-citanya, sehingga kehidupan mereka bisa lebih baik dari orang tuanya.

Program pemerintah yang dirasakan secara langsung keluarga ini adalah bantuan beras, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Suyadi juga mengaku keberadaan pamong desa setempat cukup berperan dalam mengurus kehidupan warga. Sosialisasi program-program pemerintah cukup baik dikomunikasikan oleh pamong kepada warga setempat.

Sebuah prinsip dalam kehidupan seseorang atau keluarga itu sangat perlu sebagai patokan atau sebuah aturan yang harus dijunjung tinggi dan

tidak boleh dilanggar. Seperti halnya keluarga ini, mereka juga memiliki prinsip-prinsip yang dijaga, seperti dalam pendidikan dan agama.

Kekayaan Alam Bukan Jaminan

Wagimin (37) tinggal di Way Rantang, Desa Suka Mulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Istrinya, Pujiati (27). Keduanya lahir di Jawa Tengah. Kini mereka telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Andre Diki Saputra (9), dan Naela Fitri Lestari (3).

Kedua orang tua hanya lulusan SD. Pekerjaan mereka bertani dan berkebun. Sebagai sampingan, Wagimin juga menjadi kuli bangunan atau buruh angkut barang. Anak pertamanya duduk di kelas 5 SD, sedangkan anak kedua belum sekolah.



Keluarga Bapak Wagimin, bersama istri dan dua anaknya



Aktivitas keluarga Bapak Wagimin

Desa Suka Mulya terletak di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Suka Mulya merupakan salah satu desa dengan karakteristik wilayah pegunungan yang terdiri atas daerah berbukit dan lembah. Letaknya yang berada di daerah pegunungan membuat daerah ini kaya dengan hasil-hasil perkebunan, seperti kopi, lada, cengkeh, coklat, karet, duku, dan durian. Meskipun kaya akan hasil alam, tidak menjadikan warga desa ini lepas dari masalah kemiskinan. Keluarga Wagimin merupakan transmigran dari Purworejo (Jawa Tengah) dan sudah menetap di Suka Mulya hampir delapan tahun, dan telah tercatat sebagai warga Pesisir Barat dengan dimilikinya KK dan KTP.

Keluarga ini meninggalkan sebuah rumah sederhana yang dipinjamkan seorang pemilik kebun, sekaligus untuk merawat kebun tersebut atau dikenal sebagai penggarap kebun. Rumah tersebut dipinjamkan selama Wagimin menggarap kebun tersebut. Rumah yang ditinggalkan Wagimin beserta istri dan anaknya itu berdinding papan yang mulai rapuh, salah satu sudutnya telah ditambal dengan terpal. Bagian atap ditutupi seng berwarna coklat seluruhnya.

Rumah ini hanya memiliki satu kamar dengan dapur menyatu dengan ruang tamu. Tempat MCK terbuat seadanya dengan bak air berbahan plastik yang direntangkan. Kamar mandinya tidak tertutup oleh bilik sepenuhnya. Sedangkan jambannya masih menggunakan wc cemplung di tengah kebun. Saat malam hari, penerangan rumah menggunakan listrik dari swadaya masyarakat yaitu dipasok dari turbin atau generator. Tidak ada media elektronik sebagai sumber informasi baik televisi, radio, alih-alih *smartphone*. Jika ingin menonton televisi, harus ke rumah tetangga.

Sebagai pekebun, penghasilan Wagimin tak banyak. Berkisar Rp2,5 juta sampai Rp4 juta setahun. Penghasilan tersebut diperoleh dari hasil kebun yang dibagi dua dengan pemilik kebun, dipotong biaya pupuk, obat rumput, dan lainnya. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wagimin juga bekerja serabutan menjadi kuli bangunan dengan bayaran Rp40-70 ribu, tergantung kesepakatan dengan pemilik proyek dan terkadang juga sebagai buruh panggul dengan upah yang diperoleh sekitar Rp70-100 ribu.

Banyak kebutuhan yang tak tercukupi, tentu. Terkadang sang istri harus meminjam ke warung untuk memenuhi kebutuhan wajib sehari-hari. Keluarga ini pola makannya dua atau tiga kali sehari, tergantung ketersediaan makanan. Jika persediaan pangan habis, sementara uang tak ada, pilihannya adalah berutang ke warung yang sudah biasa dikenalnya. Dalam satu tahun, utang diwarung bisa mencapai Rp7 juta dan akan dicicil ketika kebun sudah panen.

Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas hidup serta menunjukkan status sosial seseorang. Semakin tinggi pendidikan diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan. Pada hakikatnya pendidikan merupakan upaya mendasar manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya.



Rumah kediaman Bapak Wagimin

Tingkat pendidikan yang rendah, hanya sampai Sekolah Dasar, mempengaruhi bagaimana produktivitasnya keluarga ini. Penghasilan diperoleh hanya dengan mengandalkan tenaga fisik tanpa keterampilan yang memadai. Produktivitas yang terbatas tersebut menyebabkan rendahnya pendapatan dan ketidakberdayaan untuk mengemangkan diri dan keluarganya.

Rendahnya pendapatan keluarga Wagimin, disebabkan beberapa faktor diantaranya, pekerjaan yang tidak tetap, dimana hasil dari pekerjaan tersebut sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keluarga ini juga tidak memiliki aset ekonomi, seperti kebun, lahan pekarangan, maupun rumah yang layak. Aset adalah faktor produksi penting dalam menghasilkan pendapatan keluarga, sehingga semakin kecil aset yang dimiliki, semakin kecil pula peluang menghasilkan.

Partisipasi keluarga mengikuti kegiatan sosial seperti kelompok tani, kelompok pengajian, atau pun kegiatan lainya di desa relarif rendah.

Kegiatan gotong royong dalam pembangunan dusun ataupun kelompok pengajian tingkat dusun jarang diikuti. Hal itu menjadi faktor tidak tersampainya program pengentasan kemiskinan dari pemerintah yang disalurkan oleh pamong setempat kepada warga miskin. Sosialisasi hanya dilakukan dengan tetangga sekitar yang cenderung kurang produktif, misalnya untuk menonton tv atau mengobrol.

Keuletan kerja juga dirasa kurang. Sang suami baru berangkat ke kebun sekitar pukul 08.00 pagi. Saat ada yang memerlukan jasanya sebagai kuli panggul atau kuli muat terkadang ditolakinya, karena Wagimin lebih memilih mencari atau memikat burung.

Daerah dengan topografi berbukit-bukit dengan kondisi jalan yang jelek membuat akses ke fasilitas umum menjadi susah. Misalnya saja akses ke pasar terdekat, kantor kecamatan, dan Puskesmas yang butuh waktu sekitar setengah jam perjalanan. Akses jalan yang masih susah menjadikan hasil perkebunan dijual dengan harga lebih murah dibandingkan di kampung atau pasar terdekat, sehingga pendapatan hasil kebun tidak terlalu banyak, belum lagi hasilnya dipotong dengan pemilik kebun.



Rumah Bapak Wagimin bagian dalam menyatu antara dapur dan ruang tamu

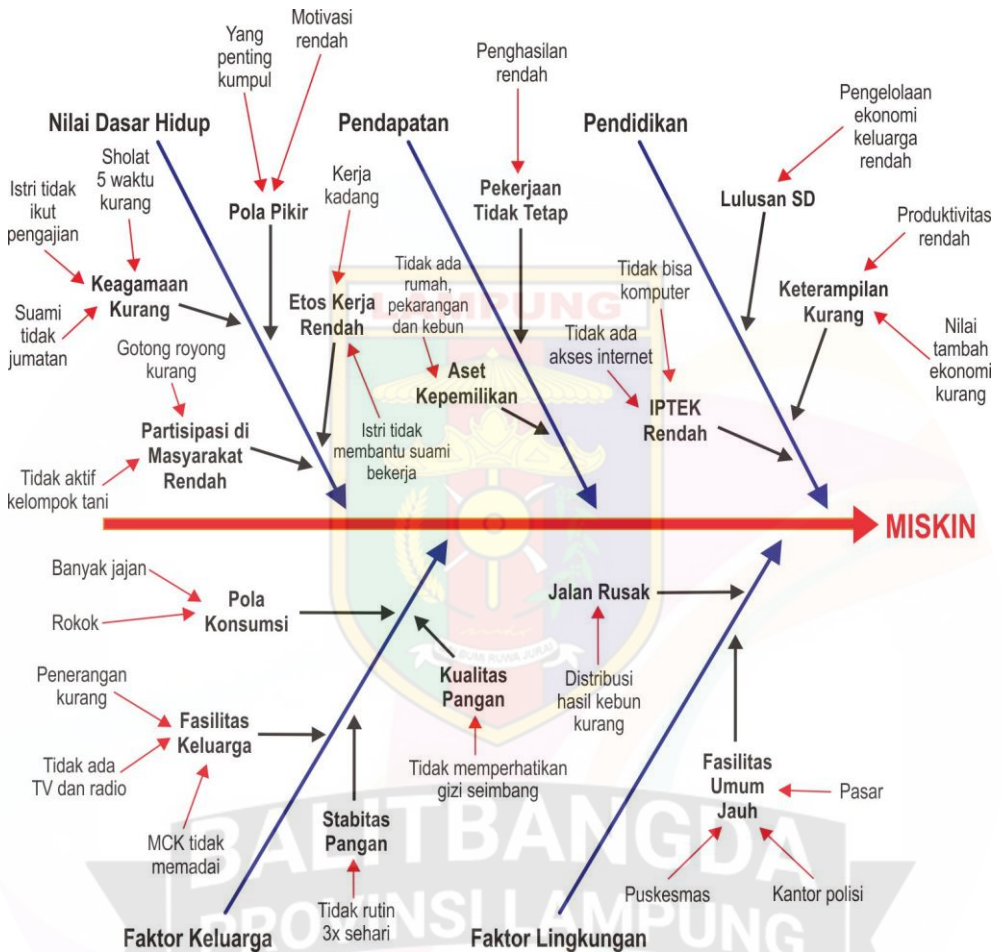


Kamar Tidur



Tempat mandi dan cuci

Fish Bone Diagram



Nilai Baru Barang Bekas

Jepri Susanto (33) dan istrinya Wiwin (33) kini memiliki dua anak. Anak pertama Riki (11) masih duduk di bangku kelas 4 SD. Anak kedua, Nurul (5), belum sekolah. Keluarga ini tinggal di Dusun Karang Sari, Desa Mandala Sari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan.

Jepri hanya mengenyam pendidikan hingga tamatan SMP. Sedangkan istrinya hanya tamat SD. Pekerjaan Jepri adalah jual beli rongsokan. Istri



Jeprri Susanto dan keluarga di depan kediamannya

sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan per hari rata-rata Rp25 ribu. Pekerjaan sambilannya memperbaiki barang rongsok untuk dijual kembali dan menjadi kuli di gudang pengumpul rongsokan. Sesekali sang istri nyambi bekerja di pabrik pembuatan batu bata.

Kondisi rumah mereka sangat sederhana. Dinding dari anyaman bambu (geribik) yang mulai lapuk. Banyak lubang di hampir semua bagian. Lantai rumah masih tanah yang dilapisi karpet yang mulai lusuh dan robek di berbagai sisi. Di atasnya, mereka biasa bersantai sembari mengobrol maupun menonton televisi. Atap rumah terdiri atas asbes di bagian depan dan genteng di bagian belakang.

Di rumah tersebut hanya terdapat satu kamar ukuran sekitar 2x3 meter. Di dalamnya terpasang bambu yang dibuat sedemikian rupa membentuk dipan yang menyatu dengan dinding. Hanya kasur tipis dan beberapa bantal dan guling di atasnya. Di bagian bawah dipan terlihat kotor karena hampir tidak pernah dibersihkan. Terlihat banyak sampah di sana. Sesekali terlihat tikus berlari di bawah dipan tersebut.

Rumah keluarga ini tidak cukup luas untuk menampung aktivitas anggotanya. Ruang depan yang digunakan sekaligus sebagai dapur dan ruang tamu sungguh memprihatinkan. Alat dapur diletakkan hanya ala kadarnya. Ada tiga lemari plastik berukuran kecil yang di sana, selain satu

televisi. Dengan ruangan yang begitu kecil, sulit membayangkan keluarga ini dapat beraktivitas sebagaimana layaknya. Ada kipas angin hasil rongsokan yang masih bisa dipakai, sekadar mengurangi pengap dan panasnya ruangan tersebut.

Rumah kecil itu penuh dengan barang-barang rongsokan. Hanya ada satu jendela di bagian depan, itu pun tertutup lemari. Rumah terasa begitu pengap. Untungnya bagian atap tidak tertutup dan terlihat dibuat lubang kecil di dekat lemari, sehingga udara bisa keluar masuk. Selain itu, ada kipas angin sebagai pemasok udara dingin.

Sumber energi di rumah tersebut adalah listrik yang menumpang meteran listrik dari Masjid dekat rumah. Memasak juga sudah menggunakan gas, karena menggunakan kayu tidak memungkinkan untuk rumah yang sempit rawan kebakaran.

Sanitasi disekitar rumah keluarga ini jauh dari kata layak. Keluarga ini tidak memiliki MCK, ataupun kamar mandi sekedar untuk buang air kecil. Kebutuhan MCK keluarga ini masih menumpang di tempat tetangga atau masjid dekat rumahnya. Terkadang ada bau menyengat di sekitar rumah. Karena tidak adanya MCK, anak-anak terbiasa buang air kecil di samping rumah. Belum lagi bau sampah di belakang rumah.

Dulu keluarga ini memiliki rumah yang ada di samping kandang kambing di sebrang jalan rumah yang sekarang ditempati. Karena kondisi rumah yang sudah sangat tidak layak huni (hampir roboh), pamong setempat berinisiatif menawarkan gubuk miliknya untuk sementara ditempati sampai keluarga ini bisa membangun rumah yang lebih baik. Gubuk itu tadinya untuk menampung bata yang sudah siap jual, sembari menunggu pembeli datang dan mengambil. Dinding rumah RTM sebagian diambil dari dinding rumah yang lama, tetapi rangka atap maupun tanah yang ditempati sekarang adalah milik Ketua RT setempat. Kebetulan, istri Ketua RT merupakan kakak Wiwin dari ibu yang sama tetapi beda ayah.

Hampir seluruh anggota keluarga itu bangun pada subuh hari, kecuali si kecil Yuli. Wiwin sebagai ibu rumah tangga memang membiasakan anak-anaknya bangun subuh dan sholat. Biasanya Jepri dan Riki anak sulungnya sholat di mushola dekat rumah. Selesai sholat subuh, Riki biasanya langsung



mengaji sampai sekitar pukul 06.00. Sementara Jepri dan Wiwin menunggu waktu kerja sambil menonton televisi.

Setiap pagi, Wiwin sudah terbiasa memasak, mencuci piring, mencuci baju, dan menyapu. Sedangkan Jepri mengurus barang-barang rongsok yang sudah ia kumpulkan sehari sebelumnya. Yang masih bisa diperbaiki seperti sepeda, alat penanak nasi, televisi, dispenser, dan lain-lain diperbaikinya untuk dijual kembali sebagai sumber penghasilan tambahan. Riki, siap-siap sekolah setelah mandi dan sarapan.

Mengisi waktu siang, kadang Wiwin di rumah mengemas gelas bekas air mineral sebelum dijual ke pengepul. Sembari mengasuh Yuli, si kecil yang asyik dengan mainannya. Kadang jika ada ajakan, Wiwin pergi ikut membuat batu bata bersama tetangganya.

Rata-rata penghasilan Jepri sebulan sekitar Rp750 ribu. Penghasilan itulah yang dipakai untuk kebutuhan makanan pokok, rokok, listrik, transportasi, cicilan utang, jajan anak, dan lain-lain. Pengeluaran untuk makanan pokok sudah menghabiskan lebih dari separo penghasilan tersebut. Rata-rata kebutuhan dapur minimal Rp450 ribu sebulan. Kekurangan pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan, biasanya Jepri peroleh dari menjual rongsokan yang sudah diperbaiki dan masih bisa digunakan. Jika sedang beruntung, hasilnya bisa melebihi rata-rata penghasilan Jepri dalam sehari mencari rongsokan.



Komunikasi dalam keluarga ini terbilang baik. Orang tua dan anak-anaknya biasa berkumpul dan ngobrol pada saat pagi dan malam hari, sebelum dan sepulang orang tuanya dari bekerja. Khusus pada Jumat, Jefri baru berangkat mencari rongsokan sehabis sholat Jumat. Sabtu dan Minggu Jepri tetap bekerja mengumpulkan barang bekas dari daerah sekitar. Tidak ada hari libur khusus. Keluarga ini sangat mementingkan agama bagi anak-anaknya. Biasanya, jika waktunya Riki mengaji dia belum pulang karena bermain, ibunya akan mencari dan menyusulnya. Hanya, terlihat masih kurang mendorong anaknya untuk giat belajar di rumah. Keluarga ini juga cukup disiplin dalam menjalankan kewajiban agamanya. Kegiatan pengajian dan yasinan juga rajin diikuti. Anak-anaknya rajin mengaji di TPA setempat.

Akses menuju lokasi fasilitas umum/sosial tidak terlalu sulit. Terdiri atas jalan aspal dan jalan *onderlag* yang bebatuannya sudah tidak tertata rapi karena terbawa air hujan. Jenis transportasi yang ada hanya ojek motor, itupun sedikit. Sebagian besar warga di sana memiliki motor untuk memudahkan mobilitasnya. Meskipun hanya motor seadanya tanpa surat lengkap. Motor sebagai kebutuhan, bukan merupakan gaya hidup.

Lokasi sekolah MI/SD juga tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 700 meter dari rumah keluarga ini. Sedangkan untuk SMP dan SMA letaknya sekitar 3 kilo meter dari rumah tersebut. Puskesmas pembantu (Pustu)

berada tidak jauh dari rumah, sekitar 1 km, sedangkan untuk Puskesmas Rawat Inap jaraknya sekitar 3 km.

Gotong royong dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Gotong Royong di dusun ini masih berjalan dengan baik. Setiap Jumat warga bergotong-royong membersihkan jalan, masjid, dan mushola. Terkadang juga bergotong-royong membangun rumah milik warga sekitar atau membantu hajatan warga. Gotong royong juga bisa dijadikan sebagai ajang silaturahmi antar warga sekitar.

Kekerabatan juga masih terjalin erat. Jika ada yang melahirkan atau sakit, misalnya, warga lain akan saling mengunjungi membantu meringankan beban atau sekadar menghibur. Semangat saling membantu antartetangga masih terjaga.

Sebagian besar warga setempat bersuku Sunda. Kegiatan adat yang sering ada di sana adalah pernikahan adat Sunda. Tradisi “saweran” dalam pernikahan adat Sunda masih dilakukan oleh sebagian warga setempat. Penaburan tersebut adalah sebuah simbol pengingat kepada kedua calon mempelai, agar bila dikemudian hari mereka hidup senang, jangan lupa untuk bersedekah dan berbagi kepada sesama.



Taburan saweran disebar diatas payung yang menaungi kedua mempelai yang berlindung di bawahnya. Selama prosesi berlangsung juru sawer menembangkan kidung berisi nasihat sebagai bekal kedua mempelai yang akan menempuh hidup baru. Bahan saweran terdiri dari beras putih, kunyit, bermacam bunga rampai, uang receh, sirih, permen, dan beras kuning yang sudah direndam dalam air kunyit. Masing-masing bahan tersebut merupakan representasi untuk mendoakan mempelai. Selain itu ada acara “among-among” ketika ada yang melahirkan.

Program pemerintah yang merupakan hak warga miskin, dirasakan warga banyak yang salah sasaran. Untungnya keluarga ini sudah merasakan program pemerintah seperti KIP, KIS, maupun Rastra. Untuk PKH baru-baru ini diajukan oleh aparat setempat, itu dapat dilakukan setelah dibukanya kuota penambahan warga yang berhak menerima PKH. Selain itu, keluarga ini juga sudah didaftarkan pada program bedah rumah dan MCK. Semoga semua itu di dapat oleh RTM, karena merupakan warga yang benar-benar miskin.

Program tersebut cukup membantu meringankan beban hidup. Namun, untuk PKH hampir seluruh warga sepakat kurang begitu efektif jika diberikan dalam bentuk uang. Karena uang yang diperoleh hanya sekali dan biasanya langsung habis. Masyarakat mengatakan hanya cukup membeli sembako. Jika untuk modal usaha atau yang lainnya dalam rangka memperbaiki perekonomian, uang yang didapat tidak mencukupi. Karena diperoleh dengan beberapa kali pencarian. Selain itu, banyak PKH yang dapat dikatakan salah sasaran. Menurut aparat desa, data yang digunakan adalah hasil sensus ekonomi tahun 2010. Tentunya setelah lebih dari 7 tahun lewat, banyak kehidupan warga yang berubah. Yang dulunya tidak punya, diantaranya sekarang sudah lebih mampu. Pamong setempat sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya memperjuangkan hak-hak warganya yang masih miskin.

Prinsip penting dalam hidup keluarga ini, antara lain, sesulit apa pun tetap melakukan ibadah. Keluarga ini juga berprinsip meski hidup susah tetapi keluarga tetap kumpul. Mereka siap bekerja apa saja yang penting

halal. Terpenting, sekolah anak adalah utama, agar kehidupannya kelak tidak menjadi beban orang lain.

Asa di Ujung Desa

Keluarga M. Jahri (80 tahun) tinggal di Desa Tanjung Mas Makmur, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Ia memiliki tiga orang anak, hasil perkawinannya dengan Siti Aminah (54 tahun). Kehidupan keluarga petani kebun ini memang sangat sederhana. Jahri dan Aminah hanya mengenyam pendidikan dasar. Lahan perkebunan yang dikelolanya tidak mampu dikembangkan produktivitasnya secara optimal. Ketidakberdayaan keluarga ini berpengaruh terhadap anak-anaknya.



Pendidikan membentuk pola pikir. Rendahnya pendidikan, akan membentuk pola pikir yang sebanding, yang membuat kemampuan berkembang juga akan rendah. Dilihat dari pendidikan keluarga ini sangat rendah. Dampaknya, penghasilan keluarga ini pun rendah, sehingga anak-anak mereka kesulitan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak pertama, Sholihin (26 tahun) pendidikannya juga hanya sampai SD. Anak kedua, Marfua (21 tahun) sedikit lebih baik hingga SMP. Anak ketiga Siti (15 tahun) adalah satu-satunya yang masih diharapkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Apalagi ada program sekolah gratis yang menambah harapan bagi keluarga ini. Penghasilan Jahri sebagai buruh tani sangat terbatas. Apalagi sekarang usianya semakin renta. Tenaga semakin lemah. Penghasilan semakin tak bisa diandalkan.

Lahan perkebunan milik Jahri yang produktif sekarang tinggal seperempat hektar, yang ditanami karet. Setiap bulan, lahan itu hanya menghasilkan sekitar Rp150 ribu. Sangat minim, memang. Hasil itulah yang



dipakai untuk keperluan membeli bahan makanan pokok dan mendukung biaya pendidikan anaknya. Kekurangan; tentu.

Jahri lahir di Magelang pada 1938. Sedangkan sang istri, Siti Aminah, lahir di Banyuwangi 1964. Jahri meninggalkan tanah Jawa mengikuti keluarganya ke Lampung. Ia dan keluarga sempat tinggal berpindah-pindah. Sebelum sampai di Mesuji, keluarga Jahri tinggal di Rawajitu. Karena di sana sering banjir, maka keluarga ini memutuskan untuk pindah ke Mesuji, pada 2001. Pada usia 63 itu, Jahri memulai kehidupan baru bersama keluarga di Desa Tanjung Mas Makmur. Dengan modal yang ada, ia membeli dua hektar tanah. Satu hektar ditanami padi, satu hektar lagi belum tergarap.

Tahun pertama cocok tanam padi keluarga Jahri cukup berhasil. Namun, memasuki tahun kedua di Mesuji, keluarga ini mendapatkan ujian. Anak pertamanya, Khoiru Sholihin, sakit dan lumpuh. Meski sudah dibawa berobat kesana-kemari, penyakitnya tidak juga kunjung membaik. Pengobatan Khoiru ini menghabiskan sebagian besar hasil panen tahun itu.



Kondisi ini berlangsung selama tujuh tahun. “Jadi selama tujuh tahun sebagian besar penghasilan habis untuk mencari pengobatan Khoiru,” tutur Jahri.

Bahkan, dia mengaku sempat tertipu oleh seseorang yang mengaku bisa mengobati penyakit Khoiru. Orang itu minta uang dimuka sebesar Rp5 juta, yang katanya untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan. Namun, setelah uang itu diserahkan, ternyata orang itu kabur tak ada kabar beritanya. Saat ini, penyakit Khoiru mulai membaik, meski kondisi fisiknya belum pulih. Ia sudah bisa beraktivitas dan ikut mengurus pondok pesantren yang tak jauh dari rumah tinggalnya. Saat ini, Jahri yang sudah 80 tahun, tak kuat lagi bekerja mencari nafkah bagi keluarga. Sang istri yang masih sanggup menyadap karet di sisa lahan mereka, disamping sebagian lahan yang disewakan dengan biaya sewa yang tak seberapa. Terkait status kepemilikan lahan, atau sertifikat tanahnya, mereka tidak punya. Hanya kuitansi jual beli.

Kecamatan Mesuji Timur merupakan salah satu kecamatan yang dekat dan berbatasan dengan Sumatra Selatan. Termasuk daerah terpencil.

Jaraknya jauh dari pusat kota Mesuji dengan akses jalan yang kurang baik. Harga barang dan bahan makanan di sana relatif mahal, khususnya di Desa Tanjung Mas Makmur. Kondisi tersebut semakin memberatkan beban hidup warga setempat.

Prinsip dasar hidup seseorang memang berbeda-beda. Namun jika dikaji, hal ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pemahaman agama. Prinsip hidup yang diajarkan Juhri dalam keluarganya adalah menerima apa adanya (*nerimo*). Keluarga ini tidak terlalu menjadikan pendidikan sebagai prioritas penting, sehingga pandangan tersebut berakibat terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya tidak mendapatkan dorongan atau motivasi yang cukup kuat dari kedua orang tua untuk menuntaskan pendidikan, paling tidak sampai lulus SMA. Akibatnya, anak pertama hanya lulus SD, anak kedua lulus SMP, dan anak ketiga baru lulus SMP yang semoga bisa melanjutkan hingga lulus SMA.

Kurangnya pendidikan juga berpengaruh terhadap wawasan, baik dalam hal ide kreatif dan kemampuan berinovasi. Meski keluarga ini memiliki lahan dua hektar, tetapi tidak mampu mengelolanya secara produktif. Lahan itu hanya disewakan atau digadaikan, demi membeli barang konsumtif, yaitu sepeda motor. Kurangnya pendidikan juga berpengaruh rendahnya penghasilan. Meski pemerintah telah memberi bantuan berupa beras miskin (*raskin*), sekolah gratis, pelayanan pengobatan gratis, itu semua tidak mampu membuat keluarga ini bertambah sejahtera, kecuali sedikit mengurangi beban mereka. Dan, sampai sekarang, keluarga itu masih sama seperti sebelum-sebelumnya; serba kekurangan.

Sebagai Pamong

Keluarga Sobarudin (45) tinggal di Kampung Srinumpi, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan. Sobarudin tinggal bersama seorang istri dan dua orang anak laki-laki. Sebenarnya ia punya anak perempuan (anak pertama), tetapi sudah menikah dan tinggal di tempat lain bersama sang suami. Anak kedua bernama Yovi, kelas 6 SD. Si bungsu bernama Adi, yang sempat ikut belajar di PAUD tetapi belum lama berhenti.

Sobarudin adalah asli kelahiran Srinumpi. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap, berkumis tipis, dan rambut hitam lebat. Pekerjaannya masih serabutan. Penghasilan per hari tidak bisa dipastikan, khususnya dalam beberapa bulan terakhir, sering tidak mendapatkan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, ia banyak mengandalkan dari penghasilan sang istri menderes karet di kebun milik orang lain, dengan penghasilan bersihnya sekitar Rp80-90 ribu per minggu.

Sobarudin juga diamanahi warga menjadi Ketua RT di dusunnya. Ia sudah menjadi Ketua RT selama dua periode. Perawak-annya yang berani dan keras, membuat ia cukup disegani diantara warga sekitarnya. Orang tua Sobarudin campuran suku Sunda dan Ogan. Ia menguasai dua bahasa sukunya tersebut dengan cukup baik.

Sang istri, Samiati, selain ibu rumah tangga, juga membantu suaminya mencari nafkah, dengan menderes di kebun karet milik warga lain. Samiati hanya sempat bersekolah sampai kelas 1 SD. Ia terpaksa berhenti sekolah pada saat ibu kandungnya meninggal dunia ketika usianya masih 2,5 tahun. Sejak itu, ia diurus tetangganya. Bapaknya menikah lagi dan keberatan menanggung biaya sekolahnya. Sumiati pun terpaksa berhenti sekolah dan bekerja demi mencukupi kebutuhannya sendiri. Bisa dimengerti jika Samiati tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung.

Samiati menikah dengan Sobarudin pada 1993. Saat itu usianya baru 14 tahun. Sementara, suaminya 19 tahun. Usia yang terbilang dini untuk berumah tangga. Keluarga ini dibangun dengan bekal pengetahuan dan ekonomi yang seadanya.

Anak pertama mereka, Utami, juga meningskah muda saat usianya baru 17 tahun. Utami hanya tamat SMP. Ia sempat merantau bekerja ke Jakarta demi membantu keuangan keluarga. Beberapa bulan di Jakarta, ia pulang dan menikah dengan seorang laki-laki muda pilihannya dari kampung seberang. Saat ini, ia sudah dikarunia satu orang anak, dan sekarang tinggal dirumah suami di Kampung Saung Dadi.

Anak kedua bernama Yovi, saat ini masih kelas 6 SD. Usianya sudah 17 tahun, tetapi masih SD, karena beberapa kali tidak naik kelas. Yovi juga masih kesulitan untuk membaca dan menulis. Di SD tersebut, ia sudah

bersekolah sekitar 11 tahun. Tampaknya, ia memang cukup sulit menerima pelajaran; berkebutuhan khusus. Ditambah dengan motivasi dan dorongan keluarga yang kurang.

Anak bungsunya bernama Adi. Ia sempat beberapa bulan sekolah di PAUD kelas nol kecil. Tapi akhir bulan lalu, ia tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Saat ini usianya memasuki 6 tahun, yang seharusnya sudah harus bersiap untuk menuju pendidikan jenjang SD. Sang Bapak yang hanya berpendidikan SMP, mengaku berminat mengikuti Program Kejar Peket C atau pendidikan setara SMA.

Kampung Srinumpi adalah sebuah kampung kecil dengan masyarakat sebagian bersuku Sunda. Selain ada suku Jawa dan Ogan. Terdapat banyak adat dan budaya yang masih dianut warga setempat. Misalnya, *rewang* pernikahan/khitanan/lahiran bayi. Untuk kegiatan agama, ada khataman di masjid, maupun pengajian kampung pada hari-hari besar Islam. Kebersamaan warga juga masih erat melalui budaya gotong-royong kampung setiap hari Jumat khususnya untuk para lelaki.

Dalam lingkungan Kampung Srinumpi tersebut mayoritas memiliki hubungan keluarga. Satu rumah ke rumah lain, banyak diantaranya yang mempunyai hubungan kekerabatan. Karenanya, terlihat masyarakat masih sangat kental dalam keakraban. Akan menjadi buah bibir jika tidak ikut turut serta di kegiatan adat masyarakat yang ada.

Sebagai warga asli Kampung Srinumpi, dan sebagai orang yang sudah lama menjadi bagian perangkat kampung, Sobarudin sering berhadapan dengan aparat pemerintah dari luar kampung. Sebagai Ketua RT, sering membantu warganya dalam pengajuan bantuan-bantuan pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Misalnya program raskin, BPJS, KIS, KIP, PKH, dan lain sebagainya. Namun, bantuan itu baru dirasakan dalam satu tahun terakhir.

Selama tahun-tahun terakhir, banyak pengalaman warga yang merasa iri dengan tetangga yang mendapatkan bantuan pengentasan kemiskinan, seperti raskin. Begitu pula untuk bantuan sekolah, BOS, ataupun KIP. Saat ini, Yovi yang sudah 11 tahun di bangku SD, tidak pernah satu kalipun menerima bantuan langsung tersebut. Hal ini cukup membuat Sobarudin

merasa tersisihkan, merasa tidak diperhatikan, dan menimbulkan banyak anggapan negatif ke berbagai pihak. Karena keinginan yang tinggi mendapat bantuan seperti tentangga mereka yang begitu diharapkan.

Bantuan dana PKH baru didapatnya pada akhir tahun 2017 lalu, dikelola oleh istrinya untuk membeli keperluan dapur dan makan sehari-hari. Bantuan semacam itu diraskannya sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Kehadiran bantuan pemerintah sangat mereka nanti-nanti.

Bagi keluarga kecil ini, kehidupan memanglah keras, maka mereka menyakini bahwa harus terus bekerja. Yang terpenting dalam hidup adalah bisa terus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sehingga bagaimana caranya selalu ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Prinsip ini dianut tidak hanya dari orang tua, tetapi juga sudah tertanam pada anak-anak mereka.

Pendidikan yang seharusnya dikedepankan, tidak menjadi prioritas dalam keluarga ini. Pendidikan anak tidak diperhatikan dengan baik. Anaknya bertahun-tahun di SD tak kunjung lulus. Anak juga tak dimotivasi untuk mengikuti pelajaran tambahan membaca dan menulis dari guru. Bahkan, anak sering terlambat dan bolos seko-lah. Si bungsu yang berhenti dari PAUD, tidak mendapat perhatian dan tindakan khusus dari orang tua. Orang tua seolah membiarkan anaknya sesuai maunya anak saja, yang terpenting anak senang.

Hal terpenting adalah bekerja menghasilkan uang. Biarlah miskin asal tidak jadi omongan orang. Biarlah miskin asal sehari-hari bisa makan, meskipun hanya dengan kecap atau garam. Begitu kira-kira prinsip mereka. Sebuah pola pikir sederhana terbentuk karena latar belakang pendidikan keluarga yang juga kurang. Tiada pandangan dan optimisme untuk maju dengan pendidikan pada masa depan.

Pertengahan 2017 lalu, Sobarudin pernah mengalami musibah. Ia harus bertanggung jawab membayar sejumlah uang yang dirasakan cukup banyak untuk pengobatan warga, karena terkena gigitan monyet yang dipelihara keluarga Sobarudin.

Pengalaman demi pengalaman pahit tersebut, telah membangun pemahaman dalam diri Sobarudin, bahwa kemiskinan dan kekurangan yang mereka rasakan adalah sebuah takdir yang tak bisa dielakkan. Rendah diri, pasrah dengan takdir, akhirnya selalu melekat dalam pemikiran anggota keluarga ini.



BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Orang miskin tidak akan bisa membantu orang miskin yang lain untuk mentas dari jeratan kemiskinan. Mereka membutuhkan “pihak lain” untuk keluar dari problem kehidupannya. Kelompok rumah tangga dalam katagori sangat miskin relatif lebih rentan melahirkan kemiskinan baru, dibanding kelompok rumah tangga yang miskin atau hampir miskin. Kecenderungan pengabaian terhadap kelompok sangat miskin ini membuat program pengentasan kemiskinan menjadi kurang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.

Potret rumah tangga miskin ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah tentang pola pikir dan pola kerja. Kajian ini lebih mengenali kehidupan keseharian rumah tangga miskin (RTM) di berbagai daerah di Provinsi Lampung, tanpa tendensi untuk memberikan solusi operasional yang tunggal bagaimana mengentaskan mereka dari masalah hidupnya. Hasil observasi terhadap 20 RTM yang tersebar di kabupaten dan kota menunjukkan pola yang hampir serupa dalam kehidupan keluarga miskin tersebut. Secara umum, RTM yang diobservasi adalah keluarga miskin yang taraf kehidupannya relatif terendah di daerahnya. Kehidupan sehari-harinya hanya untuk agar bisa menyambung hidup. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, rumah tinggal yang tidak layak, pekerjaan dan penghasilan tidak menentu, serta pendidikan anak-anaknya yang cenderung terabaikan.

Kehidupan dalam keluarga miskin memiliki pola yang relatif serupa, dimana sehari-hari aktivitas anggota keluarga terutama orang tua adalah bagaimana bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan pokok hidup anggota keluarganya. Kebutuhan pokok ini pun umumnya sebatas konsumsi makanan. Tak jarang, bukan hanya kepala keluarga yang mencari nafkah, tetapi juga istri dan anak-anaknya ikut membantu mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga tersebut. Dalam rangka mencari nafkah itu, keluarga miskin tidak memiliki sumber penghasilan yang ajeg dimana kegiatan dilakukan. Terlebih ketika timbul kebutuhan mendadak yang bisa datang sewaktu-waktu, seperti musibah atau penyakit. Tidak banyak pilihan yang tersedia bagi keluarga miskin untuk memperoleh penghasilan yang lebih.

Faktor pendidikan yang rendah, serta kondisi keterdesakan kebutuhan pokok keluarga setiap harinya, membuat keluarga miskin memiliki orientasi yang sangat pragmatis. Dalam arti, tujuan hidupnya relatif berjangka pendek. Sulit memikirkan tentang masa depan, apalagi untuk berfikir konseptual merencanakan kehidupan keluarga dan keturunannya agar lebih sejahtera hidupnya. Kebiasaan-kebiasaan kontraproduktif sering muncul. Kebiasaan merokok, misalnya, sangat tinggi dan sulit dilepaskan dikalangan RTM. Terbukti, rokok adalah komoditas makanan penyumbang kemiskinan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan, setelah beras (BPS, 2018). Karena itu pula, nyaris semua RTM yang disurvei anggota keluarganya lemah dalam pengamalan ajaran agama. Kewajiban dalam agama condong diabaikan dengan bermacam alasan. Dengan latar belakang yang sama, permasalahan sosial dan kriminal lain rentan terjadi dalam kelompok ini. Tekanan kehidupan dirasakan keluarga miskin seperti belenggu yang menyulitkan mereka untuk lepas dari kemiskinan.

Pola-Pola RTM

Pola kehidupan dalam keluarga miskin yang menjadi tujuan observasi, antara lain: **Ketergantungan terhadap orang lain.** Kepala keluarga RTM pada umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, karenanya penghasilannya juga tidak menentu. Dengan mengandalkan tenaga fisik tanpa keahlian

(*unskill labour*) membuat kepala keluarga RTM sangat tergantung kepada orang lain yang memberikan pekerjaan kepadanya dan upah atas tenaganya tersebut. Mereka hanya akan memperoleh penghasilan jika ada orang lain yang memberikan pekerjaan, apakah sebagai buruh harian atau jasa lain yang bisa diberikan dari kepala RTM.

Karena itu, permasalahan muncul ketika tidak ada pekerjaan yang tersedia, yang berarti tidak akan ada penghasilan yang diperoleh pada hari itu. Ketergantungan (*dependency*) yang disebabkan keterbatasan kapasitas dan kemampuan RTM. Mereka tidak memiliki kemampuan menghasilkan solusi atau menyelesaikan masalah dengan keterbatasan yang ada, terutama untuk menghasilkan atau meningkatkan pendapatannya. Mereka butuh bantuan pihak lain untuk mengatasi persoalan terutama berkaitan dengan sumber pendapatan. Kondisi kemiskinan akan semakin buruk ketika keluarga miskin menghadapi situasi yang tidak diharapkan, seperti mengalami sakit berat atau musibah lain. Kehidupan mereka rentan untuk semakin terpuruk dan menjadi sangat tergantung dengan bantuan orang lain.

Ketergantungan semakin tinggi terutama bagi RTM yang tinggal di kawasan perdesaan, dimana tidak cukup tersedia lapangan pekerjaan atau simpul-simpul kegiatan ekonomi yang bisa menjadi alternatif mereka sebagai sumber mata pencaharian. Akibatnya, aktivitas produktif RTM menjadi sangat terbatas dengan skala yang sangat kecil, karena ketiadaan alternatif sumber mata pencaharian lain di sana. Mereka hanya bisa bergantung pada sektor usaha mikro (sektor informal) atau usaha-usaha ekonomi rakyat yang sangat terbatas. Kondisi mereka semakin termarjinalkan.

Sumber daya alam yang ada pun tidak cukup menunjang kehidupan RTM. Seperti warga miskin yang tinggal di kepulauan, yang notabene memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. Minimnya dukungan infrastruktur di kawasan tersebut membuat potensi alam tidak memberikan nilai ekonomi bagi warga setempat. Kekayaan dan keindahan alam tidak otomatis menjadikan warganya kaya dan kehidupannya indah. Lampung yang dianugerahi keindahan alam berupa pantai, laut, pegunungan, dan potensi alam lainnya belum menjadi berkah yang

dirasakan seluruharganya. Keindahan alam tersebut masih menyimpan derita kemiskinan sebagianarganya yang tidak berdaya.

Perhatian terhadap pendidikan yang rendah. Keluarga miskin yang menjadi tujuan pengamatan secara umum menunjukkan taraf pendidikan yang rendah. Mulai dari kedua orang tua yang berpendidikan rendah, kemudian “menurun” kepada anak-anaknya. Beruntung sekarang pemerintah menerapkan kebijakan sekolah gratis, baik pada level nasional maupun daerah, untuk pendidikan dasar dan menengah. Program pendidikan gratis ini selain membuka peluang anak-anak dari keluarga miskin bisa sekolah, juga memberikan dampak positif secara psikologis terhadap keluarga tersebut dengan munculnya harapan kehidupan anak-anak mereka bisa lebih sejahtera dengan pendidikan yang lebih baik.

Sebagian RTM dari kelompok termiskin itu, terutama selama kurun waktu sebelum adanya kebijakan sekolah gratis, anak-anak mereka tidak mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibanding orang tuanya. Orang tua hanya mengenyam pendidikan dasar; begitu pula anak-anaknya. Pendidikan dalam RTM menjadi kurang mendapat perhatian, ditengah tekanan kebutuhan hidup sehari-hari yang mereka hadapi. Sebagian besar RTM yang diobservasi, pendidikan orang tuanya hanya sampai sekolah dasar. Anak-anak mereka pun terpaksa berhenti sekolah, tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi pola pikir pragmatis dimana kebutuhan hari ini lebih penting dibanding masa depan. Tak sedikit anak-anak RTM berhenti sekolah demi bekerja membantu orang tua mencari nafkah. Sebagian lain memilih berhenti sekolah dan mengambil pilihan lain, yaitu menikah usia muda.

Rendahnya pendidikan ini pula yang membentuk budaya dan pola pikir dalam keluarga miskin. Ketidakberdayaan dimaknai sebagai “takdir” yang tidak bisa dihindari dan harus diterima. Perasaan bahwa mereka butuh bantuan orang lain untuk bertahan mengatasi himpitan kehidupan menjadi tumbuh subur. Budaya dan pola pikir ini kemudian cenderung diwariskan kepada anak-anak RTM. Tak hanya itu, daya pikir yang rendah juga menjadikan pemanfaatan aset yang ada menjadi tidak optimal, baik aset berwujud seperti tanah dan bangunan maupun aset tak berwujud semisal

daya kreatif dan keterampilan. Beberapa RTM yang memiliki aset lahan, misalnya, tak kuasa mengoptimalkan produktivitas lahan yang dimiliki. Diantaranya memilih menjual aset, yang akhirnya habis tak bersisa.

Kemiskinan karena kurangnya perhatian terhadap pendidikan ini lebih mudah dan lebih sering diwariskan dari orang tua kepada generasi berikutnya, sehingga lahir generasi miskin yang baru. Pola hidup RTM yang kurang memperhatikan dan menjadikan pendidikan sebagai prioritas, merupakan salah satu akar kemiskinan yang kuat dan sekaligus cenderung melanggengkan rantai kemiskinan.

Pengaruh faktor lingkungan. Dalam ilmu ekonomi dikenal faktor yang memengaruhi kapasitas produksi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, antara lain, kapital fisik, kapital manusia, dan kapital lain yang berwujud (*tangible*). Di samping itu adalah faktor eksternal, atau sering juga disebut sebagai faktor non-ekonomi. Dalam kaitan pola kehidupan RTM, disamping lemahnya faktor internal, rendahnya produktivitas keluarga miskin juga dipengaruhi faktor eksternal. Lingkungan sosial RTM pada umumnya tidak cukup memberikan penguatan atau dukungan bagi RTM untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Bentuk kepedulian warga yang relatif lebih mampu secara ekonomi, lebih banyak dimaknai sebagai bentuk sumbangan (*charity*).

Dalam hal etos kerja, pada sebagian RTM sesungguhnya cukup tinggi. Mereka bekerja sepanjang hari demi upah yang hanya cukup untuk makan keluarganya. Namun hasil kerja mereka sangat terbatas dan tidak berkembang. Dalam kasus semacam ini, yang dibutuhkan RTM bukan sumbangan atau sedekah, melainkan dukungan untuk mengembangkan kapasitas usahanya, merangsang inisiatif dan daya kreatif, atau juga memberikan insentif atau fasilitas agar bisa lebih produktif. Kecenderungan kepedulian sosial dalam bentuk sedekah atau amal jariyah sering kali memperdalam ketergantungan, memupuk inferioritas, alih-alih melestarikan kepaan.

Lingkungan sosial belum memiliki kapasitas untuk membangun keberdayaan ekonomi RTM. Justru lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial yang membuat kebutuhan pengeluaran RTM bertambah. Hajatan, acara-

acara adat, serta kegiatan sosial yang harus diikuti sering kali berkonsekuensi bertambah beratnya beban pengeluaran. Terkadang biaya yang dikeluarkan untuk menyumbang hajatan lebih besar dari pada biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai-sampai, RTM harus berutang untuk kegiatan-kegiatan sosial tersebut, seperti untuk mengawinkan anak atau pesta lain, atau sekadar untuk sumbangan hajatan kerabat/tetangga. Dalam banyak kasus, peminjam akan kesulitan melepaskan dirinya dari beban utangnya. Akhirnya, RTM harus “gali lubang tutup lubang” dan terperangkap dalam jeratan utang yang lebih dalam. Kultur atau budaya keluarga ini pula yang kemudian turun-temurun dan diperkuat dengan kondisi sosial lingkungannya.

Lingkungan (sistem) ekonomi juga cenderung melanggengkan kondisi dimana penghasilan RTM akan selamanya berada pada tingkat yang sedemikian rendah, sehingga ia tidak akan pernah bisa menabung sedikit pun, apalagi berinvestasi untuk mengembangkan kapasitas ekonominya. Mereka miskin bukan karena malas. Mereka bekerja sepanjang hari, dengan pekerjaan fisik yang berat. Mereka miskin karena lembaga-lembaga formal (ekonomi, sosial, politik) yang ada tidak membantu mereka memperluas basis ekonominya. Tidak cukup tersedia infrastruktur formal untuk melayani kebutuhan kaum miskin.

Faktor lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap kualitas hidup RTM adalah keterisolasian mereka di daerah-daerah terpencil yang minim infrastruktur dan fasilitas publik. RTM yang tinggal di daerah-daerah terpencil, jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kondisi kehidupan mereka umumnya lebih memprihatinkan. Biaya hidup di sana secara umum lebih tinggi, pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih terbatas dalam hal akses dan mutu, serta terbatasnya akses informasi dan sosialisasi yang bisa mereka peroleh.

Rekomendasi

Saran dari hasil kajian ini disampaikan bagi pemerintah daerah khususnya dalam bentuk alternatif kebijakan, yang masih harus dioperasionalkan kedalam bentuk program serta kegiatan yang lebih nyata

dan terarah melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan permasalahan ini.

Pengentasan kemiskinan memerlukan perhatian khusus terutama dari pemerintah untuk menempatkan permasalahan ini sebagai isu strategis dan menjadikannya sebagai prioritas program serta kegiatan yang nyata dan efektif. Pertumbuhan ekonomi perlu lebih diarahkan pada kelompok masyarakat terbawah. Demikian pula pembangunan infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan, penting diarahkan pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi ini. Konsekuensinya, alokasi anggaran setiap tahun untuk sektor-sektor tersebut perlu mendapatkan alokasi yang optimal. Fakta, bahwa kemiskinan membutuhkan keberpihakan yang nyata, dalam bentuk program dan kegiatan yang tepat dan efektif, bukan jargon semata. Alternatif kebijakan yang dapat diajukan dalam upaya pengentasan kemiskinan dari hasil kajian ini adalah:

Memperluas kesempatan kerja bagi RTM. Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan pendekatan meningkatkan dan memperluas wilayah pertumbuhan ekonomi, sehingga memberikan ruang aktivitas produktif yang lebih luas bagi tenaga kerja yang melimpah pada kelompok masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Perluasan wilayah pertumbuhan ini terutama diarahkan pada pemanfaatan potensi dan aset di kawasan perdesaan, mengingat di perdesaan problem kemiskinan lebih terlihat dan potensi ekonomi terutama sektor pertanian relatif tersedia. Membangun dan mengembangkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut, diharapkan akan menjadi lokomotif baru bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Mengingat wilayah perdesaan sebagai kantong kemiskinan mayoritas masih bertumpu pada sektor pertanian, maka pertumbuhan ekonomi sebaiknya lebih diarahkan pada peningkatan pembangunan sektor agribisnis dan agroindustri. Di samping itu, perlunya pemerataan dan peningkatan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok miskin, khususnya di daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Faktor eksternal kemiskinan di Provinsi Lampung bisa secara jelas ditemui terutama di kawasan perdesaan terpencil dan terisolir di beberapa

kabupaten. Warga desa terpencil yang miskin selama ini kurang mendapat dukungan fasilitas dan infrastruktur publik yang memadai. Akses pendidikan, kesehatan, keamanan, masih jauh dari memadai apalagi berkualitas. Lapangan kerja terbatas. Mesin perekonomian di desa-desa terpencil tersebut seperti tidak bergerak. Tidak ada lokomotif penggerak gerbong ekonomi di sana. Fasilitas umum dan fasilitas sosial juga belum cukup tersedia.

Pemerataan infrastruktur sosial dan fisik. Dari observasi terhadap RTM, faktor paling dominan dalam keluarga miskin adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga pola pikir dan budaya hidup dalam rumah tangga tersebut mengalami stagnasi. Rendahnya pendidikan juga membuat mereka tidak memiliki pilihan pekerjaan, sehingga penghasilannya tetap rendah dan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penghasilan rendah membuat rumah tangga miskin kehilangan kreativitas, karena waktu dan tenaga mereka habis untuk mencari nafkah kebutuhan pokok. Pola pendidikan dan pola asuh dalam keluarga tersebut pun tidak cukup mendukung kemajuan bagi anak-anaknya. Akhirnya, kemiskinan cenderung akan melahirkan kemiskinan yang baru.

Banyak warga miskin sebenarnya memiliki potensi untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya, tetapi terkendala minimnya infrastruktur sosial dan fisik yang dibutuhkan, seperti akses pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, atau ketersediaan listrik (energi) dan infrastruktur fisik lainnya. Dalam kasus seperti ini, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerataan akses dan mutu pendidikan menjadi prioritas. Penyediaan listrik untuk semua warga, peningkatan akses jalan dan fasilitas publik yang lain, patut menjadi perhatian pemerintah khususnya untuk kawasan perdesaan.

Karena itu, salah satu program pemerintah yang dirasakan secara merata dan memberikan harapan bagi keluarga miskin untuk suatu saat bisa mentas dari kemiskinannya adalah pendidikan gratis. Semua rumah tangga miskin merasakan manfaat pendidikan gratis ini dan sekaligus melahirkan asa mereka bahwa anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik dan kelak kehidupannya bisa lebih sejahtera dibanding orang tuanya sekarang. Kesempatan pendidikan (gratis) memberikan pengaruh

psikologis terhadap keluarga miskin. Oleh karena itu, program pendidikan gratis ini perlu dibarengi dengan pemerataan akses dan peningkatan relevansi (mutu) pendidikan, sehingga dari satu mata rantai pendidikan ini bisa terputus lingkaran kemiskinan dengan pendidikan anak-anaknya yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat. Semua manusia pada dasarnya dianugerahi keterampilan sejak lahir; keterampilan bertahan hidup. Fakta bahwa keluarga miskin mampu bertahan hidup membuktikan kemampuan itu. Mereka tidak perlu diajari cara bertahan hidup; mereka sudah tahu bagaimana caranya. Namun, mereka menghadapi keterbatasan-keterbatasan dan ketidakberdayaan (*powerless*).

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini hendaknya difokuskan pada pemberdayaan ekonominya. Peningkatan produktivitas masyarakat harus menjadi sasaran utama dalam proses pemberdayaan. Pemberian input seperti modal, sarana dan prasarana, keterampilan, atau lainnya kepada kelompok warga miskin seyogianya ditempatkan sebagai rangsangan (stimulan) untuk peningkatan kapasitas ekonomi mereka. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*), yang akan digerakkan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat tidak dijadikan objek dari proyek pembangunan, melainkan subjek dari upaya membangun dirinya sendiri.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa setiap RTM (kepala keluarga) memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja. Etos kerja mereka cukup tinggi. Keterbatasan kesempatan dan lapangan kerja membuat mereka tidak punya banyak pilihan. Hasil kerja mereka setiap hari relatif tidak mencukupi. Mereka tidak bisa menyisihkan hasil yang didapat dari pekerjaan yang tidak menentu. Mereka pun tidak memiliki kendali terhadap aset dan modal ekonominya. Kemampuan mengendalikan dan mengembangkan modal serta aset ekonomi ini yang perlu ditumbuhkan dalam proses pemberdayaan, sehingga memberikan kekuatan bagi RTM untuk lepas dari himpitan kemiskinan. Membuka akses agar RTM bisa lebih memproduktifkan kemampuan yang sudah mereka kuasai, seperti bertani, beternak, memasak, membuat kerajinan tangan, dan lain sebagainya, untuk

menghasilkan pendapatan yang selanjutnya menjadi kunci pembuka kemampuan yang lainnya serta memberikan peluang untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Pemberdayaan juga diarahkan untuk membangun kekuatan komunitas di kalangan warga miskin. Dalam komunitas RTM mereka bisa saling mengajari teknik-teknik baru yang membuat mereka bisa lebih memanfaatkan keterampilan yang sudah mereka kuasai untuk bertahan hidup selama ini. Proses saling belajar diantara mereka sendiri sekaligus sebagai pelaku langsung kadang akan jauh lebih efektif dibanding metode pelatihan atau training yang diselenggarakan oleh pihak luar. Pemberdayaan juga perlu diarahkan untuk menumbuhkan semangat solidaritas diantara masyarakat. Kepedulian warga masyarakat yang lebih mampu terhadap permasalahan kemiskinan juga perlu didorong menjadi suatu gerakan nyata untuk menanggulangnya secara bersama-sama. Kemiskinan yang terabaikan, rentan memicu permasalahan sosial lainnya.

Sinergi kebijakan. Upaya memberikan “kail” dan bukan “ikan” sebagai strategi penanggulangan kemiskinan sering menjadi polemik. Pemberian “pancing” dan bukan “ikan” juga diasumsikan sebagai strategi pemberdayaan kelompok miskin. Sementara, ada pendapat bahwa bagi kelompok miskin juga penting untuk ditunjukkan bagaimana cara memancing yang baik. Bahkan, dianggap sebagai masalah mendasar juga, bahwa kelompok miskin yang ingin diberdayakan itu seharusnya juga diberikan jaminan bahwa “sungai” atau “danau” tempat mereka memancing bisa terjaga kondusifitas dan kelestariannya.

Di Indonesia memang sering terjadi kasus usaha perekonomian rakyat yang prospektif dikooptasi oleh kelompok pengusaha besar. Sekarang pun bisa kita saksikan, menjamurnya “warung modern” hingga ke pelosok daerah berdampak negatif terhadap keberadaan warung-warung tradisional milik warga setempat. Akibatnya, kelompok ekonomi rakyat (mikro-informal) semakin terpuruk dalam persaingan yang tidak seimbang dan akhirnya tergusur.

Pengentasan kemiskinan seyogianya menjadi tema dan tujuan pembangunan. Bukan semata masalah *mainstream* meningkatkan

pertumbuhan produk domestik nasional dan daerah. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kondisi kehidupan kaum miskin tidak secara otomatis membaik. Maka, dalam konteks pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi perlu didefinisikan ulang. Pembangunan ekonomi perlu lebih diarahkan pada perubahan riil yang terukur pendapatan per kapita populasi warga termiskin yang hendak dientaskan. Untuk itu, lokomotif baru perlu dibangun di dalam komunitas-komunitas warga miskin. Mereka memiliki mesin ekonomi sendiri. Warga miskin perlu dukungan untuk menggerakkan mesin ekonominya, yang akan menarik mereka keluar dari kemiskinan. Lokomotif ekonomi warga miskin ini yang perlu dihidupkan, sehingga gerbong mereka tidak semakin tertinggal oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif.

Pembangunan ekonomi seharusnya mampu mendorong seluruh gerbong (strata ekonomi) untuk bisa maju. Bukan hanya “gerbong kelas satu” yang semakin efisien karena difasilitasi pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan bandara. Investasi juga dibutuhkan oleh gerbong warga miskin dalam bentuk infrastruktur yang lain, seperti pemerataan akses serta mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan insentif lainnya yang lebih mendesak dan dekat dengan permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi kebijakan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menggerakkan semua sektor, tanpa meninggalkan sektor yang lain atau meminggirkan kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat. Dibutuhkan perumusan prioritas yang tepat.

SEKILAS TIM PENYUSUN



RIDWAN SAIFUDDIN. Peneliti Kebijakan Publik pada Balitbangda Provinsi Lampung. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Lampung (1998) dan Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia (2008). Karier sebagai ASN diawali di Bappeda Kota Metro. Pernah aktif sebagai Widyaiswara, dan Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Metro. Pernah juga mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di FISIP Unila untuk mata kuliah Teknik Jurnalistik, dan Dosen Luar Biasa di STAIN Kota Metro (Sekarang IAIN Metro) untuk mata kuliah Ekonomi Islam. Sebelumnya, menjabat Komisioner KPU Kota Metro (2003-2008) dan jurnalis pada Harian *Lampung Post* (1996-2000).



MOHAMMAD SYAFRIZAL. Lahir di Tanjungkarang, pada 13 Desember 1973. Pernah bekerja pada Kementerian Perhubungan, di Jakarta. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, sebagai Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Daerah. Aktivitas lain saat ini sebagai Dosen di Institute Teknologi Sumatera (Itera). Pendidikan terakhir (S-3) diselesaikan di Universitas Indonesia, pada Program Doktorat Fakultas Teknik, lulus pada 2015.



ZAINAL MUTAQIM. Lahir di Tanjungkarang, 11 Agustus 1968. Menyelesaikan S-1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Lampung. Kemudian S-2 dirampungkan di USBRJ Lampung, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung. Sebelumnya mengabdikan diri di Kanwil Depdikbud Provinsi Lampung, yang kini berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung (1990-2016). Selain itu, aktif juga pada beberapa organisasi kemasyarakatan, diantaranya Muhammadiyah, Kepanduan Hizbul Wathon, Pramuka, Forum Komunikasi Generasi Muda Lampung, dan Gojukai. Moto hidup: *“tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.”*



SHINTA FITRIANA. Lahir di Metro, 26 Maret 1983. Pernah bekerja pada Biro Otonomi Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Lampung. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, sebagai Kepala Subbagian Industri pada Bidang Pengembangan Inovasi Daerah. Pendidikan terakhir ditempuh di Universitas Bandar Lampung, program Magister Manajemen, yang diselesaikan pada 2008.



JUNAIIDI. Lahir di Metro, pada 23 Juni 1961. Pernah bekerja pada Biro Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Saat ini bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, sebagai Kepala Subbagian Inovasi Infrastruktur Sarana dan Prasaran, pada Bidang Pengembangan Inovasi Daerah. Pendidikan terakhir ditempuh di Universitas Saburai Bandar Lampung, yang diselesaikan pada 1996.



**BALITBANGDA
PROVINSI LAMPUNG**

PENERBIT

BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG

Jl. Kantor Pos No.2 Telukbetung, Bandar Lampung

Telp/Fax. (0721) 5605759

www.balitbangda.lampungprov.go.id

balitbangdalampung@gmail.com

